



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Kabupaten Sariké Utara
Tahun Anggaran 2023



Malina, Ternate, 2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami dapat melaksanakan Laporan Kinerja (LAKP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 sebagaimana dengan baik dan berhasil.

Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten (LAKP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dan

kinerja pemerintahan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Laporan LAKP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk meninjau dan menilai pencapaian kinerja Pemerintah Daerah yang ada di kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara.

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah (LAKP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Gubernur di Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban di tahun 2023 terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama periode 2023.

Laporan ini merupakan dokumen yang sangat penting Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Gubernur (LAKP) Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan dan ditetapkan serta Peraturan Daerah Tahun 2023. Laporan ini juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperkuat hasil kerja yang telah dilakukan Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini telah selesai dibuat, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Selain itu keberadaan LKIP ini juga dapat menjadi salah satu bentuk bagi badan Perangkat Daerah untuk meningkatkan tingkat di zona masing-masing.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan aktif memberikan masukan, arahan, koordinasi, penyusunan LKIP Kabupaten Banta Utara Tahun 2023 kepada Badan Koordinasi Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banta Utara melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat yang telah memberikan masukan dan arahan sebagai masukan dokumen SKRP Kabupaten Banta Utara kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banta Utara dan tim penyusun LKIP Kabupaten Banta Utara serta pihak-pihak lain yang terkait.



RINGKASAN EKSEKUTIF

(Pemerintah) Kabupaten Berau telah berupaya melaksanakan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dan selalu berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Reformasi selanjutnya dalam rangka pelaksanaan visi strategis Kabupaten Berau memerlukan salah satu aspek yang sangat penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dengan menggunakan indikator yang terdapat dalam Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja Berau yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini tahun keadaannya adalah tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Laporan ini akan menyajikan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Berau pada tahun 2024. Laporan ini akan menyajikan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Berau pada tahun 2024. Laporan ini akan menyajikan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Berau pada tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting bagi Kabupaten Berau. Dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Laporan ini akan menyajikan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Berau pada tahun 2024.

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Kabupaten Berau akan melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini. Dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja: 1 indikator atau 33,33% mencapai lebih dari 100% dan 2 indikator atau 66,67% mencapai lebih dari 75% sd. 100%.

✓ **Misi II** terdapat 1 tujuan: *Menekankan kerja efektif dengan*

Capaian Indikator Kinerja: sebanyak 2 indikator atau 75% dengan lebih dari 100% dan 1 indikator atau 25% dengan lebih dari 75% sd. 100%.

✓ **Misi III** terdiri dari 1 tujuan: *Menekankan 2 indikator kinerja*

Capaian Indikator Kinerja: sebanyak 2 indikator atau 75% dengan lebih dari 100% dan 1 indikator atau 25% dengan lebih dari 75% sd. 100% dan 1 indikator atau 25% dengan lebih dari 75% sd. 75%.

✓ **Misi IV** terdiri dari 1 tujuan: *Mengembangkan tim kerja dengan*

Capaian Indikator Kinerja: sebanyak 1 indikator atau 100% dengan lebih dari 100%.

✓ **Misi V** terdapat 1 tujuan: *Mengembangkan tim kerja dengan*

Capaian Indikator Kinerja: sebanyak 2 indikator atau 100% dengan lebih dari 100% dan 1 indikator atau 25% dengan lebih dari 75% sd. 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan 127.442.000.000.000,00, sebagai total anggaran dasar (anggaran) perusahaan, perusahaan harus dapat melaksanakan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 127.442.000.000.000,00 sebagai total anggaran dasar perusahaan, perusahaan harus dapat melaksanakan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan 127.442.000.000.000,00 sebagai total anggaran dasar perusahaan, perusahaan harus dapat melaksanakan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 127.442.000.000.000,00 sebagai total anggaran dasar perusahaan, perusahaan harus dapat melaksanakan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jalan aspal
2. Rata-rata lama sekolah
3. Angka Harapan Hidup
4. Pengeluaran per kapita pemerintah
5. PERB sektor pertanian
6. PERB sektor perkebunan
7. PERB sektor perindustrian dan konstruksi
8. PERB sektor perdagangan
9. PERB sektor industri
10. Rasio Penerima Bantuan Duit
11. Indeks Mutu Layanan Publik
12. Tingkat penyelesaian sengketa di pengadilan
13. Indeks Pembangunan Manusia
14. Indeks Daya Saing Global
15. Indeks Pembangunan Manusia
16. Indeks Pembangunan Manusia
17. Indeks Pembangunan Manusia
18. Indeks Pembangunan Manusia
19. Indeks Pembangunan Manusia
20. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah menjadi indikator target SDG

Indikator

1. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan
2. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan
3. Ketersediaan layanan kesehatan
4. Ketersediaan layanan kesehatan
5. Ketersediaan layanan kesehatan
6. Ketersediaan layanan kesehatan

Indikator yang akan menjadi indikator untuk SDG target 3.6

Target 3.6: Mengurangi secara signifikan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas



No	Sasaran	Capaian	Indikator
1	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya dengan kuat masyarakat	70%	70%
2	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	60%	60%
3	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	50%	50%
4	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	40%	40%
5	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	30%	30%
6	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	20%	20%
7	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
8	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
9	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
10	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
11	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
12	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
13	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
14	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
15	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
16	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
17	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
18	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
19	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
20	Meningkatnya daya keuraban yang lahir budaya	10%	10%
TOTAL		70%	70%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kawasan Industri Candi	2
1.3 Gambaran Umum Kegiatan	3
1.4 Tujuan Strategi Bisnis	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2019-2021	5
2.2 Indikator Kinerja Utama Perusahaan dan Misi	6
2.3 Rencana Kerja dan Usaha Utama Tahun 2019	7
BAB III ANALISIS DAN KEBERLANJUTAN	
3.1 Analisis Kinerja Perusahaan	8
3.2 Analisis SWOT Perusahaan	9
3.3 Analisis Rencana dan Pelaksanaan Tahunan 2019	10
3.4 Analisis Matriks Portofolio dan Matriks BCG	11
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	12
4.2 Harapan Untuk Depan	13

LAMPIRAN

- Tabel Anggaran Biaya Investasi Tahun 2019-2021
- Tabel Analisis Perbandingan
- Tabel Perbandingan Kinerja dengan Target Tahun 2019
- Tabel Analisis SWOT
- Tabel Analisis Matriks Portofolio dan Matriks BCG

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Daerah Perencanaan Kabupaten Bojonegara	10
Tabel 2	Jumlah Penduduk Asli Kecamatan Tahun 2021	11
Tabel 3	Jumlah Elemen Sebelum dan Setelah Perencanaan Birokrasi	12
Tabel 4	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Bojonegara Tahun 2019-2024	13
Tabel 5	Kategori dan Nilai Nilai Tercapai dan Tercapai	14
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bojonegara	15
Tabel 7	Perwujudan Kinerja Kabupaten Bojonegara Tahun 2021	16
Tabel 8	Perwujudan Kinerja Kabupaten Bojonegara Tahun 2021	17
Tabel 9	Dasar-Dasar Strategi Tahun 2021	18
Tabel 10	Uraian Misi yang akan dilaksanakan	19
Tabel 11	Capaian Kinerja Kabupaten Bojonegara Tahun 2021	20
Tabel 12	Capaian Kinerja yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan (tahun 2021-2025)	21
Tabel 13	Ketahanan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara yang mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegara Tahun 2021-2025	22
Tabel 14	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara yang mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegara Tahun 2021-2025	23
Tabel 15	Relevansi Program Pembangunan Daerah	24
Tabel 16	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara	25
Tabel 17	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara	26
Tabel 18	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara yang mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegara Tahun 2021-2025	27
Tabel 19	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara yang mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegara Tahun 2021-2025	28
Tabel 20	Relevansi Program Pembangunan Daerah	29
Tabel 21	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara	30
Tabel 22	Keberhasilan sistem keuangan Kabupaten Bojonegara yang mendukung program pembangunan Kabupaten Bojonegara Tahun 2021-2025	31

Table 23	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Bankapud Tahun 2019-2023	109
Table 24	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Desa Kuluhan Bankapud Bankapud sejak 2019-2023	110
Table 25	Rencana Program Pendukung Sasaran 5	110
Table 26	Capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> 2023	112
Table 27	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Tahun 2019-2023	113
Table 28	Perbandingan Angka Rasio <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	114
Table 29	Perbandingan capaian kinerja <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi	115
Table 30	Perbandingan capaian kinerja Indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	116
Table 31	Perbandingan capaian kinerja Indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	117
Table 32	Perbandingan capaian kinerja Indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	118
Table 33	Revisi Rencana Pendukung Sasaran 5	119
Table 34	Capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> 2024	120
Table 35	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Tahun 2019-2024	121
Table 36	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	122
Table 37	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	123
Table 38	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia	124
Table 39	Perbandingan capaian kinerja indikator <i>desafektasi</i> Sektoral Kesehatan Sektoral Ujung Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	125
Table 40	Revisi Rencana Pendukung Sasaran 5	126

Tabel 42	Capaian kinerja nasional 2017-2021	101
Tabel 43	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata tahun 2018-2021	102
Tabel 44	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	103
Tabel 45	Indikator Pencapaian Rencana dan Realisasi Pembangunan Kabupaten Banta Utara Tahun 2018-2021	104
Tabel 46	Rencana Program Pembangunan Capaian 1	105
Tabel 47	Capaian kinerja indikator 2018-2021	106
Tabel 48	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata tahun 2018-2021	107
Tabel 49	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	108
Tabel 50	Jumlah Produk Perikanan Tahun 2018-2021	109
Tabel 51	Indikator Pencapaian Pembangunan	110
Tabel 52	Capaian Kinerja Nasional 2017-2021	111
Tabel 53	Perbandingan kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata tahun 2018-2021	112
Tabel 54	Perbandingan kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	113
Tabel 55	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	114
Tabel 56	Indikator Program Pembangunan	115
Tabel 57	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	116
Tabel 58	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	117
Tabel 59	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	118
Tabel 60	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	119
Tabel 61	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	120
Tabel 62	Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB per kapita rata-rata terhadap target RPJMD 2018-2021	121

Tabél 62	Perbandingan capaian kinerja indikator KSPB (sektor usaha) tahun 2018-2023	38
Tabél 63	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator KSPB (sektor usaha) tahun 2018-2023	39
Tabél 64	Rona Program Pendukung Sasaran 10	40
Tabél 65	Capaian kinerja indikator KSP (sektor usaha)	41
Tabél 66	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan tahun 2018-2023	42
Tabél 67	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	43
Tabél 68	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan tahun 2018-2023	44
Tabél 69	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	45
Tabél 70	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 11	46
Tabél 71	Capaian Kinerja Indikator KSP (sektor usaha)	47
Tabél 72	Perbandingan Kinerja Indikator Kinerja Utama 7 (sektor usaha)	48
Tabél 73	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	49
Tabél 74	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	50
Tabél 75	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 12	51
Tabél 76	Capaian Kinerja Indikator KSP (sektor usaha)	52
Tabél 77	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	53
Tabél 78	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	54
Tabél 79	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 13	55
Tabél 80	Capaian Kinerja Indikator KSP (sektor usaha)	56
Tabél 81	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	57
Tabél 82	Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Pedagogik Tahunan terhadap target RP-MS 2018-2023	58

Tabel 83	Perbandingan Tingkat Penyerapan Investasi Langsung Langsung 2018-2023	20
Tabel 84	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan perdagangan KI tahun 2018-2023	21
Tabel 85	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	21
Tabel 86	Rolam Program Pendukung Daerah IV	22
Tabel 87	Capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI tahun 2023	22
Tabel 88	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan tahun 2018-2023	23
Tabel 89	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan tahun 2018-2023	23
Tabel 90	Rolam Program Pendukung Daerah IV	23
Tabel 91	Capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI tahun 2023	23
Tabel 92	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI tahun 2018-2023	23
Tabel 93	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 94	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 95	Rolam Program Pendukung Daerah IV	23
Tabel 96	Capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI tahun 2023	23
Tabel 97	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI tahun 2018-2023	23
Tabel 98	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 99	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 100	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 101	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 102	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 103	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 104	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 105	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 106	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 107	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 108	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 109	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23
Tabel 110	Perbandingan capaian ekspor sektor jasa dan perdagangan KI terhadap target 2018-2023	23

Tabel 104 :	Komponen dan Ruang Lingkup SAKIP	104
Tabel 105 :	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sragen dan Tahun 2010-2013	105
Tabel 106 :	Perbandingan capaian kerja antara Kota Sragen Tahun 2010-2013	106
Tabel 107 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen target RPJMD 2010-2013	107
Tabel 108 :	Ruang Program Peningkat Capaian 10	108
Tabel 109 :	Capaian kerja-pencapaian 10 tahun 2010	109
Tabel 110 :	Analisis Perilaku, Angg. Maksud, dan Impact Perilaku Religius dan Moralitas dan Penguatan	110
Tabel 111 :	Hasil SWOT dan Rekomendasi Program Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2010-2013	111
Tabel 112 :	Rekomendasi Kegiatan Kerja Kabupaten Sragen Membantu penguatan penguatan nilai-nilai keagamaan	112
Tabel 113 :	Perbandingan capaian kerja antara kota Sragen Kabupaten Sragen dan kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	113
Tabel 114 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	114
Tabel 115 :	Capaian kerja antara Kabupaten Sragen 2010	115
Tabel 116 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	116
Tabel 117 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	117
Tabel 118 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	118
Tabel 119 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	119
Tabel 120 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	120
Tabel 121 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	121
Tabel 122 :	Perbandingan capaian kerja antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama	122

:Tabel 102 :	Perbandingan Pelaksanaan Kinerja dan Kecepatan Kerja	
	Tingkat Efisiensi Tahun 2023	70
:Tabel 103 :	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	Kabupaten Banta Utara Untuk Tahun yang Berakhir pada	
	Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sulu Utara	11
Gambar 2	: Analisis SWOT strategi yang mengoptimalkan pemanfaatan utama daerah	16
Gambar 3	: Grafik Rata-Rata Luas Sekolah Kabupaten Sulu Utara Tahun 2015-2023	21
Gambar 4	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	22
Gambar 5	: Grafik Pembangunan Pembangunan Perumahan Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2023	24
Gambar 6	: Perkembangan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Kabupaten Sulu Utara Tahun 2015-2023	25
Gambar 7	: Perkembangan Rasio RASR Sektor Perikanan Kabupaten Sulu Utara Tahun 2015-2023	26
Gambar 8	: Grafik Perikanan Perikanan Tahun 2015-2023	27
Gambar 9	: Perkembangan Rasio RASR Perikanan Kabupaten Sulu Utara Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	28
Gambar 10	: Perkembangan Rasio RASR Perikanan Kabupaten Sulu Utara Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	29
Gambar 11	: Perkembangan Rasio RASR Perikanan Kabupaten Sulu Utara Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	30
Gambar 12	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	31
Gambar 13	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	32
Gambar 14	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	33
Gambar 15	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	34
Gambar 16	: Grafik Pembangunan Unit Kabupaten Sulu Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2023	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang secara eksternal menunjukkan nilai kinerja dan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka memperlengkapinya dengan dan oleh Good Governance. Secara internal LAKIP merupakan alat ukur kinerja yang Kepala Daerah untuk memantau dan mengelola jalannya proses-proses Pemerintah Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAPKIP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK/2009 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan (RKAKM) Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sintang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap masyarakat. Laporan ini menunjukkan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2010 yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

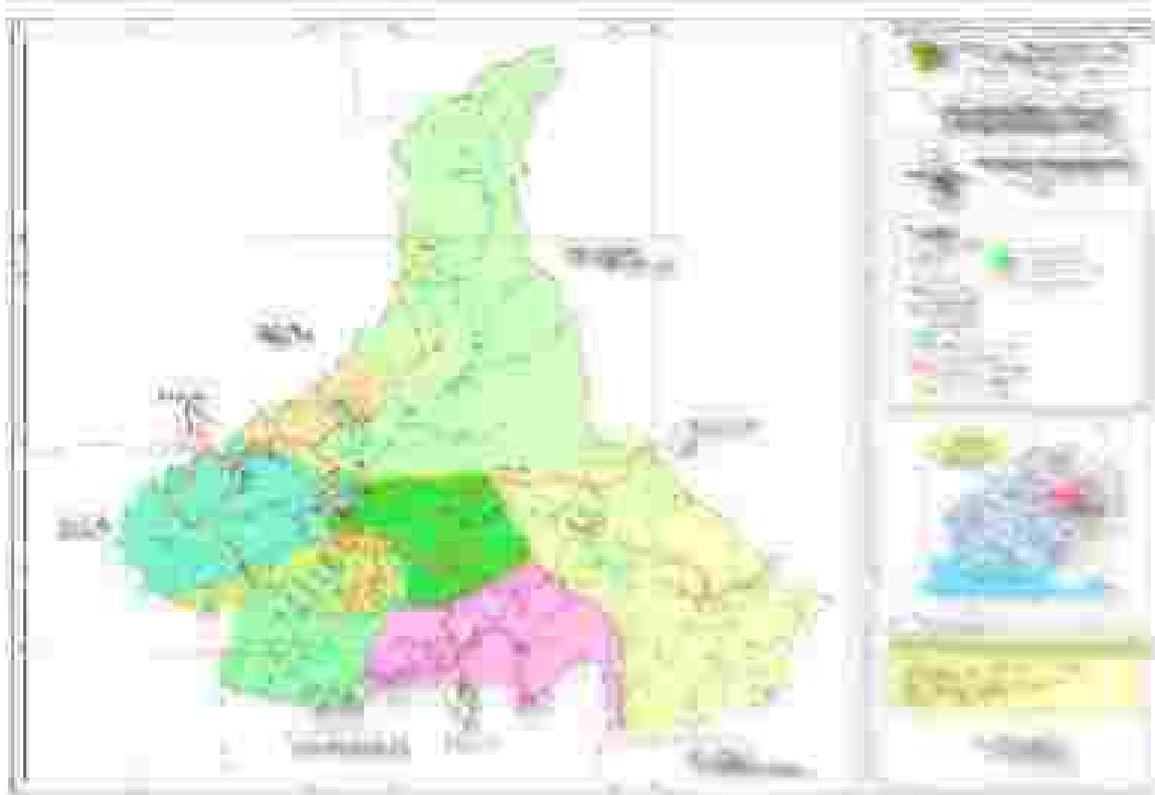
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

1.2.1 Maksud Penyusunan

Maksudnya adalah untuk menunjukkan dan melaporkan secara komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2010 yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Laporan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten



Gambar 10.16. Wilayah Kerja Distrik Mempoh Provinsi Kalimantan Barat

Distrik Mempoh, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Distrik ini memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, distrik ini juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, distrik ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan pembangunan distrik ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Gunung Pura seluas 1.433,00 km² atau 14,33% dari luas Kabupaten Sintang, 100% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lela Barat yaitu 340,26 km² atau 3,38% dari luas Kabupaten Sintang.

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas Wilayah Kabupaten	Luas Kecamatan (%)	Luas Wilayah Kabupaten (%)
1	Mentawai	1.030,00	7.200,00	14,31	14,31
2	Sungai Lintang	1.000,00	7.200,00	13,89	13,89
3	Gunung Pura	1.433,00	7.200,00	19,90	19,90
4	Padaung Besar	1.000,00	7.200,00	13,89	13,89
5	Padaung Kecil	1.000,00	7.200,00	13,89	13,89
6	Tanjung Duri	1.000,00	7.200,00	13,89	13,89
7	Padaung Sempu	1.000,00	7.200,00	13,89	13,89
8	Lela	340,26	7.200,00	4,73	4,73
9	Lela Barat	340,26	7.200,00	4,73	4,73
Jumlah			7.200,00	100,00	100,00

Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami data yang tertera pada tabel adalah sebagai berikut, pertama, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kedua, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Ketiga, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Keempat, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kelima, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami data yang tertera pada tabel adalah sebagai berikut, pertama, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kedua, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Ketiga, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Keempat, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Kelima, jumlah yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

kambisol dan oksid (latam) terdapat di lapisan bagian atas dan bawah, dan keadaan bergelombang dan berbukit.

Iklim di Kabupaten Sintang 2003 bersumber dari hasil pengamatan yang berkisar antara 23-40°C siang dengan 33-37°C. Rata-rata curah hujan sebesar 3371 mm dan rata-rata hari hujan sebesar 24,31 hari per tahun. Suhu maksimum rata-rata 34°C perhari.

Sungai utama yang ada di Kabupaten Sintang 2003 adalah Sungai Kapray, Sungai Banto megalir dan berasal dari Kabupaten Longvong yang mengalir Kabupaten Sintang 2003. Kabupaten Sintang Sintang terbagi ke beberapa desa Kuala Prohmah Kalimantan Selatan. Sungai ini adalah merupakan sungai yang kurang 300 km (dangkal aliran 700 km) dan rata-rata debit pada musim kekeringan 3 meter dan maksimum ke 300 meter. Tidak ada tanggul yang dibangun dalam dalam wilayah di Kabupaten Sintang 2003 untuk pengaliran Sungai. Tidak ada sungai yang terdapat pada tahun 2003.

1.2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2003 berjumlah 460.000 jiwa. Komposisi penduduk pada tahun 2003 sebagian besar laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Sintang 2003 adalah sebagai berikut. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Sintang 2003 yang penduduk yang sebagian besar berpendidikan yang sebagian besar penduduk adalah di Kabupaten Sintang (orang).

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2003

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki
1	MURAI	10.212	5.106	5.106
2	KUALA PROHMAH	10.177	5.088	5.089
3	BANTO	11.749	5.874	5.875
4	KUALA THONG	13.756	6.878	6.878
5	KUALA YONGGAS	18.332	9.166	9.166
6	BEKUMBUH	23.982	11.991	11.991
7	KUALA YONGGAS	15.171	7.585	7.586
8	YONGGAS	23.218	11.609	11.609

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (2023)	Jumlah Penduduk (2024)	Perubahan Jumlah Penduduk
0	Lahat Bata	71.922	71.128	-794
	Jumlah	735.739	737.028	1.289

Berdasarkan data di atas, terdapat 794 jiwa yang pindah dari Lahat Bata ke Kecamatan Lahat pada tahun 2024 yang dipublikasikan oleh SPS Kabupaten Lahat tahun 2024. Jumlah penduduk Lahat Bata tahun 2023 yang terdaftar pada SPS Kabupaten Lahat adalah 71.922 jiwa penduduk, pada tahun 2024 meningkat dan tahun selanjutnya adalah 71.128 jiwa penduduk, sehingga mengalami penurunan sebesar 794 jiwa.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Ketentengaan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat yang selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lahat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2016 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2016.

Menyediakan data dan statistik Kecamatan Lahat Nomor 2 Tahun 2016 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2016 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Lahat memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Lahat, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2016 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2023.

Atribut dan unsur Perangkat Daerah (Badan, Lembaga, dan Organisasi) sebagai berikut:

berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A

2. Sekretariat DPRD Tipe C

3. Inspektoral Tipe S

4. Dinas Daerah:

1) Dinas Pendidikan Tipe A

2) Dinas Kesehatan Tipe B

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe C

4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B

5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B

6) Dinas Kelautan, Perikanan, Perhubungan Laut dan Sektoral Kelautan Tipe A

7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A

9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

11) Dinas Pendidikan Tipe B

12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C

14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

16) Dinas Kesehatan Tipe C

17) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C

19) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

5. Dinas Lain

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C

4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tasek Utara
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tasek Utara

8. Kecamatan:

- 1) Kecamatan Tengahan Tengah Tasek Utara (ibu kota di Tengahan Tengah)
 - a) Kelurahan Melayu Kecamatan Tengahan Tengah
 - b) Kelurahan Longo Kecamatan Tengahan Tengah
- 2) Kecamatan Tengahan Baru Tasek Utara (ibu kota di Longo)
 - a) Kelurahan Jombang Kecamatan Tengahan Baru
 - b) Kelurahan Jambu Kecamatan Tengahan Baru
- 3) Kecamatan Tengahan Selatan Tasek Utara (ibu kota di Tengahan Selatan)
- 4) Kecamatan Mandarika Tasek Utara (ibu kota di Tambora Utara)
 - a) Kelurahan Nongong Kecamatan Mandarika
 - b) Kelurahan Turong Kecamatan Mandarika
 - c) Kelurahan Mubana Kecamatan Mandarika
 - d) Kelurahan Mandarika Kecamatan Mandarika
- 5) Kecamatan Gunung Tinggi Tasek Utara (ibu kota di Gunung Tinggi)
- 6) Kecamatan Tondok Tasek Utara (ibu kota di Tondok)
- 7) Kecamatan Gunung Agung Tasek Utara (ibu kota di Gunung Agung)
- 8) Kecamatan Cidar Tasek Utara (ibu kota di Cidar Utara)
 - a) Kelurahan Cidar Kecamatan Cidar
 - b) Kelurahan Cidar Kecamatan Cidar
- 9) Kecamatan Cidar Baru Tasek Utara (ibu kota di Cidar Baru)
 - a) Kelurahan Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru
 - b) Kelurahan Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru

9. Desa:

- 1) Desa Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru
- 2) Desa Cidar Kecamatan Cidar
- 3) Desa Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru
- 4) Desa Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru
- 5) Desa Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru
- 6) Desa Cidar Baru Kecamatan Cidar Baru

Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi website resmi Pemerintah Kabupaten Tasek Utara dan Kabupaten Mandarika atau kunjungi langsung ke kantor pemerintahan masing-masing.



Pemerintah Kabupaten Banta Uraa menandatangani surat keputusan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah.

Beserta Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Bupati Banta Uraa No 665/47/RS tanggal 23 Juni 2021 merupakan keputusan dan Gubernur Kalimantan Tengah No 160/2021/RS dan sebagai pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat No 10300/SK/2021 dan pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Saat ini struktur organisasi untuk 23 Perangkat Daerah yang merupakan ranah pemerintahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banta Uraa melalui SOTK sebagai berikut sebagai berikut. Penyederhanaan Struktur Organisasi selanjutnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Rencananya tahun 2021 telah dilaksanakan pemecatan dan pengisian dengan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk tahun 2021 akan ada 1000 orang yang akan pensiun dan harus ada pengisian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk tahun 2021 akan ada 1000 orang yang akan pensiun dan harus ada pengisian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan ini surat keputusan penyederhanaan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banta Uraa Tahun 2021

No	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	1. Kepala Daerah	1	1	1
2	2. Wakil Kepala Daerah	1	1	1
3	3. Sekretaris Daerah	1	1	1
4	4. Kepala Perangkat Daerah	23	23	23
5	5. Kepala Dinas	10	10	10
6	6. Kepala Kecamatan	10	10	10
7	7. Kepala Desa	3	3	3

1.4 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul secara umum dapat ditinjau dari analisis permasalahan daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah;
2. Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas;
3. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan lingkungan;
5. Belum optimal kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya tata ruang pemerintahan daerah.



Gambar 1.4.1. Isu-isu Strategis yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Bantul

Perencanaan pembangunan daerah yang baik dan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat sangat vital bagi Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan yang baik dan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan.

tenaga kerja serta dapat mendorong mereka berpartisipasi. Dengan demikian, masyarakat sehingga dapat membuka peluang kerjasama. Sedangkan Gubernur Bando Utara bisa mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh dalam upaya mempercepat pembangunan adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pendapatan daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Bando Utara dan lain sebagainya perlu pembangunan yang dapat menarik investasi yang akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan dapat mempercepat atau pemerataan sosial ekonomi.

Mengingat pertumbuhan daerah dan jumlah penduduk yang meningkat sangat cepat maka Bando Utara perlu membuka peluang melalui cara-cara yang inovatif untuk membuka dan mengembangkan sektor-sektor unggulan menjadi pertumbuhan yang pesat. Sektor sektor yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan masyarakat akan mendorong pembangunan dengan cara-cara yang inovatif yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan. Sebagai bentuk komitmen Bando Utara untuk mempercepat pembangunan terutama diwujudkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Untuk itu Bando Utara perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang berkualitas. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya saing yang dapat meningkatkan daya saing. Mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu

aspek pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam pembangunan. Untuk itu Bando Utara perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang berkualitas. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya saing yang dapat meningkatkan daya saing. Mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu

aspek pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam pembangunan. Untuk itu Bando Utara perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Kita sebagai bangsa melakukan usaha untuk memajukan Indonesia dengan seluruh kemampuan dengan kapasitasnya masing-masing. Kita sebagai bangsa yang tak kalah sangat besar manfaatnya bagi bangsanya akan tetap ada dan tetap berambisi-anak muda kita tidak. Usaha pemerintah untuk memajukan Indonesia akan terus berlanjut bagi rakyatnya yang terus memajukan Indonesia. Kita sebagai bangsa dilantik dengan menyadari program pembangunan Indonesia yang terus berlanjut disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Kita sebagai bangsa yang terus berlanjut akan terus berlanjut dengan program-program yang terus berlanjut. Kita sebagai bangsa yang terus berlanjut akan terus berlanjut. Kita sebagai bangsa yang terus berlanjut akan terus berlanjut.

Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya, baik fisik, sosial, ekonomi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata Kelola pemerintahan adalah upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

PERENCANAAN

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2020

Rencana Strategis Kabupaten Sintang Utara Tahun 2016-2020 merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Utara Tahun 2016-2020. RPJMD Kabupaten Sintang Utara dilaksanakan dari tahun 2016-2020 dengan efektifitas pada 22-10-2016, yang dibuat berdasarkan pertimbangan dari DPRD Kabupaten Sintang Utara yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2015-2019).

Keputusan Kabupaten Sintang Utara Nomor 7/2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sintang Utara Tahun 2016-2020 yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Sintang Utara yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2015-2019) yang dibuat berdasarkan pertimbangan dari DPRD Kabupaten Sintang Utara yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2015-2019).

2.2 RPJMD

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Keputusan Kabupaten Sintang Utara Nomor 7/2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sintang Utara Tahun 2016-2020 yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah 2016-2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2015-2019).

Table 4

Penyusunan Visi RPJMD Kabupaten Garut Jawa Barat 2013-2018

Visi	Fokus-Esok Visi	Rencana Visi
<p>Terwujudnya Masyarakat yang Utra yang Religius, Mandiri dan Sehat Kita melalui Penguatan Peningkatan Penguasaan di Bidang Sumber Daya Manusia, Inovasi, dan Ekonomi Kelangkaan</p>	<p>Meningkatkan pembangunan Ekonomi ketahanan</p>	<p>Pembangunan yang kuat, mandiri, dinamis, mampu bersaing dan berkembang, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal. Meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kelangkaan.</p>
	<p>Meningkatkan pembangunan Masyarakat</p>	<p>Pembangunan yang kuat, mandiri, dinamis, mampu bersaing dan berkembang, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal. Meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kelangkaan.</p>
	<p>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Pembangunan yang kuat, mandiri, dinamis, mampu bersaing dan berkembang, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal. Meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kelangkaan.</p>
	<p>Meningkatkan Aplikasi dan Adopsi Teknologi</p>	<p>Pembangunan yang kuat, mandiri, dinamis, mampu bersaing dan berkembang, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, dan kearifan lokal. Meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kelangkaan.</p>

Visi	Faktor-Faktor Visi	Rencana/Strategi
	<p>Masyarakat Berkeadilan yang maju</p>	<p>dan akan bekerja sama untuk mencapai kemajuan.</p> <p>Perencanaan yang akan dilakukan, yaitu bagaimana caranya agar dapat bekerja sama untuk mencapai kemajuan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.</p>
	<p>Keberhasilan pembangunan</p>	<p>Keberhasilan pembangunan akan diukur dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.</p>

Visi tersebut dimainai sebagai:

Cita-cita untuk anak melaksanakan pembangunan desa di masyarakat yang religius, mandiri, sejahtera yang berkeadilan, persatuan daya dalam kesetiaan tanah dan masyarakat masyarakat, kaya di budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai tokoh masyarakat, jabatan maupun pemimpin dari berbagai kalangan sebagai penggerak hidup dan motivasi masyarakat dengan melaksanakan berbagai pembangunan di bidang budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan pemberdayaan yang dimulai dan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, harmonis, tanpa diskriminasi dibarengi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat meningkatkan dayaannya baik di tingkat lokal, provinsi, nasional hingga internasional dengan cara yang cerdas, kreatif.

Langkah

1. Misi untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bantul, baik di tingkat desa, kecamatan, Kabupaten Bantul dan Indonesia sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

Langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi adalah sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan sebagai arahan daerah. Sehingga sektor kegiatan di Kabupaten Bima terus saja berkembang, kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, infrastruktur tersebut akan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai penggerak infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong kelangkaan distribusi barang dan jasa sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur akan sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat. Pada pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat akan lebih mengoptimalkan keterkaitan antar lokasi untuk kegiatan yang akan tersedia. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang strategis yang sangat meningkatkan penggerak pembangunan pada masa akan datang karena pembangunan lapangan dan kemampuan lapangan yang tersedia. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang.

Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Misi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan sebagai arahan daerah. Sehingga sektor kegiatan di Kabupaten Bima terus saja berkembang, kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, infrastruktur tersebut akan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai penggerak infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong kelangkaan distribusi barang dan jasa sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur akan sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat. Pada pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat akan lebih mengoptimalkan keterkaitan antar lokasi untuk kegiatan yang akan tersedia. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang strategis yang sangat meningkatkan penggerak pembangunan pada masa akan datang karena pembangunan lapangan dan kemampuan lapangan yang tersedia. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang.

Misi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan sebagai arahan daerah. Sehingga sektor kegiatan di Kabupaten Bima terus saja berkembang, kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, infrastruktur tersebut akan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai penggerak infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong kelangkaan distribusi barang dan jasa sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur akan sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat. Pada pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat akan lebih mengoptimalkan keterkaitan antar lokasi untuk kegiatan yang akan tersedia. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang strategis yang sangat meningkatkan penggerak pembangunan pada masa akan datang karena pembangunan lapangan dan kemampuan lapangan yang tersedia. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang.



Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pendidikan yang masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Sero Utra dan pemada pada kesempatan tamaga pendidikan dan kesehatan secara merata seluas-luasnya, serta peningkatan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua warga terutama sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar, sehingga terciptanya kondisi masyarakat Sero Utra yang beriman, berprestasi dan berkeadilan yang maju, adil dan sejahtera. Kemudian RSUD Sero Utra terus berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam penyediaan layanan kesehatan, serta berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Misi ini mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sero Utra melalui berbagai upaya pembangunan yang berkeadilan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Sero Utra, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sero Utra. Misi ini dilaksanakan melalui berbagai upaya pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Sero Utra, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sero Utra.

Peningkatan perekonomian yang berkeadilan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sero Utra. Berbagai upaya pembangunan yang berkeadilan akan dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Sero Utra, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sero Utra.

Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Penguatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta pengorganisasian mengembangkan nilai-nilai sosial budaya seperti nilai keagamaan, sosial, sosial budaya yang mendasar dan fondasi lain yang sangat penting untuk pembangunan. Nilai-nilai yang dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan politik oleh masyarakat tersebut tidak dapat dianggap sebagai unsur yang menentukan dan sebaliknya adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk identitas kebangsaan dan kebangsaan bangsa yang dapat memberikan nilai-nilai yang tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan politik oleh masyarakat tersebut tidak dapat dianggap sebagai unsur yang menentukan dan sebaliknya adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk identitas kebangsaan dan kebangsaan bangsa yang dapat memberikan nilai-nilai yang tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai yang tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan politik oleh masyarakat tersebut tidak dapat dianggap sebagai unsur yang menentukan dan sebaliknya adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk membentuk identitas kebangsaan dan kebangsaan bangsa yang dapat memberikan nilai-nilai yang tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

dapat memanfaatkan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang secara efisien, optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sebagai pembangunan lingkungan yang adil, merata, dan merata namun tetap juga harus memperhatikan. Serta keberlanjutan dapat terdapat tentunya juga harus didukung oleh berbagai kebijakan serta cara yang aman, terdapat dan terdapat.

Keterampilan dan keterampilan merupakan faktor yang dibutuhkan masyarakat agar dapat menggunakan lingkungan yang secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan risiko-risiko bencana, termasuk juga bencana alam dan bencana akibat perubahan lingkungan. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi bencana alam dan bencana akibat perubahan lingkungan. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan, pelatihan, pelatihan, dan pelatihan lainnya.

Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhan serta meningkatkan kualitas pemerintahan yang profesional sebagai pemerintah demokratis yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada semangat dan nilai-nilai Pancasila yang baik sesuai nilai-nilai demokrasi, dan menciptakan kualitas pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan formula tersebut akan terdapat tiga dimensi, yaitu baik sebagai dasar pelayanan masyarakat pelayanan prima terhadap masyarakat.

Salah satu aspek pemerintahan yang baik adalah, pemerintah diselenggarakan pemerintahan yang baik, dengan landasan hukum sebagai pedoman hasil-hasil pelaksanaan dari nilai-nilai demokrasi, sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa hal yang akan terdapat, yaitu baik sebagai salah satu aspek pemerintahan yang baik, dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, serta dengan menggunakan formula tersebut akan terdapat tiga dimensi, yaitu baik sebagai dasar pelayanan masyarakat pelayanan prima terhadap masyarakat.

Salah Satu Aspek Pemerintahan

Salah Satu Aspek Pemerintahan

Salah satu aspek pemerintahan yang baik adalah, pemerintah diselenggarakan pemerintahan yang baik, dengan landasan hukum sebagai pedoman hasil-hasil pelaksanaan dari nilai-nilai demokrasi, sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa hal yang akan terdapat, yaitu baik sebagai salah satu aspek pemerintahan yang baik, dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, serta dengan menggunakan formula tersebut akan terdapat tiga dimensi, yaitu baik sebagai dasar pelayanan masyarakat pelayanan prima terhadap masyarakat.

2. Terwujudnya jembatanyang merata yang berkeadilan sosial yang adil dan sejahtera;
3. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta peran masyarakat yang aktif, harmonis dan berbudaya;
5. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya;

2.1.3.2 Sasaran

1. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut terdapat beberapa sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan kemajuan ilmu dan teknologi
2. Meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata
3. Meningkatkan kemampuan daya saing
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan daya daya produktif
7. Meningkatkan daya produksi
8. Meningkatkan daya produksi
9. Meningkatkan daya produksi
10. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan ilmu dan teknologi
11. Meningkatkan daya produksi
12. Meningkatkan daya produksi
13. Meningkatkan daya produksi
14. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan ilmu dan teknologi
15. Meningkatkan daya produksi
16. Meningkatkan daya produksi
17. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan ilmu dan teknologi
18. Meningkatkan daya produksi
19. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan ilmu dan teknologi
20. Meningkatkan daya produksi yang didukung dengan ilmu dan teknologi

Sesuai dengan RPJAD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2024 keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan pembangunan akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Visi: **Tewujudnya Masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantaeng**

(Masyarakat yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Sejahtera)

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Uraian Sasaran
1. Masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin 2. Jumlah penduduk miskin absolut 3. Jumlah penduduk miskin relatif	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
2. Masyarakat yang maju	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah lapangan kerja 3. Jumlah penduduk miskin	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan lapangan kerja 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan lapangan kerja 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Masyarakat yang mandiri	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah masyarakat yang mandiri 2. Jumlah masyarakat yang mandiri absolut 3. Jumlah masyarakat yang mandiri relatif	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
4. Masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan pemerataan pembangunan	1. Jumlah masyarakat yang berkeadilan 2. Jumlah masyarakat yang berkeadilan absolut 3. Jumlah masyarakat yang berkeadilan relatif	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
5. Masyarakat yang sejahtera	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Jumlah penduduk miskin 2. Jumlah penduduk miskin absolut 3. Jumlah penduduk miskin relatif	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Misi	Tugas	Jumlah Tugas	Jenis	Sifat/Status
<p>WSP 4</p> <p>Peringatan Pengalihan Sosial Budaya Perilaku dan Organisasi Hidup</p>	<p>Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, sosial, dan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkeadilan</p>	<p>1. Sosial Budaya 2. Lingkungan Hidup 3. Sosial 4. Lingkungan Hidup 5. Organisasi</p>	<p>1. Sosialisasi 2. Pengabdian Masyarakat 3. Pengabdian Masyarakat 4. Pengabdian Masyarakat 5. Pengabdian Masyarakat</p>	<p>1. Sosialisasi 2. Pengabdian Masyarakat 3. Pengabdian Masyarakat 4. Pengabdian Masyarakat 5. Pengabdian Masyarakat</p>
<p>WSP 5</p> <p>Peringatan Pengalihan Sosial Budaya Perilaku dan Organisasi Hidup</p>	<p>Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, sosial, dan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkeadilan</p>	<p>1. Sosial Budaya 2. Lingkungan Hidup 3. Sosial 4. Lingkungan Hidup 5. Organisasi</p>	<p>1. Sosialisasi 2. Pengabdian Masyarakat 3. Pengabdian Masyarakat 4. Pengabdian Masyarakat 5. Pengabdian Masyarakat</p>	<p>1. Sosialisasi 2. Pengabdian Masyarakat 3. Pengabdian Masyarakat 4. Pengabdian Masyarakat 5. Pengabdian Masyarakat</p>

2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seroja

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Seroja telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Seroja Nomor 100/G/2020 tentang Rencana Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seroja.

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seroja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Perataan pelayanan	Memastikan terdapatnya pelayanan yang merata di seluruh kecamatan	Target 2023
2	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Kecepatan pelayanan	Meningkatkan kecepatan pelayanan yang terdapat di setiap kecamatan	Target 2023
3	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Kejelasan pelayanan	Meningkatkan kejelasan pelayanan yang terdapat di setiap kecamatan	Target 2023
4	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Kejelasan pelayanan	Meningkatkan kejelasan pelayanan yang terdapat di setiap kecamatan	Target 2023
5	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Kejelasan pelayanan	Meningkatkan kejelasan pelayanan yang terdapat di setiap kecamatan	Target 2023
6	Meningkatkan kualitas pelayanan yang terdapat di setiap kantor	Kejelasan pelayanan	Meningkatkan kejelasan pelayanan yang terdapat di setiap kecamatan	Target 2023

No	Sebab Strategi	Inisiatif Utama (Uraian PKU)	Detail Inisiatif (Uraian PKU)	Indikator
7	Meningkatnya sistem pelayanan	PKU 1000 pelayanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
8	Meningkatnya sektor pelayanan	PKU 1000 pelayanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
9	Meningkatnya sistem pelayanan	PKU 1000 pelayanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
10	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
11	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
12	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
13	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
14	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan
15	Meningkatnya sistem pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	PKU 1000 pelayanan dan peningkatan kualitas layanan	Untuk meningkatkan pelayanan dengan cara meningkatkan jumlah staf	Kecepatan

No	Sebab Strategi	Indikator Kinerja (Uraian PKU)	Dasar dan Format PKU	Referensi
15	Meningkatnya efisiensi di berbagai masyarakat	Kepercayaan kepercayaan Kerja Sama	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU Survei PKU Survei PKU
16	Menurunnya perantara (Masyarakat)	Perantara PKU yang rendah	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU
17	Meningkatnya kualitas pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Kualitas Pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU Survei PKU Survei PKU
18	Meningkatnya kualitas pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Kualitas Pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU Survei PKU Survei PKU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Kualitas Pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU Survei PKU Survei PKU
20	Meningkatnya kualitas pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Kualitas Pelayanan (Kualitas Pelayanan)	Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)	Survei PKU Survei PKU Survei PKU Survei PKU

Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU) Survei PKU (Survei PKU)

2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Kinerja Kabupaten Bantaeng yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati No. 100/2018/Perbup/Bantaeng dan RPJPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2025. Pedoman yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh Bupati Bantaeng pada tanggal 30 Januari 2019. Serta dengan memperhatikan target pada Perencanaan RPJMD 2019-2025 yang akan ditetapkan pemerintah target pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Uraian
1.	Meningkatnya daya saing Masyarakat Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah penduduk yang bekerja di sektor riil	100	100
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah penduduk yang bekerja di sektor riil	100	100
3.	Meningkatnya jumlah wisatawan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
4.	Terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
7.	Meningkatnya kualitas kesehatan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
10.	Meningkatnya kualitas tata kota Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
13.	Meningkatnya kualitas kesehatan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
14.	Meningkatnya kualitas pendidikan Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
15.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100
16.	Meningkatnya kualitas tata kota Kabupaten Bantaeng	Perubahan jumlah wisatawan	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Unit	Tahun
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik sosial	SA	2019
16.	Menurunnya gendang marabahaya sosial	Persentase RAG yang tuntas	SA	2019
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	SA	2019
18.	Meningkatnya tingkat pemanfaatan layanan pemerintah	Indeks SAKIP	SA	2019
19.	Meningkatnya tingkat pembangunan layanan publik	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	SA	2019
20.	Meningkatnya capaian kinerja dan nilai tambah	DBH-SAC	SA	2019

Document created by KIRAKA, last updated on 15/04/2019 10:00:00 AM

KONTROL DAS KOPERASI

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Laporan Kinerja Internal Pemerintah, khususnya tahun 2019 dibuat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Kinerja dan Tata cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Cara Kerja Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi akan sangat berpengaruh dan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi. Hal yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja adalah untuk mengukur kinerja secara terus menerus untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode selanjutnya. Maka dari itu, pengukuran kinerja akan sangat penting untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian yang telah tercapai dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Pengukuran Kinerja

Contoh: $\frac{10000}{10000} \times 100\% = 100\%$

2. Pengukuran Kinerja

Contoh: $\frac{10000}{10000} \times 100\% = 100\%$

Mencantumkan Nama dan No. Urut pada Gambar dan Tabel

Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa pengukuran kinerja akan sangat penting untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian yang telah tercapai dalam pelaksanaan kegiatan.

Rentang Capaian	Kategori Capaian
≥ 100%	Sangat Baik (SB)
> 75% - 100%	Baik (B)
55% - 75%	Cukup (C)
< 55%	Kurang (K)

3.1.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kinerja sesuai dengan uraian berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Keseluruhan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase	Nilai
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Kecepatan Pelayanan	75	85,27	113,69%	85,27
	Keakuratan Pelayanan	80	80,00	100,00%	80,00
	Kepercayaan Masyarakat	85	85,00	100,00%	85,00
	Kelembutan Pelayanan	80	80,00	100,00%	80,00
2. Meningkatkan Efisiensi Anggaran	Kecepatan Pelaksanaan	80	80,00	100,00%	80,00
	Keakuratan Anggaran	85	85,00	100,00%	85,00
	Kepercayaan Masyarakat	85	85,00	100,00%	85,00
	Kelembutan Pelayanan	80	80,00	100,00%	80,00
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Kecepatan Pelaksanaan	80	80,00	100,00%	80,00
	Keakuratan Anggaran	85	85,00	100,00%	85,00
	Kepercayaan Masyarakat	85	85,00	100,00%	85,00
	Kelembutan Pelayanan	80	80,00	100,00%	80,00
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecepatan Pelaksanaan	80	80,00	100,00%	80,00
	Keakuratan Anggaran	85	85,00	100,00%	85,00
	Kepercayaan Masyarakat	85	85,00	100,00%	85,00
	Kelembutan Pelayanan	80	80,00	100,00%	80,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Realisasi	Capaian (%)	RA
7. Meningkatnya sektor pertanian	PCR Sektor pertanian	100	100	100	100	100
8. Meningkatnya sektor perikanan	PCR Sektor perikanan	100	100	100	100	100
9. Meningkatnya sektor perkebunan	PCR Sektor perkebunan	100	100	100	100	100
10. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PCR Sektor koperasi dan UKM	100	100	100	100	100
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
12. Meningkatkan kualitas layanan publik	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
13. Meningkatkan pendapatan daerah	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
14. Meningkatkan pelayanan masyarakat	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100
	IPDR	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2017	2018	2019	2020
16	Menunjangnya penyandang misi sosial	Perantara PMS yang mandiri	7	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan Pelayanan Bina	Indeks Kepuasan Pelanggan	Skala 1-5	3,80	3,80	3,80	3,80
18	Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen	Kualitas	Skala 1-5	3,80	3,80	3,80	3,80
19	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-5	3,80	3,80	3,80	3,80
20	Meningkatnya pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-5	3,80	3,80	3,80	3,80

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam tabel tersebut

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut: (a) Menunjangnya penyandang misi sosial, (b) Meningkatkan kualitas pelayanan Pelayanan Bina, (c) Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen, (d) Meningkatkan kualitas pelayanan, (e) Meningkatkan pelayanan.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	Aspek	Target	Realisasi
1	Meningkatnya penyandang misi sosial	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Pelayanan Bina	3,80	3,80
3	Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen	3,80	3,80
4	Meningkatnya kualitas pelayanan	3,80	3,80

No.	Subsuri	Opener (A)	Anggar
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100000	1000000
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	10000	1000000
7	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
8	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
9	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
10	Meningkatnya akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan	100000	1000000
11	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
12	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
13	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
14	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
15	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
16	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
17	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
18	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
19	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
20	Meningkatnya akses kesehatan	10000	1000000
Jumlah		100000	1000000

Untuk menyusun program kerja dengan target yang dapat diukur, diperlukan metode yang dapat diukur. Metode yang dapat diukur adalah metode yang dapat diukur oleh masyarakat yang bersangkutan.

Table 10

Kategori indikator untuk hasil belajar siswa

No.	Kategori	Jumlah indikator	Persentase
Sasaran 1 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	1	100%
2	Bak. (R)	0	0%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 2 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 3 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 4 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 5 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 6 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 7 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 8 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%
Sasaran 9 (1 indikator)			
1	Bak. Sosial (BS)	0	0%
2	Bak. (R)	1	100%
3	Cikup (C)	0	0%
4	Ruang (R)	0	0%

No	Kategori	Jumlah Indikator	Bobot
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 8 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 9 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 10 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 11 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 12 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10
Skoran 13 (T Indikator)			
1	Baik Selay (BS)	4	40
2	Baik (B)	3	30
3	Cukup (C)	2	20
4	Kurang (K)	1	10

No	Kategori	Jumlah Indikator	Bobot
4	Kurang (K)	10	1
Sasaran 14 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 15 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 16 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 17 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 18 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	11	11
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 19 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%
2	Baik (B)	1	1
3	Cukup (C)	1	1
4	Kurang (K)	11	11
Sasaran 20 (1 indikator)			
1	Baik Baik (BB)	10	100%

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
1	Baik (B)	1	100%
3	Cukup (C)	0	0
4	Kurang (K)	0	0

Hasil Pengukuran Kinerja terhadap 24 indikator kinerja organisasi secara utama diketahui bahwa 100% indikator yang terdapat dalam kategori Baik sesuai dengan indikator atau 25% bernilai baik dan kategori 0% termasuk dalam kategori kurang sesuai dengan sasaran strategis. Dari 24 indikator kinerja organisasi terdapat 24 indikator atau 100% dengan kategori Baik. Sesuai dan 0 sesuai indikator yang 20% dengan kategori Cukup dan 0.

Rata-rata nilai kinerja secara umum tahun 2022 adalah 100,00% dan dalam kategori Baik. Sesuai dengan indikator yang terdapat dalam indikator kinerja tahun 2022 yaitu 100% yang menunjukkan kinerja yang baik.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat dijelaskan beberapa capaian indikator sebagai berikut yang merupakan strategi sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Satu, Meningkatkan Desa Berkualitas yang Terhubung dengan Ruang Wilayah

Keterhubungan antar wilayah dapat menjadi salah satu strategi di Kabupaten Sidoarjo. Sasaran utama di wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 desa/delurahan yang berkelas sesuai dengan misi pembangunan yang menjadi jalur hidup pembangunan desa yang dapat meningkatkan kualitas desa meningkatkan kualitas dan aksesibilitas desa-desa sekitarnya.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

Tabel 11

Capaian Kinerja Indikator ke-11 pada 2023

INDUKSI				
Meningkatkan Desa Berkualitas yang Terhubung dengan Ruang Wilayah				
Indikator	Sasaran	Target	Realisasi	Peringkat
PROGRES DAN LAJUR ALIRAN YANG BERKUALITAS DAN TERKONEKSI	5	70%	70%	70%

4.1 Analisis Realisasi

Program ini adalah pembangunan kawasan desa yang akan dilaksanakan secara bertahap yang meliputi aspek-aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pihak lain seperti swasta dan lembaga internasional. Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas desa-desa sekitarnya.

Table 12

(jumlah deservatikan yang terdaftar)

(jumlah calon dari capaian nilai di bawah 60)

No	Pecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa di Bawah 60	Jumlah Siswa yang Deservatikan					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Montelat	Pusat	10	4	4	4	4	4	4
2	Banding	Kantor	10	10	10	10	10	10	10
3	Timang Guntung	Larangan	11	11	11	11	11	11	11
4	Tanjung Tidar	Berangin	12	12	12	12	12	12	12
5	Pasir	Miring	12	12	12	12	12	12	12
6	Pasir	Pasir	12	12	12	12	12	12	12
7	Pasir	Pasir	12	12	12	12	12	12	12
8	Pasir	Pasir	12	12	12	12	12	12	12
9	Pasir	Pasir	12	12	12	12	12	12	12
10	Pasir	Pasir	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah			102	102	102	102	102	102	102

No	Nama Siswa	Nilai					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	1. Nama						
	2. Nama						
	3. Nama						
	4. Nama						
	5. Nama						
	6. Nama						
	7. Nama						
	8. Nama						
	9. Nama						
	10. Nama						
	11. Nama						
	12. Nama						
	13. Nama						
	14. Nama						
	15. Nama						
	16. Nama						
	17. Nama						
	18. Nama						
	19. Nama						
	20. Nama						

No.	Rincilah Nama Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Tahun 2019 (Batas 2019)					
		2019	2018	2017	2016	2015	2014
	6) Jember	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sangkharang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Ngarabek	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Bahlol	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Payung Atas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Palan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	12) Girau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	13) Tongga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	14) Batu Bayan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15) Batu Bayan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16) Tunggur Raya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kecamatan Dukuapure						
	1) Tukung Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Hutan Ulu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kecamatan Panyabungan						
	1) Panyabungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Panyabungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	11) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	12) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	13) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	14) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	17) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18) Ujung Duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Rincilah nama kecapasan/Desykeucapan	Tembung Kosep					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	Kecapasan Tareh Tengeh						
	1) Cengce	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Melayu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Cembel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Cembel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Cembel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Cembel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sap. Ranyai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Sap. Ranyai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sap. Ranyai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Sap. Ranyai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kecapasan Tareh Sany						
	1) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Kecapasan Tareh Sany						
	1) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kecapasan Tareh Sany						
	1) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10) Sany	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Rinciah Nama Pekerjaan/Detail Pekerjaan	Tahap/Keberhasilan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3)	Mula Per	*	*	*	*	*	*
4)	Mula	*	*	*	*	*	*
5)	Chell	*	*	*	*	*	*
6)	Chell	*	*	*	*	*	*
7)	ga	*	*	*	*	*	*
8)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
9)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
10)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
11)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
12)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
13)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
9	Keperluan Lain-lain						
1)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
2)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
3)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
4)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
5)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
6)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
7)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
8)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
9)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
10)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
11)	Keperluan	*	*	*	*	*	*
Jumlah		10	10	10	10	10	10

Keperluan lain-lain yang diperlukan untuk melaksanakan projek ini adalah sebagai berikut:

1. Keperluan tenaga kerja: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan tenaga kerja yang berkualiti dan berpengalaman. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan adalah 10 orang.

2. Keperluan peralatan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan peralatan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah peralatan yang diperlukan adalah 10 set.

3. Keperluan bahan-bahan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan bahan-bahan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah bahan-bahan yang diperlukan adalah 10 set.

4. Keperluan perkhidmatan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan perkhidmatan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah perkhidmatan yang diperlukan adalah 10 set.

5. Keperluan kemudahan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan kemudahan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah kemudahan yang diperlukan adalah 10 set.

6. Keperluan keselamatan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan keselamatan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah keselamatan yang diperlukan adalah 10 set.

7. Keperluan komunikasi: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan komunikasi yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah komunikasi yang diperlukan adalah 10 set.

8. Keperluan dokumentasi: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan dokumentasi yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah dokumentasi yang diperlukan adalah 10 set.

9. Keperluan latihan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan latihan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah latihan yang diperlukan adalah 10 set.

10. Keperluan pemantauan: Untuk melaksanakan projek ini, diperlukan pemantauan yang berkualiti dan tahan lama. Jumlah pemantauan yang diperlukan adalah 10 set.

desa melalui pembangunan jalan di Kecamatan Komering Lingsi, Kabupaten Komering, Sumatera Selatan bertambah 1 desa yang terhubung akses jalan desa melalui Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Komering Lingsi Kecamatan Komering Lingsi Kabupaten Komering Selatan.

Tabel 10

Perbandingan capaian kinerja indikator pembangunan yang terdapat dengan output rencana pada Tahun 2019-2023

Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan planat jalan	Sasaran	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	%	84,47	84,47	84,47	84,47	84,47	84,47
Realisasi	%	84,47	84,47	84,47	84,47	84,47	84,47
Capaian	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan yang terdapat dalam rencana telah tercapai pada tahun 2019-2023.

Indikator kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan yang terdapat dalam rencana telah tercapai pada tahun 2019-2023.

Tabel 11

Perbandingan capaian kinerja indikator pembangunan yang terdapat dengan output rencana pada Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Tahun 2019	Tahun 2020-2023		
			2020	2021	2022
Indikator Kinerja Utama	%	84,47	84,47	84,47	84,47

Indikator kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan yang terdapat dalam rencana telah tercapai pada tahun 2019-2023.

Indikator kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan yang terdapat dalam rencana telah tercapai pada tahun 2019-2023.

- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan penelitian yang dibuat.
- 3) Terpilihkannya kondisi, SDM dan sarana pendukung yang ada di sebelumnya dalam kondisi baik dan fungsional.

b. Analisis Program Pendukung Sederhana

Program-program pendukung diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pada kondisi awal dengan asumsi sebagai berikut:

Tahun 19

Tabel 1. Program Pendukung Sederhana

Sasaran Strategis Meningkatkan nilai ekonomi yang berbasis produk unggulan			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pendukung (Kategori)	Program Pendukung (Detail)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Produktivitas	SDG 8	Program Pendukung 1	Produktivitas
Daya Saing	SDG 9	Program Pendukung 2	Daya Saing
Nilai Tambah	SDG 10	Program Pendukung 3	Nilai Tambah
Perdagangan Internasional	SDG 11	Program Pendukung 4	Perdagangan Internasional
Kelembagaan	SDG 12	Program Pendukung 5	Kelembagaan
Kelembagaan	SDG 13	Program Pendukung 6	Kelembagaan
Kelembagaan	SDG 14	Program Pendukung 7	Kelembagaan
Kelembagaan	SDG 15	Program Pendukung 8	Kelembagaan

Program-program pendukung tersebut diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pada kondisi awal dengan asumsi sebagai berikut:

3.2.2 Sasaran Dua: Meningkatkan Desa Berbasis yang Terintegrasi Listrik

Ketersediaan energi khususnya listrik sebagai sarana utama untuk mendukung keberfasihan pembangunan sebagai salah satu bentuk pemerataan listrik bagi masyarakat masih menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Utamanya dalam memenuhi ketersediaan energi listrik yang merata. Oleh sebab itu mulai tahun 2018-2023 terdapat beberapa kebijakan yang terhubung listrik menjadi salah satu prioritas utama pembangunan desa.

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja untuk Sasaran 203

Sasaran Meningkatkan Desa Berbasis yang Terintegrasi Listrik				
Indikator	2018	2019	2020	2021
Persebaran dan kualitas jaringan listrik di desa-desa berbasis desa	100%	100%	100%	100%

10. Analisis Indikator

Untuk tahun 2018-2023, indikator ini telah terpenuhi karena seluruh desa di Kabupaten Karang Ujung telah terhubung dengan jaringan listrik. Jaringan ini didukung dengan pembangunan RDN desa-desa berbasis desa yang telah selesai pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program RDN yang terhubung dengan jaringan listrik telah berjalan dengan sangat baik dan telah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan pembangunan RDN desa-desa berbasis desa, desa-desa berbasis desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

No	Nama Kesatuan dan Jasa	Kategori Pekerjaan							
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
	6) Laksbang								
	7) Lemassokil								
	8) Pasang								
	9) Berong								
	10) Saku								
	11) Falsafah								
4)	Kecamatan Tumbang Lor	08	08	08	08	08	08	08	08
	1) Samudragi								
	2) Samudragi								
	3) Upr								
	4) Samudragi								
	5) Samudragi								
	6) Samudragi								
	7) Samudragi								
	8) Mula Mula								
	9) Mula Mula								
	10) Saku								
	11) Saku								
	12) Mula Mula								
5)	Kecamatan Tumbang Lor	08	08	08	08	08	08	08	08
	1) Mula Mula								
	2) Mula Mula								
	3) Mula Mula								
	4) Mula Mula								
	5) Mula Mula								
	6) Mula Mula								
	7) Mula Mula								
	8) Mula Mula								
	9) Mula Mula								
	10) Mula Mula								
	11) Mula Mula								
	12) Mula Mula								
6)	Kecamatan Tumbang Lor	08	08	08	08	08	08	08	08
	1) Mula Mula								
	2) Mula Mula								
	3) Mula Mula								
	4) Mula Mula								
	5) Mula Mula								
	6) Mula Mula								
	7) Mula Mula								
	8) Mula Mula								
	9) Mula Mula								
	10) Mula Mula								
	11) Mula Mula								
	12) Mula Mula								

No	Nama Kesatuan dan Jasa	Kategori							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
17	#Hajak	2		2		2		2	
18	Malawates	2		2		2		2	
19	Siha	2		2		2		2	
20	Gepung	2		2		2		2	
21	Kecamatan Tembung Selatan	10	2	2	2	2	2	2	2
1	Bulang								
2	Tempelan								
3	Silang								
4	Silang Nopel								
5	Pintan Nopel								
6	Gunung Daga								
7	Bukit Daga								
8	Pantai Daga								
9	Pantai Nopel								
10	Pantai Nopel								
11	Pantai Nopel								
12	Pantai Nopel								
13	Pantai Nopel								
14	Pantai Nopel								
15	Pantai Nopel								
16	Pantai Nopel								
17	Pantai Nopel								
18	Pantai Nopel								
19	Pantai Nopel								
20	Pantai Nopel								
21	Pantai Nopel								
22	Pantai Nopel								
23	Pantai Nopel								
24	Pantai Nopel								
25	Pantai Nopel								
26	Pantai Nopel								
27	Pantai Nopel								
28	Pantai Nopel								
29	Pantai Nopel								
30	Pantai Nopel								
31	Pantai Nopel								
32	Pantai Nopel								
33	Pantai Nopel								
34	Pantai Nopel								
35	Pantai Nopel								
36	Pantai Nopel								
37	Pantai Nopel								
38	Pantai Nopel								
39	Pantai Nopel								
40	Pantai Nopel								
41	Pantai Nopel								
42	Pantai Nopel								
43	Pantai Nopel								
44	Pantai Nopel								
45	Pantai Nopel								
46	Pantai Nopel								
47	Pantai Nopel								
48	Pantai Nopel								
49	Pantai Nopel								
50	Pantai Nopel								
51	Pantai Nopel								
52	Pantai Nopel								
53	Pantai Nopel								
54	Pantai Nopel								
55	Pantai Nopel								
56	Pantai Nopel								
57	Pantai Nopel								
58	Pantai Nopel								
59	Pantai Nopel								
60	Pantai Nopel								
61	Pantai Nopel								
62	Pantai Nopel								
63	Pantai Nopel								
64	Pantai Nopel								
65	Pantai Nopel								
66	Pantai Nopel								
67	Pantai Nopel								
68	Pantai Nopel								
69	Pantai Nopel								
70	Pantai Nopel								
71	Pantai Nopel								
72	Pantai Nopel								
73	Pantai Nopel								
74	Pantai Nopel								
75	Pantai Nopel								
76	Pantai Nopel								
77	Pantai Nopel								
78	Pantai Nopel								
79	Pantai Nopel								
80	Pantai Nopel								
81	Pantai Nopel								
82	Pantai Nopel								
83	Pantai Nopel								
84	Pantai Nopel								
85	Pantai Nopel								
86	Pantai Nopel								
87	Pantai Nopel								
88	Pantai Nopel								
89	Pantai Nopel								
90	Pantai Nopel								
91	Pantai Nopel								
92	Pantai Nopel								
93	Pantai Nopel								
94	Pantai Nopel								
95	Pantai Nopel								
96	Pantai Nopel								
97	Pantai Nopel								
98	Pantai Nopel								
99	Pantai Nopel								
100	Pantai Nopel								

No	Nama Kesahatan dan Jasa	Kategori (Kelas)							
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
17)	Jatigabung Cattle	1	1	1	1	1	1	1	1
18)	Papas Rajeg	1	1	1	1	1	1	1	1
19)	Tesa Malasa	1	1	1	1	1	1	1	1
10)	Banar Hir	1	1	1	1	1	1	1	1
11)	Banar Hula	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah		5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: BUKU LER Hajar Tawar dan Bagan Rancangan Persempitannya 2013, Juruwal
 Daerah Kabupaten Bako, Jara 337

"Ela mbanduykup dengan lalat subserena, ungu dan kumbang 1998
 lamudung dengan lalat dan lalat lalat. Terjadi dengan lalat dan lalat
 2014/2023. lalat dan lalat dan lalat. lalat dan lalat dan lalat dan lalat
 lalat dan lalat"

Tabel 3

Rubundopongny dan lalat
 lalat dan lalat

	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
1) lalat dan lalat	1	1	1	1	1	1	1
2) lalat dan lalat	1	1	1	1	1	1	1
3) lalat dan lalat	1	1	1	1	1	1	1
4) lalat dan lalat	1	1	1	1	1	1	1

"Kategori lalat dan lalat
 lalat dan lalat
 lalat dan lalat
 lalat dan lalat
 lalat dan lalat
 lalat dan lalat"

Tabel 13

Perbandingan capaian kinerja indikator dan subindikator yang ditubuh
(dengan angka 100 sebagai acuan 100%)

Indikator Kinerja Utama	Skoran	Kategori (sesuai Peraturan Menteri 2018)	Kategori (sesuai Peraturan Menteri 2018)		
			Target	Capaian	Peringkat
Persentase data keuliah yang terhubung dengan LAMNAD IAIN	100	100%	100%	100%	100%

Raktor yang harus diperhatikan dalam pencapaian KPI adalah

- 1) **Belum terdapatnya** data yang terkoneksi ke sistem yang terkoneksi dengan sistem lain sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk menggabungkan data ke dalam sistem.
- 2) **Kualitas** data yang terkoneksi dengan sistem. Sedangkan untuk keamanatan terkoneksi dengan sistem maka perlu ada kepastian mengenai keamanan terkoneksi dengan sistem. Untuk keamanan terkoneksi maka perlu ada kepastian mengenai keamanan data yang terkoneksi dengan sistem. Untuk keamanan terkoneksi dengan sistem maka perlu ada kepastian mengenai keamanan terkoneksi dengan sistem.
- 3) **Keamanan** data yang terkoneksi dengan sistem. Untuk keamanan terkoneksi dengan sistem maka perlu ada kepastian mengenai keamanan terkoneksi dengan sistem.
- 4) **Keamanan** data yang terkoneksi dengan sistem. Untuk keamanan terkoneksi dengan sistem maka perlu ada kepastian mengenai keamanan terkoneksi dengan sistem.

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program jaminan dikeberhasilan pencapaian indikator pada daerah pada sasaran ke-2 tersebut pada pokoknya program sebagai berikut:

Tabel 20

Portofolio Program Pendukung Sasaran 2

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan yang Terwujud pada			
Indikator Kinerja Efektif	Program Pendukung (Bentuk dan Mekanisme)	Program/Unit Pelaksana	Kelembagaan Pelaksana
Persentase desa/kelurahan yang terlulus pemeriksaan RUPK	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RUPK Kelembagaan dan penyalangan Kelembagaan dan penyalangan Kelembagaan dan penyalangan 	Program Kelembagaan dan penyalangan	Kelembagaan dan penyalangan

Terdapat dua program pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu: (1) Program Kelembagaan dan penyalangan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dan (2) Program Kelembagaan dan penyalangan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Kelembagaan dan penyalangan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Program ini akan dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Program Kelembagaan dan penyalangan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, yang akan dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

1) Kendala akses jalan yang rusak dan sulit dilalui sehingga PT 2000 sulit menjangkau material melalui jalur sungai yang terdapat batu besar dan waktu yang lebih lama.

2) Kendala pembatasan jalan (jam).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengerah Bina Jalan melakukan beberapa alternatif solusi antara lain:

1) Memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pemetaan sumber-sumber air Pekerjaan Uraan Dasa yang mampu mengisi kebutuhan sumber-sumber rombongan PT 2000 untuk keperluan pengisian.

2) Memfasilitasi kemitraan pembudidayaan ikan ikan dengan melibatkan warga masyarakat setempat dengan cara ikut serta dalam proses pembudidayaannya.

3.2.3 Sasaran Tiga, Menerumnya Desa Cendek Berdaya

Ketersediaan layanan komunikasi lebih merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama pada era digital. Ketersediaan layanan komunikasi terutama sinyal seluler masih belum merata secara nasional, terutama di Bantorejo. Oleh karena itu salah satu sasaran strategis pembangunan adalah meningkatkan desa berdaya yang berdaya.

Perbandingan target dan realisasi kinerja yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja yang terdapat dalam tabel berikut

Sasaran Menerumnya Desa Cendek Berdaya				
Indikator	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	30	100%

A. Analisis Indikator

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan secara keseluruhan pada periode tersebut, yaitu 100% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator yang ditargetkan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja yang terdapat dalam tabel berikut

No	Indikator	Target	Realisasi	
			Target	Realisasi (%)
1	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
2	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
3	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
4	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
5	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
6	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
7	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
8	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
9	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%
10	Meningkatkan desa berdaya yang berdaya	5	30	100%

No	Kecamatan	Jumlah Total Desa Kelurahan	Jumlah Desa Kelurahan yang memiliki akses pelayanan kesehatan		
			2012	2013	2014
E	Lore	13	10	11	11
F	Laboh Barat	11	9	10	10
	Jumlah	24	19	21	21

Sumber: Dinas Kesehatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Desa yang masih dalam kondisi terbelakang adalah Desa Bontol, Desa Bontol I, Lurah Bontol II, Tambak, Tanjung Harapan dan Bontol yang semuanya berada pada wilayah Kecamatan Gedung Rapih. Jumlah 5 desa tahun 2012, 2013 dan 2014. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 23

Terdapat 5 desa yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan di Kecamatan Gedung Rapih, 2012-2014

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Desa Bontol	1	1	1	1	1	1	1
Desa Bontol I	1	1	1	1	1	1	1
Desa Bontol II	1	1	1	1	1	1	1
Desa Tambak	1	1	1	1	1	1	1
Desa Tanjung Harapan	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Yang akan di lakukan pada tahun 2019 adalah desa Bontol, Bontol I, Bontol II, Tambak, Tanjung Harapan dan Bontol yang semuanya berada pada wilayah Kecamatan Gedung Rapih. Jumlah 5 desa tahun 2012, 2013 dan 2014. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 24

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator perantara pada tahun 2022 dengan target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Bulan	Kinerja Aktual RPJMD 2022	Kategori Kinerja Utama		
			Tinggi	Normal	Rendah
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	0%	0%

Adapun detail capaian bulan secara rinci dapat dilihat pada tabel 25 di bawah ini :

1) Bulan bulan berjalan pencapaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat secara rinci pada tabel 25 di bawah ini

2) Adapun pencapaian hasil pelaksanaan tahun 2022 yang telah dilaksanakan secara tepat waktu sehingga tercapai capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

3) Adapun rincian capaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

4) Adapun rincian capaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

5) Adapun rincian capaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

6) Adapun rincian capaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

7) Adapun rincian capaian capaian kinerja 100% dengan indikator Kinerja Utama yang terdapat pada tabel 25 di bawah ini

Rencana Program Pendidikan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Ketahanan Nasional			
Indikator Kinerja Utama	Regenerasi Pemangku/Pejabat Daerah dan RR/KD	Program dan Kegiatan Kelembagaan Daerah	Unit Pelaksana Pelaksana
Peningkatan daya ketahanan daerah	Program pengembangan jabatan dan pengembangan informasi	Program Integritas dan Good Governance Program Akademi Integritas Program Peningkatan Kualitas Daerah	Unit Pelaksana Pelaksana Pusat

Calon pemangku jabatan dan pejabat fungsional memiliki kompetensi yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemangku jabatan, subbagian akan meninjau hasil kerja pemangku jabatan serta akan menilai proses kerjanya. Sedangkan bagi pejabat fungsional akan dilakukan penilaian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Program ini akan dilaksanakan oleh unit pelaksana pusat melalui proses kejurusan dan seleksi yang ditetapkan secara nasional.

Kelembagaan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya pemertanian dan pemertanian jabatan pejabat fungsional dan pejabat struktural. Hal ini akan dilakukan melalui proses kejurusan dan seleksi yang ditetapkan secara nasional. Program ini akan dilaksanakan oleh unit pelaksana pusat melalui proses kejurusan dan seleksi yang ditetapkan secara nasional.

Untuk meningkatkan kualitas manajemen daerah yang dilaksanakan oleh unit pelaksana daerah, subbagian akan meninjau hasil kerja pemangku jabatan serta akan menilai proses kerjanya. Sedangkan bagi pejabat fungsional akan dilakukan penilaian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Program ini akan dilaksanakan oleh unit pelaksana pusat melalui proses kejurusan dan seleksi yang ditetapkan secara nasional.

3.2.4 Sasaran Empat, Meningkatkan Akesibilitas dan Kualitas Pendidikan
 Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Empat Sasaran 4 – Tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan					
No.	Indikator	Sasaran	Tahun 2022	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata lama sekolah	Tinggi	12,7	12,8	100%
2.	Angka melek huruf	95	95,04	95,04	100%
Rata-rata					100%

4) Analisis Indikator 1: Rata-Rata Lama Sekolah 12,7

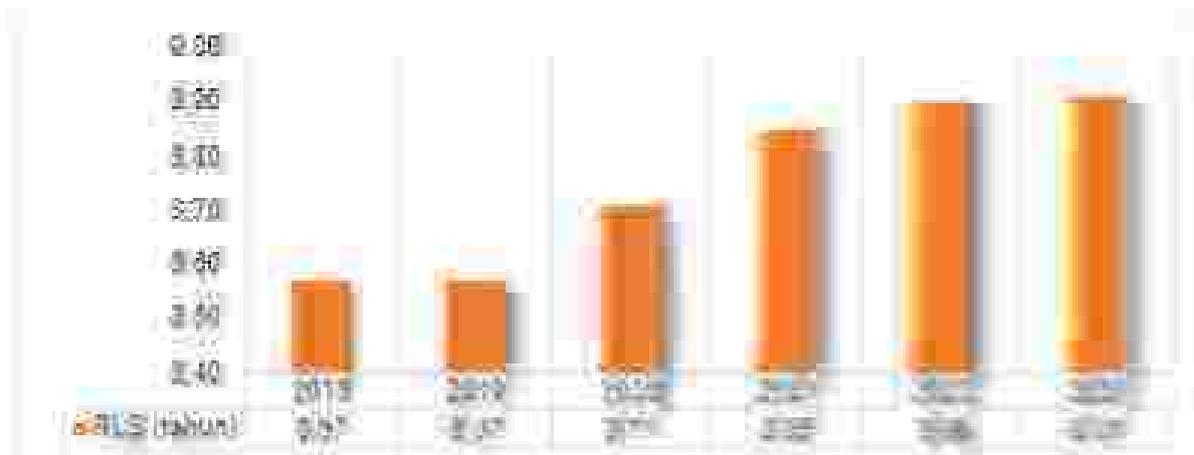
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Untuk Rata-rata lama sekolah 2023, kabupaten/kota tersebut mempunyai rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dengan tingkat rata-rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan bahwa penduduknya telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Untuk tahun 2023, kabupaten/kota tersebut mempunyai Rata-rata Lama Sekolah 12,7 tahun yang menunjukkan bahwa penduduknya telah memperoleh pendidikan yang memadai. Untuk tahun 2023, kabupaten/kota tersebut mempunyai Rata-rata Lama Sekolah 12,8 tahun yang menunjukkan bahwa penduduknya telah memperoleh pendidikan yang memadai. Dengan tingkat rata-rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan bahwa penduduknya telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Tabel 3.2

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional dan Provinsi Tahun 2023

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Sumatera Barat	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Sumatera Selatan	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Sumatera Utara	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Rata-rata Nasional	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Rata-rata Provinsi	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7



Sumber: 1. Data PDRP Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Pangasinan, Pangasinan, Pangasinan, Pangasinan

Menurut data tersebut yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangasinan mengalami peningkatan secara bertahap, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangasinan terus mengalami kemajuan.

Tabel 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan

Indikator Kinerja Utama (IKU)		
Indikator Kinerja Utama	Nilai Target	Realisasi
0.00	0.75	0.00

Sumber: Data PDRP Kabupaten Pangasinan

Menurut data tersebut yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangasinan mengalami peningkatan secara bertahap, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangasinan terus mengalami kemajuan.

Tabel 11

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan, Kabupaten Pangasinan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)		
			2021	2022	2023
Indikator Kinerja Utama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beberapa faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran akan nilai belajar berkeadilan
- 2) Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah kejuruan terutama akses pendidikan tinggi
- 3) Berjalannya program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan prasarana pendidikan dasar

B. Analisa Indikator 2. Angka Melekat Nyala

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk dapat mengikuti dan mengikuti berbagai kegiatan serta dapat (20%) merupakan indikator untuk melihat sejauh mana individu atau kelompok masyarakat memahami materi. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari kemampuan membaca. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca.

Hasil dari indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca individu atau kelompok masyarakat di Kabupaten Pangasinan pada tahun 2023 adalah 54,00% dan pada tahun 2022 adalah 44,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca individu atau kelompok masyarakat di Kabupaten Pangasinan pada tahun 2023 adalah 54,00% dan pada tahun 2022 adalah 44,00%.

Tabel 3
Perbandingan Nilai dan Status Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Tahun 2022 dan 2023

Aspek/Indikator	Tahun	Nilai					
		80-100	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39
1.1.1	2023	100%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.2	2023	100%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.3	2023	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Angka Melekat Nyala (AMN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca individu atau kelompok masyarakat di Kabupaten Pangasinan pada tahun 2023 adalah 54,00% dan pada tahun 2022 adalah 44,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca individu atau kelompok masyarakat di Kabupaten Pangasinan pada tahun 2023 adalah 54,00% dan pada tahun 2022 adalah 44,00%.

Tabel 21

Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia

Angka Melek Huruf		
Kabupaten Banto Uara	Provinsi Kalimantan Tengah	Indonesia
99,38%	99,22%	98,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pencapaian target pada 2022 sebesar 99,38% (dari tahun 2021 sebesar 98,07%). Hal ini menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Banto Uara telah melebihi target nasional yang ditetapkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98,07%. Hal ini menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Banto Uara telah melebihi target nasional sebesar 1,31%.

Tabel 22

Perbandingan capaian angka melek huruf pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/kota	Provinsi	Angka Melek Huruf (2022)	Perbandingan		
			Target	Realisasi	Perbedaan
Kabupaten Banto Uara	Provinsi Kalimantan Tengah	99,38%	98,07%	99,38%	1,31%

- 1) Kabupaten Banto Uara telah melebihi target nasional tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 98,07%.
- 2) Angka melek huruf yang melebihi target nasional telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022.
- 3) Kabupaten Banto Uara telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yang melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 98,07%.
- 4) Hal ini menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Banto Uara telah melebihi target nasional sebesar 1,31%.

- 2) Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gaya hidup bersih-bersih di tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada lembaga dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

c. Analisis Program Pendukung Sasaran

Program-program pendukung diperlukan untuk mencapai sasaran ke-1 terdapat pada program sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tidak Program Pendukung Sasaran 1

Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan			
Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung Utama	Program Pendukung Lainnya	Indikator Kinerja Utama
1. Aksesibilitas 2. Kualitas 3. Biaya	1. Program 2. Program 3. Program 4. Program	1. Program 2. Program 3. Program 4. Program 5. Program 6. Program 7. Program 8. Program 9. Program 10. Program 11. Program 12. Program 13. Program 14. Program 15. Program 16. Program 17. Program 18. Program 19. Program 20. Program 21. Program 22. Program 23. Program 24. Program 25. Program 26. Program 27. Program 28. Program 29. Program 30. Program 31. Program 32. Program 33. Program 34. Program 35. Program 36. Program 37. Program 38. Program 39. Program 40. Program 41. Program 42. Program 43. Program 44. Program 45. Program 46. Program 47. Program 48. Program 49. Program 50. Program 51. Program 52. Program 53. Program 54. Program 55. Program 56. Program 57. Program 58. Program 59. Program 60. Program 61. Program 62. Program 63. Program 64. Program 65. Program 66. Program 67. Program 68. Program 69. Program 70. Program 71. Program 72. Program 73. Program 74. Program 75. Program 76. Program 77. Program 78. Program 79. Program 80. Program 81. Program 82. Program 83. Program 84. Program 85. Program 86. Program 87. Program 88. Program 89. Program 90. Program 91. Program 92. Program 93. Program 94. Program 95. Program 96. Program 97. Program 98. Program 99. Program 100. Program	1. Indikator 2. Indikator 3. Indikator 4. Indikator 5. Indikator 6. Indikator 7. Indikator 8. Indikator 9. Indikator 10. Indikator 11. Indikator 12. Indikator 13. Indikator 14. Indikator 15. Indikator 16. Indikator 17. Indikator 18. Indikator 19. Indikator 20. Indikator 21. Indikator 22. Indikator 23. Indikator 24. Indikator 25. Indikator 26. Indikator 27. Indikator 28. Indikator 29. Indikator 30. Indikator 31. Indikator 32. Indikator 33. Indikator 34. Indikator 35. Indikator 36. Indikator 37. Indikator 38. Indikator 39. Indikator 40. Indikator 41. Indikator 42. Indikator 43. Indikator 44. Indikator 45. Indikator 46. Indikator 47. Indikator 48. Indikator 49. Indikator 50. Indikator 51. Indikator 52. Indikator 53. Indikator 54. Indikator 55. Indikator 56. Indikator 57. Indikator 58. Indikator 59. Indikator 60. Indikator 61. Indikator 62. Indikator 63. Indikator 64. Indikator 65. Indikator 66. Indikator 67. Indikator 68. Indikator 69. Indikator 70. Indikator 71. Indikator 72. Indikator 73. Indikator 74. Indikator 75. Indikator 76. Indikator 77. Indikator 78. Indikator 79. Indikator 80. Indikator 81. Indikator 82. Indikator 83. Indikator 84. Indikator 85. Indikator 86. Indikator 87. Indikator 88. Indikator 89. Indikator 90. Indikator 91. Indikator 92. Indikator 93. Indikator 94. Indikator 95. Indikator 96. Indikator 97. Indikator 98. Indikator 99. Indikator 100. Indikator

Untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, diperlukan program-program pendukung yang akan dilaksanakan. Program-program pendukung tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program ini. Program-program pendukung tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program ini. Program-program pendukung tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program ini. Program-program pendukung tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program ini.

Pada indikator Angka Meleak Pendidikan tersebut dapat digambarkan disebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran antara beberapa program: Pengelolaan Pendidikan seperti kegiatan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang belum tercapai optimal karena kurangnya perhatian masyarakat dalam mengikuti Pendidikan tersebut sebagai salah satu jalan. Hal ini disebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang didalamnya atau ditampilannya.

Adapun alternatif yang dilakukan yaitu:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat melalui masyarakat setempat dengan cara berkeliling ke desa-desa untuk Pendidikan.
- 2) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang ada di lingkungan untuk meningkatkan minat.

3.2.5 Sasaran Lima, Meningkatkan Tingkat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini telah disajikan berikut:

Tabel 3.21

Gesaran Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015

Sasaran Meningkatnya Tingkat Kesehatan Masyarakat				
Indikator	2010	2011	2012	2013
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0

a. Analisis Indikator

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan yang penting. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, angka harapan hidup masyarakat telah meningkat dari 74,5 tahun pada tahun 2010 menjadi 76,0 tahun pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan di atas. Pada tahun 2010, angka harapan hidup masyarakat adalah 74,5 tahun. Pada tahun 2011, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 75,0 tahun. Pada tahun 2012, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 75,5 tahun. Pada tahun 2013, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,0 tahun.

Tabel 3.22

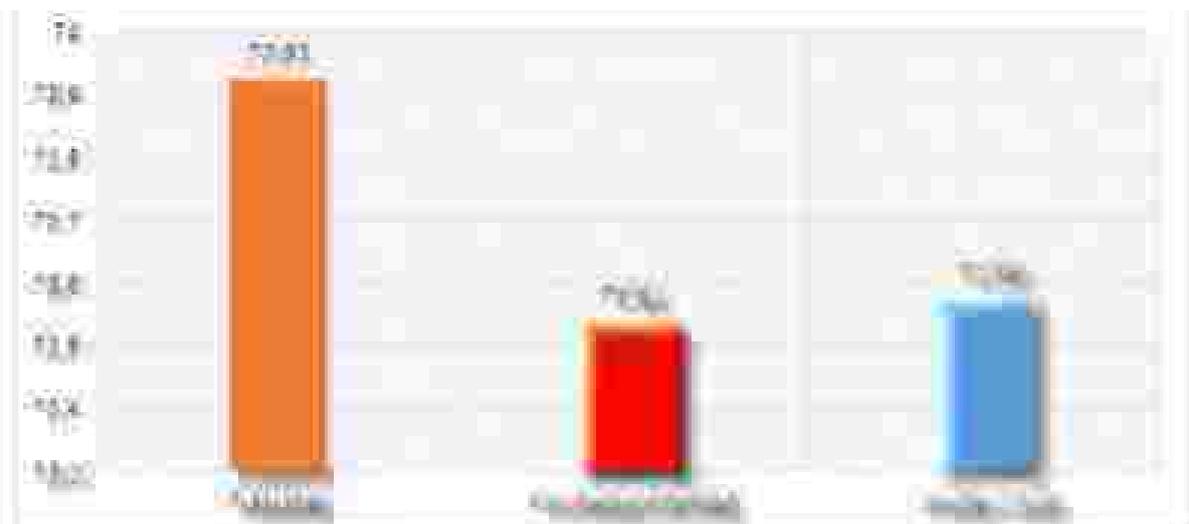
Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sasaran 5 Tahun 2015

Indikator	2010	2011	2012	2013
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0
Angka Harapan Hidup	74,5	75,0	75,5	76,0

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan di atas. Pada tahun 2010, angka harapan hidup masyarakat adalah 74,5 tahun. Pada tahun 2011, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 75,0 tahun. Pada tahun 2012, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 75,5 tahun. Pada tahun 2013, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,0 tahun.

Kurun waktu 2016-2023 terjadi peningkatan sebesar 1,3 persen. Saat ini, tingkat perubahan penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) bagi abadi bermasyarakat Mahasiswa (IPM) Data AHH dari BPS 2016-2023 dibandingkan saat yang sama Sensus Penduduk 2020. Data 2016 dan seterusnya menggunakan data Forum Sensus Penduduk 2010.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sulu (2016-2023) tahun 2023 akan saja dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta nilai standar 2 tahun AHH Nasional.



ANALISIS ALPHABETIC

DAFTAR Data Pengolahan Data Kabupaten Sulu Berdasarkan Indeks Kemiskinan Regional (IKR) Tahun 2023

Dasar hukum analisis ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Desa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terdapat dalam laporan ini.

Tahun

Menyebutkan secara umum tentang data yang akan disajikan dalam laporan ini.

Kategori	Tahun	Jumlah Desa	Kategori Desa		
			Desa Tertinggal	Desa Madya	Desa Berkembang
Desa Tertinggal	1	12	12	0	0

Aktivitas faktor pendorong pelaksanaan pencapaian targetnya adalah 2023 antara lain:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peduli kesehatan lingkungan dengan gencarnya kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GESM).
- 2) Semakin baikya pemetaan layanan 2023 melalui kegiatan pengabdian dengan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan masyarakat pengguna layanan Fasilitas Kesehatan di Bangkaya.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan RSUD Bangkaya yang meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Analisis Program/Kelembagaan

Profil organisasi pelayanan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Profil Organisasi Kesehatan Bangkaya

SUDUT BANGKAYA			
KEMENTERIAN KESEHATAN RI			
Unit Kerja	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi
Kantor Kepala Bangkaya	Kantor Kepala Bangkaya	Kantor Kepala Bangkaya	Kantor Kepala Bangkaya

Sumber: Profil Organisasi Kesehatan Bangkaya, 2023. Diakses melalui link <https://www.kemkes.go.id/> yang diakses pada tanggal 10/05/2023.

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Akses Kesehatan Masyarakat (UKM) dan upaya Kesehatan Rawanca UKM
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan
- Pengembangan dan Mutu Sistem Kerja Kesehatan Rawanca UKM Masyarakat (UKM)

3.2.5 Sasaran Utama: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja sasaran ke-5 tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				
Indikator	2021	2022	2023	Target
Pengeluaran per kapita bulanan	14.100	14.200	14.200	14.200

d. Analisis Indikator

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program ini yang dapat diukur adalah meningkatnya pendapatan bulanan per kapita bulanan. Indikator ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita bulanan penduduk sebagai salah satu indikator daya beli masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

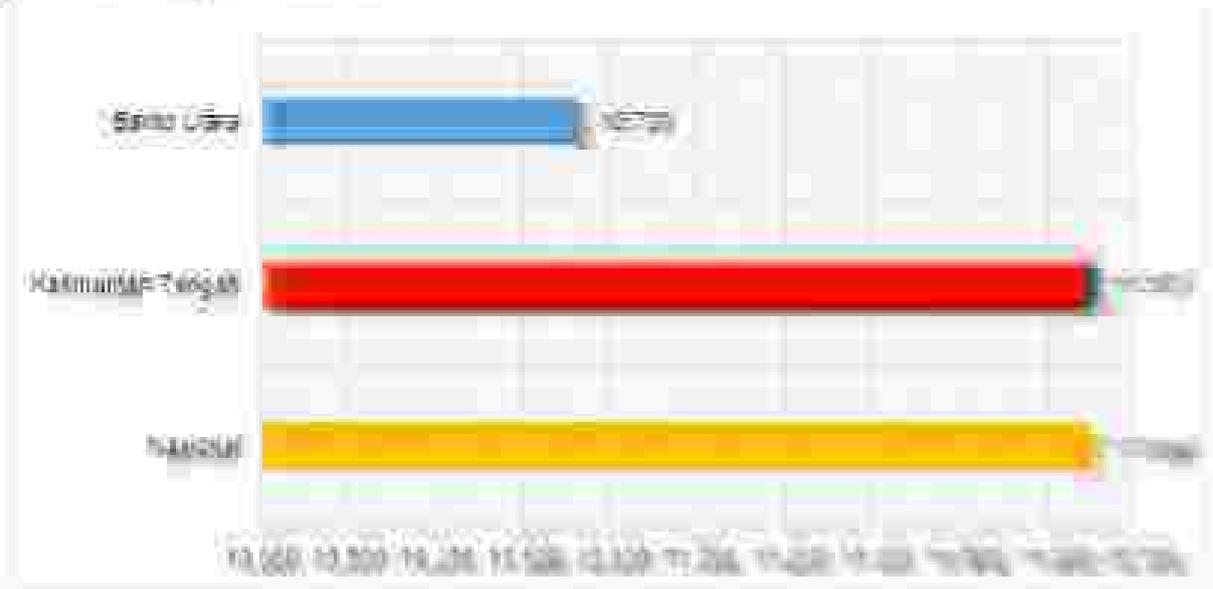
Terdapat 2023 menunjukkan peningkatan pengeluaran per kapita bulanan sebesar Rp 100.000,00 dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita bulanan penduduk telah meningkat sebesar Rp 100.000,00 dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita bulanan penduduk telah meningkat sebesar Rp 100.000,00 dari tahun 2022.

Peningkatan pengeluaran per kapita bulanan penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan harga barang, dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita bulanan penduduk telah meningkat sebesar Rp 100.000,00 dari tahun 2022.

Tabel 3.7
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran per kapita bulanan)

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran per kapita bulanan)	2021	2022					2023
		Q1	Q2	Q3	Q4	Rata-rata	
14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.200

Jika dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, maka terlihat Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sarbagi lebih rendah 31% dibandingkan provinsi maupun nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Sarbagi, 2021

Gambar 5: Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sarbagi dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020

Perbandingan tingkat pengalokasian dana desa yang tercatat pada tahun 2020, pada Kabupaten Sarbagi dan Provinsi Kalimantan Tengah tercatat pada tahun 2020 yakni masing-masing sebesar 19,32% dan 19,27% yang menunjukkan bahwa tingkat pengalokasian

Tabel 10

Perbandingan Jumlah Dana Desa yang Dianggarkan Kabupaten Sarbagi dan Provinsi Kalimantan Tengah

Kategori	Jumlah	Pengalokasian APBD	Pengalokasian APBD (%)		
			Desa	Provinsi	Nasional
Kabupaten Sarbagi	2000 Desa	100%	19,32%	19,27%	19,27%

Beberapa faktor pendorong kesetaraan pendapatan sejak tahun 2000 antara lain:

- 1) Semakin meningkatnya kegiatan usaha masyarakat seiring pemulihan pasca pandemi
- 2) Meningkatnya pembinaan terhadap salah satu sektor unggulan yang produktif
- 3) Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Berau yang meningkat dari sebelumnya
- 4) Pemerataan masyarakat yang bisa berkontribusi sebagai sumber pendapatan. Hal ini merupakan langkah selanjutnya yang dapat membantu meningkatkan hasil pembangunan masyarakat.

b. Analisis Program Kebijakan

Program ini akan meningkatkan hasil pembangunan, yakni untuk pemerataan ke-8 dalam wilayah Berau.

Tipe dan
Peta Program Kebijakan Sektor C

SECTOR STRATEGIS KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN			
INDUKSI POLISI STRATEGIS	STRUKTUR KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN	STRATEGI KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN	STRATEGI KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN
KEBERKELANGKAPAN MAYORITAS MAYORITAS	INDUKSI MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS	STRATEGI MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS	STRATEGI MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS MAYORITAS

Untuk mendukung hasil yang akan dicapai, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia
2. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

- Pencegahan dan Penyelesaian Persebaran Penyakit Menular, Penyakit Kulit, dan Penyakit Persebaran di Daerah

Selain kegiatan di atas, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Pengemulian Pelaksanaan Perawatan Kulit yang cepat dan tepat sebagai upaya untuk meminimalkan penyebaran penyakit kulit di Daerah.

3.27 Sasaran Tujuh: Meningkatnya Seder Partisipan

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini telah disajikan berikut:

Tabel 3.27

Capaian Kinerja Sasaran 7 – Tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Seder Partisipan				
Indikator	Sasaran	Target	Pencapaian	Realisasi
PERB: seder partisian	100% 100%	625.150,0	600.750,0	96%

a. Analisa Indikator

Meningkatnya partisipasi seder dilakukan oleh melalui Badan Regional Economic Seder (BERS) seder kabupaten/kota yang memiliki kapasitas untuk nilai nilai kinerja yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi.

Untuk mencapai sasaran ini, BERS perlu melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi.

Untuk mencapai sasaran ini, BERS perlu melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi.

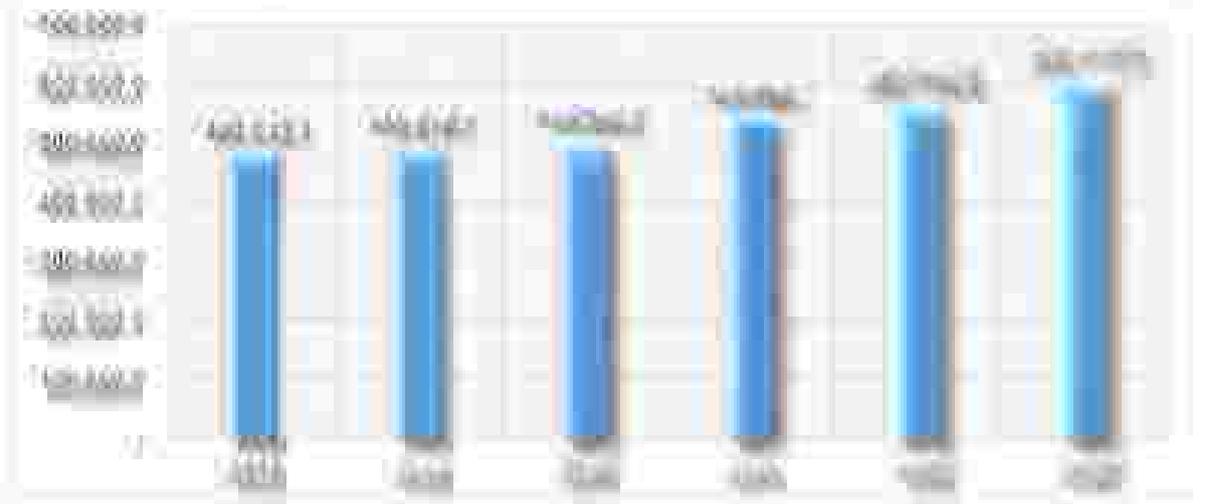
Tabel 4)

Perbandingan pagawian kersa indikator PERS sektor esakan tahun 2019-2023

PDRB sektor esakan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Orang	443.922	443.922	443.922	443.922	443.922	443.922
Realisasi	Orang	443.922	443.922	443.922	443.922	443.922	443.922
Deviasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: Target 2019-2023 mengacu pada nilai 443.922 orang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2024.

Jika dibandingkan dengan pagawian kersa sektor esakan tahun 2019-2023, maka dapat dilihat bahwa pagawian kersa sektor esakan tahun 2019-2023 menunjukkan realisasi yang sama dengan target yang ditetapkan, yaitu 443.922 orang.



Gambar 4) Perbandingan pagawian kersa indikator PERS sektor esakan tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan pagawian kersa sektor esakan tahun 2019-2023, maka dapat dilihat bahwa pagawian kersa sektor esakan tahun 2019-2023 menunjukkan realisasi yang sama dengan target yang ditetapkan, yaitu 443.922 orang.

Tabel 41

Perbandingan capaian kinerja indikator POCB Sektor Perikanan (Perikanan Tangkap) 2018-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (RPJMD 2018)	Kondisi Akhir (RPJMD 2020)		Tingkat Pencapaian
			Tahun	Target	
POCB Sektor Perikanan	%	480.000	500.000	500.000	100%

Untuk meningkatkan POCB Sektor Perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus meningkatkan upaya peningkatan produksi perikanan tangkap, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.

Indikator kinerja dengan tahun 2020 adalah 500.000 ton, dengan pencapaian sebesar 500.000 ton pada tahun 2020.

Tabel 42

Perbandingan capaian kinerja indikator POCB Sektor Perikanan (Perikanan Budidaya)

No	Program	Kategori	2018		2020		Tingkat Pencapaian
			Awal	Akhir	Awal	Akhir	
1	Yusufi Perikanan Budidaya	Tanah	150.000	150.000	150.000	150.000	100%

Terdapat peningkatan nilai produksi ikan budidaya yang signifikan, yaitu dari 150.000 ton pada tahun 2018 menjadi 150.000 ton pada tahun 2020.

- 1) Meningkatkan sarana prasarana budidaya perikanan tangkap.
- 2) Meningkatkan sarana prasarana budidaya perikanan budidaya.

- 1) Meningkatkan sarana prasarana budidaya perikanan budidaya.
- 2) Meningkatkan sarana prasarana budidaya perikanan budidaya.

3. Penguatan kelembagaan Petai menuju organisasi dan lembaga yang menggunakan variasi undang-undang, peraturan, serta aspek lainnya, optimalisasi lahan, dan pengendalian tata-pertanian

4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan sosial, serta aksi sosial lainnya.

b. Analisis Program Pendukung Sektoral

Program-program pendukung dalam kerangka kebijakan media massa ke-7 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tipe-tipe Program Pendukung Sektoral

Sesuai Strategi Meningkatkan Sektor Perikanan			
Indikator Kinerja Utama	Program/Kelembagaan yang terkait	Program/kegiatan pendukung	Saluran Media
WONK untuk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan
		<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perikanan
- 2) Meningkatkan produktivitas perikanan
- 3) Meningkatkan pendapatan sumber daya manusia perikanan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perikanan

- **Pelaksanaan Penyeluhan Pertanian**

Selain dari Dinas Pertanian, akan dilaksanakan melalui berbagai jenis PUPR Kabupaten Sambi Utra Sainsngi dengan memperhatikan aspek Pertambangan dan Pengaliran Sistem Irigasi Puncung Sekunder, yaitu jenis Irigasi yang Luasnya dibawah 100 Ha dalam 1 Saku Sambi akan dikelola sistem irigasi bekerja dengan optimal

Tujuan penelitian produksi untuk meningkatkan PUPR akan berjalan, bentuk layanan secara optimal dan berkesinambungan, konsep pelaksanaan Program dan Pengembangan Sistem Pertanian yang optimal, pengaliran dan beririgasi, Mula? Berapa jumlah 1000 Ha akan menjadi bentuk yang ditunjukkan dan akan dilaksanakan secara optimal yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang menggunakan metode PUPR di Sambi Sambi Sambi yang akan dilakukan dengan cara optimal

Salah satu aspek dalam melaksanakan PUPR di Sambi Sambi Sambi dan dari program akan sangat memperhatikan pengaliran yang akan sangat baik dan optimal yang akan dilakukan dengan cara optimal dan optimal

3.2.3 Sasaran Outapan, Meningkatkan Sektor Perikanan

Hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: **Tabel 3.2.3**

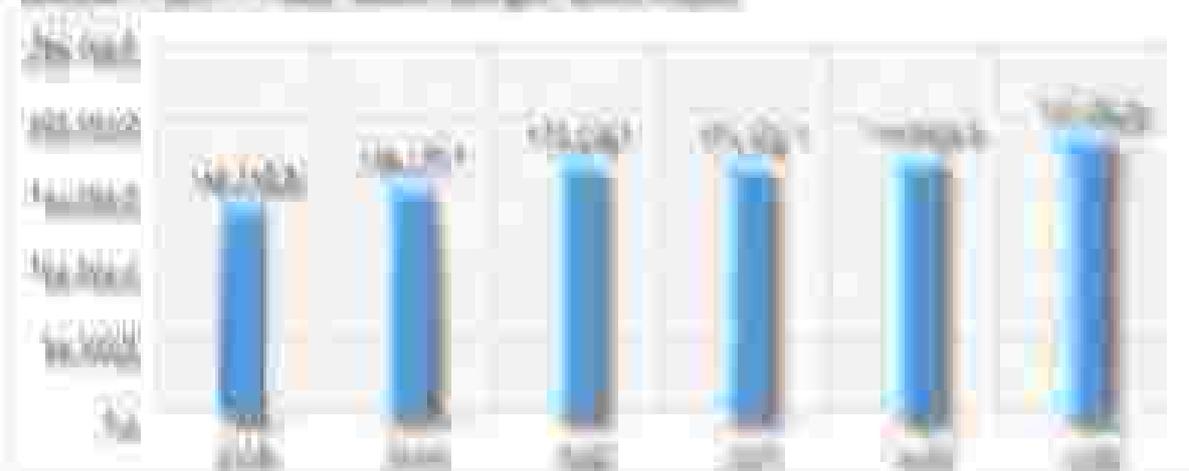
Capaian Kinerja Sasaran 3a Tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Sektor Perikanan				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
PCR (sektor perikanan)	juta rupiah	150.000.000	150.000.000	100%

a. Analisis Indikator

Indikator Regional Sasaran 3a (PCR) telah terpenuhi sesuai dengan nilai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan APBD Kabupaten Lahat untuk tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sektor perikanan. Data Realisasi PCR Sektor Perikanan menunjukkan bahwa pada Bulan Maret 2023 telah terealisasi sebesar 100%.

Indikator Regional Sasaran 3a (PCR) Sektor Perikanan Kabupaten Lahat pada Bulan 2023 menunjukkan bahwa 100% dari anggaran yang ditetapkan telah terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sektor perikanan.



APD Kabupaten Lahat 2023

Mahzani, "Mendukung Realisasi APBD Kabupaten Lahat Melalui Sektor Perikanan", *Salvo*, vol. 7, no. 1, 2023, pp. 1-10.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, PDRB sektor perikanan Kabupaten Berau secara cenderung mengalami peningkatan. Data PDRB menunjukkan dalam periode 2019-2025 terjadi peningkatan sebesar 48.21% per rupiah.

Realisasi PDRB Sektor Perikanan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Target pengembangannya sebesar 4.000,00 per rupiah. Pencapaian target tahun 2023 juga mengahami peningkatan sebesar 4.000,00.

Tabel 48

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan tahun 2019-2025

KORAS Tahun Capaian	Bentuk	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	200 Rp/rupiah	44.000,00	49.000,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00	69.000,00
Realisasi	100 Rp/rupiah	44.000,00	49.000,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00	69.000,00
Capaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi target indikator PDRB sektor perikanan tahun 2019-2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan telah terpenuhi.

Realisasi target indikator PDRB sektor perikanan tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan telah terpenuhi. Target capaian tahun 2023 adalah 4.000,00 per rupiah. Realisasi capaian tahun 2023 juga mengahami peningkatan sebesar 4.000,00 per rupiah.

Tabel 49

Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan untuk tahun 2022-2023

KORAS Tahun Capaian	Bentuk	Kinerja Realisasi	Tahun		
			2022	2023	Target
Target	200 Rp/rupiah	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Realisasi	100 Rp/rupiah	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capaian	%	100%	100%	100%	100%

Realisasi target indikator PDRB sektor perikanan tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator PDRB sektor perikanan telah terpenuhi. Target capaian tahun 2023 adalah 4.000,00 per rupiah. Realisasi capaian tahun 2023 juga mengahami peningkatan sebesar 4.000,00 per rupiah.

Perikanan Kabupaten Banta Utara mengalami peningkatan sebesar 324,93% dibandingkan produksi tahun 2022.

2023/24

Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023/24

No	Produk/Perikanan	Jumlah produksi (ton/ha)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Perikanan Budidaya	9.256,30	3.031,4	7.750,00	2.000,00	10.000,00
2	Perikanan Tangkap	2.094,70	1.093,00	404,00	4.000,00	1.000,00
	Jumlah	11.351,00	4.124,40	8.154,00	6.000,00	11.000,00

2023/24

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banta Utara relatif stagnan yaitu berkisar antara 1000 ton hingga 2000 ton per tahun. Hal ini disebabkan karena perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Banta Utara masih menggunakan alat tangkap tradisional yang menggunakan tenaga manusia. Hal ini menyebabkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banta Utara masih stagnan dan belum ada peningkatan produksi.

Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banta Utara, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan jumlah kapal perikanan yang ada di Kabupaten Banta Utara.
- 2) Meningkatkan jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Banta Utara.
- 3) Meningkatkan jumlah alat tangkap perikanan yang ada di Kabupaten Banta Utara.
- 4) Meningkatkan jumlah modal yang ada di Kabupaten Banta Utara.
- 5) Meningkatkan jumlah tenaga kerja perikanan yang ada di Kabupaten Banta Utara.

2023/24

2023/24

3.2.9) Sasaran Sembilan, Meningkatkan Sektor Perkebunan

Hasil pengukuran/ target untuk sasaran ini adalah sebagai berikut

Tabel 10
Sasaran Sembilan tahun 2014-2015

Sasaran Meningkatnya Sektor Perkebunan				
Indikator	Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat %
PORE sektor perkebunan	100	394.982	352.982	100%

a. Analisis Indikator

Profil Regional Daerah Kota Pore 2014-2015 menunjukkan kondisi Basis Daya Tahun 2013 di atas rata-rata 394.982 ha. Hal ini menunjukkan data ini di atas rata-rata di atas rata-rata di atas rata-rata di atas rata-rata. Perkebunan Kota Pore 2013 adalah 394.982 ha yang menunjukkan bahwa sektor ini sebesar 100% dan akan terus berkembang.

Hal ini menunjukkan target sektor ini adalah 100% yang menunjukkan bahwa sektor ini akan terus berkembang dan akan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini akan terus berkembang dan akan terus berkembang.

Tabel 11
Perbandingan Jumlah Hektar dan Jumlah POK di Kota Pore

Tahun	Pore	Ulu	Sela	Ulu	Sela
2013	394.982	394.982	394.982	394.982	394.982

Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini akan terus berkembang dan akan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini akan terus berkembang dan akan terus berkembang.

Tabel 34
Perbandingan capaian target kinerja 2023 sektor kesehatan
tahun 2023-2023

PORE sektor kesehatan	Satuan	2023					2023
		2023	2023	2023	2023	2023	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

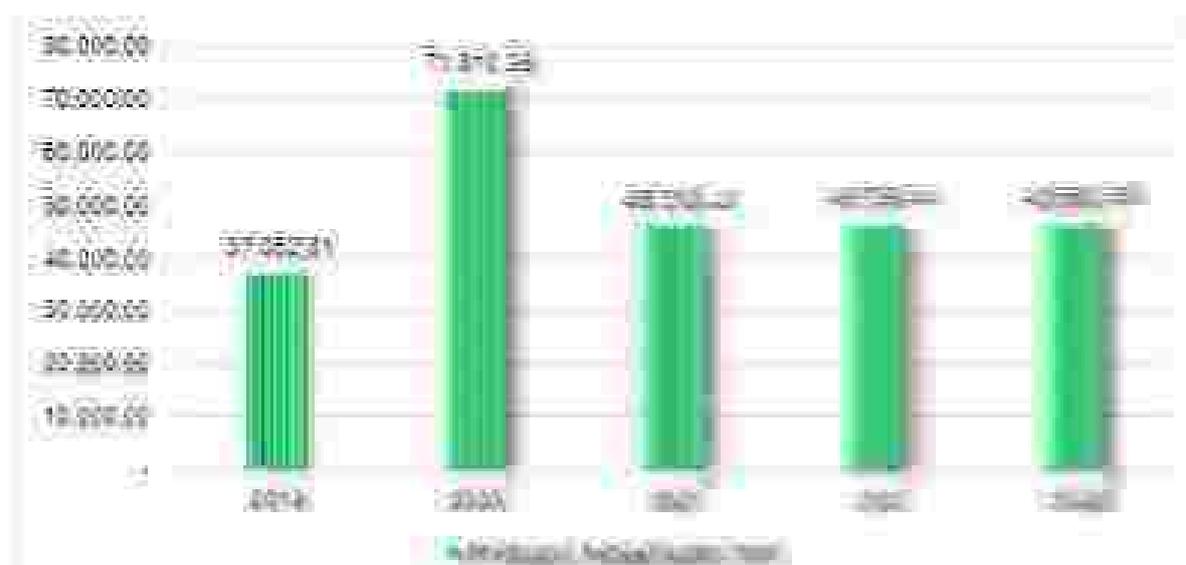
Keterangan: Target 2023-2023: 100% (100%); Realisasi 2023-2023: 100% (100%); Capaian 2023-2023: 100% (100%)

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2023, pencapaian target pada tahun 2023 sebesar 100% menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 35
Perbandingan Capaian Kinerja Sektor Kesehatan
2023-2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	2023	2023	2023		
			2023	2023	2023
Indikator Kinerja Utama	%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan hasil kinerja kesehatan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.



Sumber: Data Pegawai PT Garuda Indonesia

SARAN: Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi SDM perusahaan adalah:

- 1) **Reaktor** (kontribusi) yang tinggi di luar negeri, terutama pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat mempengaruhi strategi SDM perusahaan, terutama dalam hal rekrutmen dan pelatihan.
- 2) **Adaptasi** perusahaan terhadap teknologi baru, perubahan regulasi, dan pasar internasional.
- 3) **Sustainability** (keberlanjutan) sebagai fokus utama, dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.

b. Analisis Program Pendidikan Sasaran

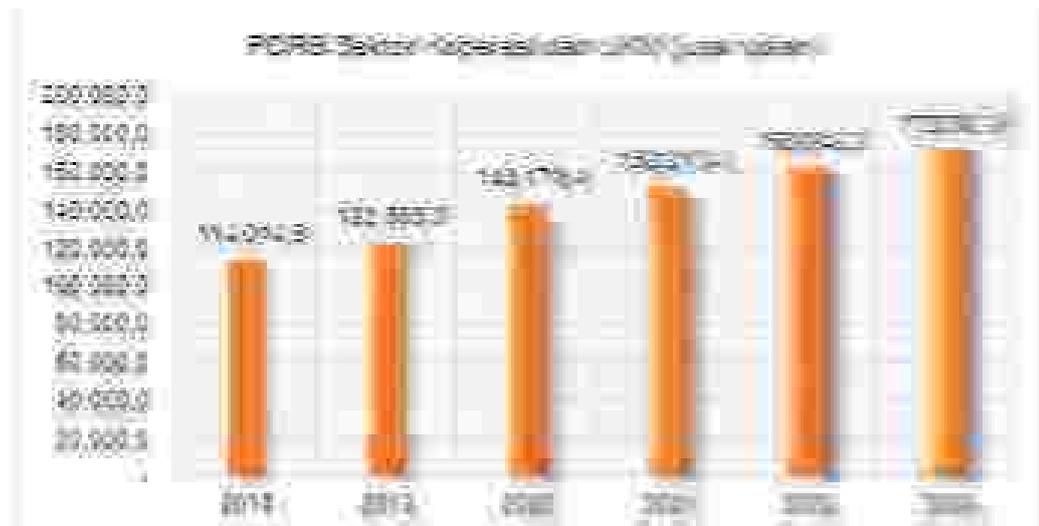
Program-program pendidikan dalam kelompok tersebut digambarkan ke-9 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Plan Program Pendidikan Sasaran

Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor Pertanian			
Indikator Kinerja Utama	Program Pendidikan (Dapat diukur/terukur)	Program/kegiatan/kegiatan	Unit Pelaksana Kegiatan
INDUK LAKSI PERUSAHAAN	Program pendidikan melalui berbagai cara dan media untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan kegiatan	Program Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Dasar, SMP, SMA, dan SMK	SD, SMP, SMA, SMK

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian, maka kegiatan ini dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran petani dan pengusaha pertanian dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media
 - b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media
 - d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian melalui berbagai cara dan media



Sumber: BMD Kabupaten Karangasem

Gambar 10. Perkembangan Permohonan Anggaran 2020 Sektor Organisasi dan SDM Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2020

Realisasi APBD Tahun Anggaran dan CAP-anggaran 2021 merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, karena APBD adalah sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 10
MELAKUKAKAN CECHEK YANG MELIBAT PERHAKAAN DAN KEMERDEKAAN
Tahun 2021

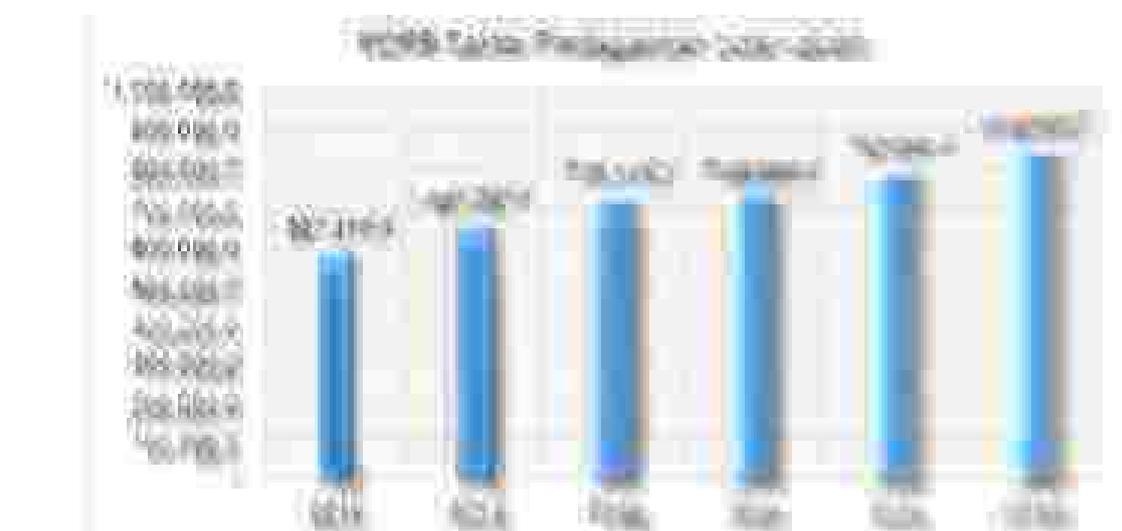
Jenis Kegiatan	Subkegiatan	2021					Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
Monev	Monev	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Monev	Monev	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Monev	Monev	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000

Sumber: BMD Kabupaten Karangasem

Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat keberhasilan yang dicapai. Hal ini dapat diukur dengan melihat jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu, perlu juga diperhatikan kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

mempunyai hasil perubahan sama Rp.142 dan akan tetap saja agar selanjutnya karena berdasarkan hasil evaluasi bahwa kondisi sebelum sudah sudah selesai sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan data dari Daftar Posok Statistik Kabupaten Banta Utara untuk rencana APBD Sisa Pelaksanaan tahun 2021 sebesar Rp53.152,3 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 100,00% dan dalam kategori Baik Sekali.

Jika dibandingkan dengan rencana total pelaksanaan APBD untuk pelaksanaan Kabupaten Banta Utara cenderung meningkat dibandingkan 2020 BPS menunjukkan dalam rangka 2019-2020 sudah anggaran sebesar 240.938,7 juta rupiah.



DAFTAR LAMPIRAN KE-10

REKAPITULASI RENCANA DAN PELAKSANAAN APBD TAHUN PELAKSANAAN 2021
KABUPATEN BANTA UTARA TAHUN 2021

REKAPITULASI RENCANA DAN PELAKSANAAN APBD TAHUN PELAKSANAAN 2021
KABUPATEN BANTA UTARA TAHUN 2021
REKAPITULASI RENCANA DAN PELAKSANAAN APBD TAHUN PELAKSANAAN 2021
KABUPATEN BANTA UTARA TAHUN 2021

Tabel 30
Perbandingan capaian kinerja dengan RPMD sektor pelayanan
tahun 2012-2013

RPMD sektor pelayanan	Sasaran	Tahun					Tercapai (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
Tarjef	Jumlah Penerima	500.700.0	500.700.0	500.700.0	500.700.0	500.700.0	100
Realisasi	Jumlah Penerima	500.700.0	500.700.0	500.700.0	500.700.0	500.700.0	100
Capaian	%	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Target 2012-2013 dan 2014-2016 sesuai dengan RPMD Kabupaten Karangasemi tahun 2012-2016 dan RPMD Kabupaten Karangasemi tahun 2017-2022.
 Catatan: RPMD tahun 2012-2013 dan 2014-2016.
 Sumber data: Laporan RPMD Kabupaten Karangasemi tahun 2012-2016 dan 2017-2022.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pelayanan sektor kesehatan tahun 2013 sebesar 114,12%, maka capaian kinerja yang terdapat dalam laporan kinerja RPMD di tahun 2013 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang terdapat dalam laporan kinerja tahun 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 31
Indikator Kinerja Utama Sektor Kesehatan dan Sektor Pelayanan Sosial
tahun 2012-2013

INDUKTOR KINERJA UTAMA	Sasaran	Target tahun 2012-2013	Pencapaian Kinerja	
			Tahun 2012	Tahun 2013
INDUKTOR KINERJA UTAMA	%	100	100	100

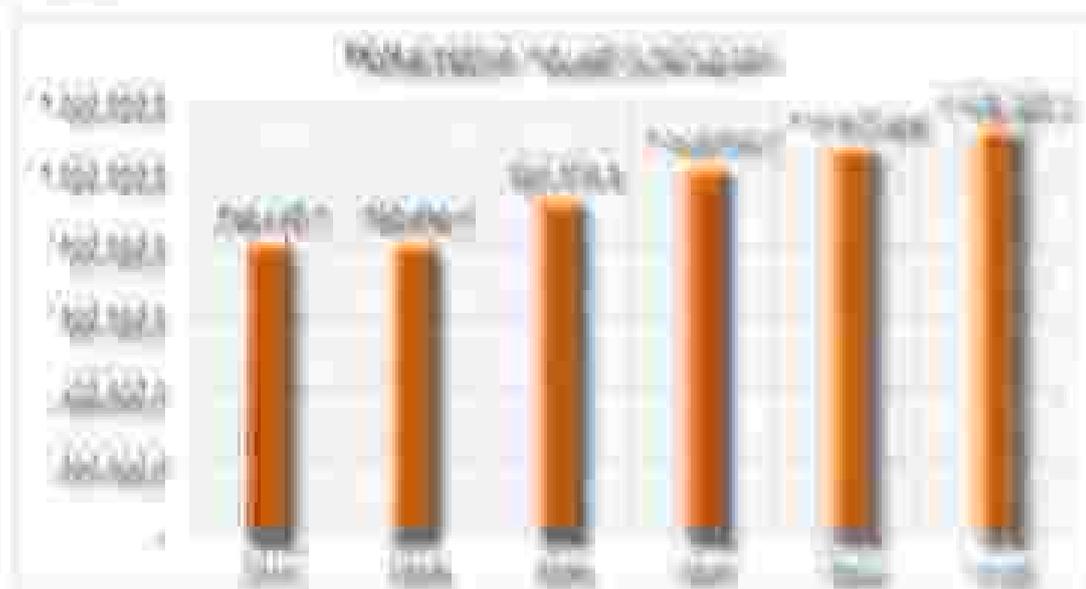
- 1) Jumlah Penerima Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial
- 2) Jumlah Penerima Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial
- 3) Jumlah Penerima Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial
- 4) Jumlah Penerima Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial

c. Analisis Indikator 3. PDRB Sektor Industri

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri adalah merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor Industri pada suatu daerah. Sumber data ini berasal dari Laporan Tahunan 2023 Kabupaten Bantaeng Utara yang memperlihatkan kondisi regional.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri Kabupaten Bantaeng Utara Tahun 2023 ditunjukkan sebesar Rp1.122.607,4 juta rupiah. Tingkat kontribusi merupakan hasil perubahan pada 2023 dan 2022 yang dapat dilihat berdasarkan grafik berdasarkan hasil grafik berikut yang menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bantaeng Utara berdasarkan Laporan Tahunan 2023 Kabupaten Bantaeng Utara sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Utara, PDRB sektor Industri Kabupaten Bantaeng Utara cenderung mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan bahwa kontribusi PDRB sektor industri semakin meningkat di Kabupaten Bantaeng Utara.



Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Sektor Industri

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Kabupaten Bantaeng Utara, 2023. Diolah oleh penulis.

Realisasi PDRB Sektor Industri untuk tahun 2023 meningkat 30,34% dibandingkan sebelumnya sebesar 50.381,36 (dalam miliar). PDRB dasar daerah untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,35%

Tabel 21
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB dengan tahun sebelumnya

PDRB Sektor Industri	Sawit	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100 (Rend)	574.503,5	580.782,7	591.746,5	654.746,5	655.520	655.520
Realisasi	100 (Rend)	784.024,4	827.820,1	888.582	1.126.642,1	1.190.148	1.190.148
Capaian	100	136,48	142,68	149,98	172,08	181,68	181,68

2019: 574.503,5
 2020: 580.782,7
 2021: 591.746,5
 2022: 654.746,5
 2023: 655.520
 2024: 655.520

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023 sebesar 115,74% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 115,74%.

Tabel 22
Perbandingan capaian kinerja indikator PDRB dengan tahun sebelumnya

Wilayah Perbatasan	Sawit	Capaian	Tahun		
			2022	2023	2024
Wilayah Perbatasan	100	100	100	100	100

- 1. Meningkatkan nilai produksi komoditas pertanian yang bernilai tinggi.
- 2. Meningkatkan nilai produksi komoditas perikanan yang bernilai tinggi.
- 3. Meningkatkan nilai produksi komoditas pertambangan yang bernilai tinggi.
- 4. Meningkatkan nilai produksi komoditas industri yang bernilai tinggi.

Sedangkan untuk PDRB sektor perdagangan dan industri, Jasa Perdagangan dan Industri merupakan pelaksanaan kebijakan terkait Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Distribusi Perdagangan, Regulasi Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Esensial, Pengawasan Pelaksanaan Menyangkut Legal dan Legalitas Perizinan Perdagangan dan Sistem Rencana Pembangunan Industri.

3.2.11 Sasaran Sebesar, Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini di dalam siklus terdahulu

Sebesar

Capaian Kinerja sebesar 61,11 atau 35%

Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja					
No.	Indikator	Sasaran	Target	Pencapaian	Realisasi
1.	Angka pengangguran terbuka	7%	9,4%	7,4%	7,8%
2.	Pendapatan perkapita daerah	1000000	1000000	1000000	1000000
Rata-rata					75%

a) Analisis Indikator 1: Angka Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka (APT) adalah jumlah yang dapat diandalkan untuk mengukur tingkat pengangguran tenaga kerja yang siap bekerja. Indikator ini dapat diukur dengan cara membagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran terbuka, semakin tinggi tingkat pengangguran tenaga kerja yang dapat diandalkan. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi tingkat pengangguran tenaga kerja yang dapat diandalkan. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi tingkat pengangguran tenaga kerja yang dapat diandalkan.

Analisis indikator angka pengangguran terbuka dapat diuraikan sebagai berikut. Indikator angka pengangguran terbuka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi tingkat pengangguran tenaga kerja yang dapat diandalkan. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi tingkat pengangguran tenaga kerja yang dapat diandalkan.

Untuk meningkatkan angka pengangguran terbuka yang rendah, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

angka target APT merupakan angka yang ditetapkan pada tingkat dan RPJMD.

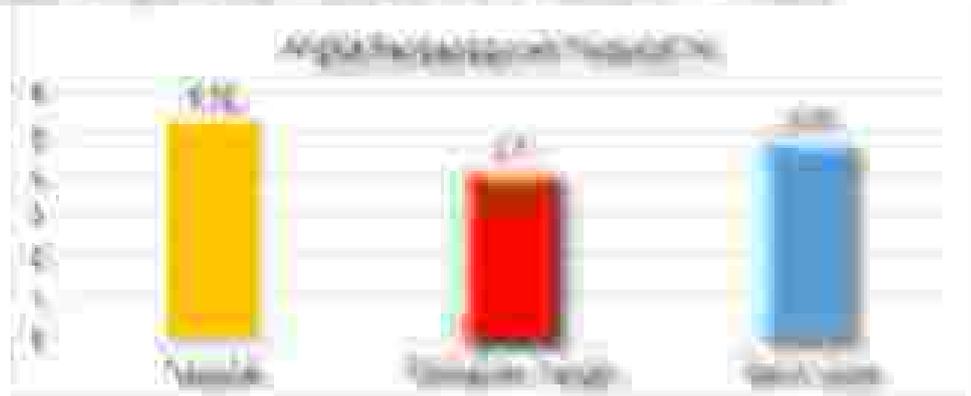
788888

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2015

Angka Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	%	4,90	4,30	3,80	4,00	4,00	4,00	4,00
Realisasi	%	4,34	3,80	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50
Capaian	%	125,30	88,37	84,21	87,50	87,50	87,50	87,50

Keterangan: Data 2014-2015 merupakan data RPJMD, dan data 2016-2020 merupakan data realisasi.

Jika dibandingkan dengan APT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,00% maka APT Kabupaten Bukit Vista yang sebesar 3,50% lebih baik. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bukit Vista telah berhasil mengurangi APT sesuai target.

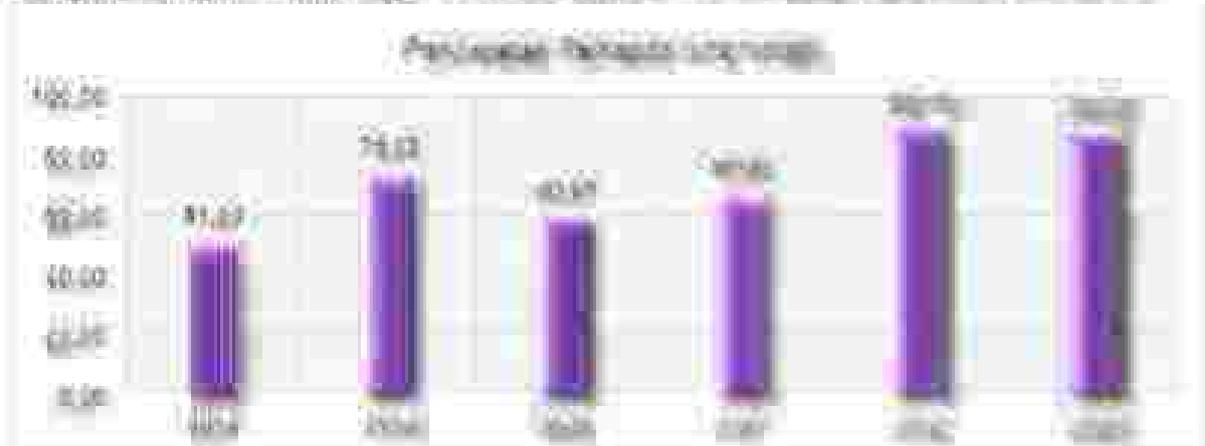


Gambar 11. Grafik Perbandingan APT Kabupaten Bukit Vista dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tengah Tahun 2015-2020

Jika dibandingkan dengan pengangguran nasional yang sebesar 5,00% maka angka pengangguran di Kabupaten Bukit Vista yang sebesar 3,50% lebih baik. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bukit Vista telah berhasil mengurangi pengangguran nasional yang sebesar 5,00% menjadi sebesar 3,50% yang merupakan angka yang sangat baik.

Barito Utara untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar 32,33 juta rupiah sehingga capaian kinerja sebesar 162,37% dan lebih sebesar 3,61% dari

Jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara mencapai target dengan pencapaian 100% (100%) menunjukkan dalam periode 2018-2021 telah tercapainya sebesar 36,36 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2020 saat pelaksanaan Anggaran dengan tahun 2019 sebesar 14,32 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana 19 yang melampaui batas karakteristik. Tahun 2019-2020 mode 2020. Perkapita Atas Dasar Harga Satuan Konstan dengan pencapaian yang dengan selisihnya melebihi modal karakteristik yang sebesar 20,27%.



Sumber: APBD Kabupaten Barito Utara 2021

DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023
 DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023
 DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023

DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023
 DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023

DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023
 DAFTAR LAMPIRAN 10.10.2023

Kategori	Sub-kategori	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	Padapatan Asli Daerah	36.36	14.32	40.69	32.33	69.75	69.75
	Padapatan Asli Daerah	36.36	14.32	40.69	32.33	69.75	69.75
	Padapatan Asli Daerah	36.36	14.32	40.69	32.33	69.75	69.75

Jika dibandingkan dengan pencapaian RPJMD, pencapaian sangat baik tahun 2023 sebesar 183,97%, jauh melebihi target yang ditetapkan. Target untuk akhir RPJMD di tahun 2026 untuk pencapaian selanjutnya 50,00% yang sama dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 50,35% yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.23

Perbandingan capaian kinerja indikator Pelaksanaan Program Kesehatan Oral
RPJMD 2019-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2019	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Tingkat %
Pelaksanaan Program	Oral Kesehatan	50,00	50,35	100,70	183,97

“Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka persentase tercapainya tahun 2023 adalah:

- 1) $\frac{100,70}{50,00} \times 100 = 201,40\%$ (jika menggunakan rumus tersebut)
- 2) $\frac{100,70}{50,00} \times 100 = 201,40\%$ (jika menggunakan rumus tersebut)
- 3) $\frac{100,70}{50,00} \times 100 = 201,40\%$ (jika menggunakan rumus tersebut)
- 4) $\frac{100,70}{50,00} \times 100 = 201,40\%$ (jika menggunakan rumus tersebut)

4. Analisis Program dan Indikator Kinerja Utama

“Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka persentase tercapainya tahun 2023 adalah:

Tabel 7a

Portofolio Program Pendidikan Dasar (1)

Gagasan Strategis Meningkatnya Biaya Saing Tenaga Kerja			
Indikator Kinerja Utama	Program Peningkatan Daya Saing (R-10)	Program Specific Results (R-10)	Indikator Kinerja Utama
1. Angka Pengeluaran Tenaga Kerja	Program Renergrasi Keahlian	Program Keahlian Baru dan Penyediaan Tenaga Kerja	1. Jumlah lulusan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	Program-1 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	2. Jumlah lulusan
	Program-2 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	3. Jumlah lulusan
	Program-3 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	4. Jumlah lulusan
	Program-4 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	5. Jumlah lulusan
	Program-5 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	6. Jumlah lulusan
	Program-6 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	7. Jumlah lulusan
	Program-7 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	8. Jumlah lulusan
	Program-8 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	9. Jumlah lulusan
	Program-9 dan Tenaga Kerja Baru	Program Keahlian Baru	10. Jumlah lulusan

Unit ini membahas tentang biaya tenaga kerja yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan perencanaan biaya tenaga kerja yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang. Perencanaan biaya tenaga kerja yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada. Metode-metode yang ada tersebut adalah metode-metode yang akan dibahas dalam bab ini. Metode-metode tersebut adalah metode-metode yang akan dibahas dalam bab ini.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan biaya tenaga kerja adalah metode yang akan dibahas dalam bab ini. Metode ini akan dibahas dalam bab ini.

Metode ini akan dibahas dalam bab ini. Metode ini akan dibahas dalam bab ini. Metode ini akan dibahas dalam bab ini. Metode ini akan dibahas dalam bab ini. Metode ini akan dibahas dalam bab ini.

Berita Utama yang belum sesuai target sehingga perlu ditinjau kembali
penyerapan tenaga kerja di Berita Utama. Dan juga pemerintah sebagai salah
satu lembaga di antara lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Berau
perlu meningkatkan peranannya sebagai fasilitator dan penjamin
LKPIM setiap tahunnya. Keseluruhan perusahaan yang sudah terakreditasi
LKPIM sudah dalam masa kegiatan produksi operasional sebagai perusahaan
yang aktif telah confidence pemerintah sebagai sumber daya yang dapat
dipadukan dan terintegrasi sehingga mendapatkan nilai tambah dan lapangan
investasi. Selain itu juga diharapkan bisa diwujudkan dengan adanya
diaturnya oleh pemerintah.

Alternatif Sosial yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan & nilai
mendukung dari hal program kegiatan.

- a. Meningkatkan kesejahteraan serta program, kegiatan, dan kegiatan yang
sebagai kegiatan sosial di kawasan industri perikanan.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta kegiatan yang akan meningkatkan
masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan
diperhatikan kualitas-kualitas yang akan meningkatkan LKPIM yang
sangat-sangat berkualitas dan diharapkan dengan adanya hal
kegiatan.

Hasil pengukuran/nilai terukur sasaran ini 2020 sebagai berikut

Tahun
Evaluasi Kinerja 2020
2020

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
No.	Indikator	Sasaran	Tujuan	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90%	90%	90%	90%

a. Analisis Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran yang paling akurat yang memberikan gambaran tentang lingkungan secara menyeluruh dan yang meliputi lingkungan perantara, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai alat ukur lingkungan yang komprehensif untuk melihat kondisi lingkungan.

Tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebesar 90%. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kualitas lingkungan yang baik. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai-nilai indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki lingkungan yang baik dan sehat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai-nilai indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki lingkungan yang baik dan sehat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai-nilai indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki lingkungan yang baik dan sehat.

dalam seratus di 3 (tiga) file sampling yang merupakan salah satu indikator di Kabupaten Banta Utaga

Nilai Indeks Kualitas Layanan (IKL) diperoleh dari file perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo dengan cara Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 7

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Uraian	Nilai
Indeks Kualitas Air (IKA)	100%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	100%
Indeks Kualitas Tanah (IKT)	100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $IKL = \frac{IKA + IKU + IKT}{3}$	100%

Berdasarkan data tersebut diperoleh 100% nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL) Kabupaten Banta Utaga tahun 2023 karena 100% yang diperoleh Kabupaten Banta Utaga memiliki indikator kualitas air yang memenuhi standar kualitas

- 1. Pencemaran
- 2. Kebun
- 3. Sampah
- 4. Perairan
- 5. Kualitas Ruang Hutan

Hasil dari nilai IKL tahun 2023 menunjukkan pencapaian tertinggi 100% yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup Kabupaten Banta Utaga

Tabel 8

Perbandingan Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banta Utaga 2022-2023



Jika dibandingkan dengan SPNBS, pencapaian target untuk tahun 2023 sebesar 183,19%, memenuhi target yang ditetapkan. Target untuk tahun 2023 di tahun 2023 untuk KUP sebesar 70,55 dengan capaian sebesar 129,94 sebesar 75,94.

Tabel 7.4
Perbandingan capaian kinerja indikator keberlanjutan lingkungan hidup terhadap target SPNBS 2023-2025

Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Kondisi Awal (2023-2023)	Kondisi Akhir (2023-2023)		
			Tercapai	Belum Tercapai	Capaian (%)
Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Nilai	70,55	Tercapai	Tercapai	129,94

Berikut ini daftar Upaya Keberlanjutan yang dilakukan oleh PTN dan selanjutnya telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu sesuai dengan pendekatan yang ada:

- 1) Pengadaan dan layanan energi listrik menggunakan pembangkit tenaga air dengan sistem tenaga pemusatan pemukiman penduduk di Kecamatan Kuningrejo Kabupaten Karangasem yang akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%.
- 2) Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana jalan, jembatan, tanggul, dan tanggul tanggul dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Kabupaten Karangasem.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Kabupaten Karangasem.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Kabupaten Karangasem.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Kabupaten Karangasem.

6) Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan (rusak)

D. Analisa Program Pendukung Siasat

Program-program pendukung dalam pelaksanaan siasat/ kebijakan tersebut ke-12 adalah sebagai berikut:

Tabel 75
Program-program Pendukung Siasat 12

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator Kinerja Utama	Program Rencanakan Dengan Nama RPJMD	Program/kegiatan/kegiatan dalam	Indikator Kinerja Utama
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian dan Pemertan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Air	
		Program Pengendalian Pencemaran Udara	
		Program Pengendalian Pencemaran Tanah	
		Program Pengendalian Pencemaran Suara	
		Program Pengendalian Pencemaran Panas	
		Program Pengendalian Pencemaran Radioaktif	
		Program Pengendalian Pencemaran Kimia	
		Program Pengendalian Pencemaran Biologi	
		Program Pengendalian Pencemaran Energi	
		Program Pengendalian Pencemaran Listrik	
		Program Pengendalian Pencemaran Magnetik	

- 1. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran
- 2. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran
- 3. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran
- 4. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran

- Pemulihan Reklamasi dan/atau Konservasi Lingkungan Terusak
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pengumpulan Limbah 3D (daerah, industri, rumah)
- Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pemrosesan Limbah B3 dan Limbah Berbahaya dan Beracun (PPLBB) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (PPLBB) di Lingkungan dan Limbah B3 dan Beracun (PPLBB) dan Beracun (PPLBB)
- Mengajukan IJUK: Keseluruhan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Beracun yang terkait dengan PPLBB
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Limbah Berbahaya dan Beracun (PPLBB) dan Beracun (PPLBB)
- Pemeliharaan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLBB) dan Beracun (PPLBB)
- Pelaksanaan Pemantauan Mutu Lingkungan Hidup dan Beracun (PPLBB) dan Beracun (PPLBB)
- Penyelidikan Sengketa

042/01 Sasaran Tiga Baku, Meningkatkan Daya Saing Pemusatan

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini (Ganda) terlampir

Tahun 2022
Evaluasi Kinerja 2022 (Ganda) 2022

Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemusatan				
Indikator	Sasaran	Tegap	Kritis	Uraian
Persentase Kunjungan Wisata	95	1000	10000	100000

a. Analisis Indikator

Rendahnya kunjungan wisatawan (Ganda) di Kabupaten 2022 yang ditargetkan sebesar 95, 10% atau 95-100 juta dan 10-200 juta kunjungan wisatawan lokal dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 melalui kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang ditargetkan yang ditargetkan yang ditargetkan 100,000.

Untuk mencapai target 2022, perlu upaya yang dilakukan. Menganalisis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing. Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Tahun 2022
Evaluasi Kinerja 2022 (Ganda) 2022

Kategori	Indikator	2022			2021			Uraian
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	
Kunjungan Wisata	%	95	100	5	100	100	0	Kunjungan Wisata
		1000	1000	0	1000	1000	0	
		10000	10000	0	10000	10000	0	
Kunjungan Wisata	%	100000	100000	0	100000	100000	0	Kunjungan Wisata
		1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	
		10000000	10000000	0	10000000	10000000	0	

Untuk mencapai target 2022, perlu upaya yang dilakukan. Menganalisis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing. Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut.

(Wisatawan AFCE) sebanyak 14,26 kunjungan, dari kunjungan untuk kunjungan wisatawan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rekapitulasi Data Wisatawan Tahun 2018-2023

Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14.263	20.295	20.262	23.321	28.231	39.495

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Sibu, data 2023

Objek wisata unggulan di Kabupaten Sibu yang sangat penting, memiliki potensi nilai:

- 1) Objek Wisata Bumi Pakarohok Pasigama Suku di Desa Tenang Kolomban, Tanah Suku;
- 2) Objek Wisata Gunung Tenang di Desa Tenang Kolomban, Tanah Suku;
- 3) Objek Wisata Air Terjun Airu di Desa Tenang Kolomban, Tanah Suku, Kota di Kabupaten Sibu, Kalimantan Tengah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan kualitas managemennya yang berwujud kelestarian, daya tarik, aksesibilitas, dan nilai tambah wisata. Untuk itu, perlu upaya yang terus-menerus.

Tabel 11
Salah Satu Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Sibu

No	Objek Wisata	Luas	Potensi
1.	Objek Wisata Pakarohok Pasigama Suku	100000 m ²	5000
2.	Objek Wisata Gunung Tenang	200000 m ²	10000
3.	Objek Wisata Air Terjun Airu	50000 m ²	2500
4.	Objek Wisata Bumi Pakarohok Pasigama Suku	100000 m ²	5000
5.	Objek Wisata Gunung Tenang	200000 m ²	10000
6.	Objek Wisata Air Terjun Airu	50000 m ²	2500
7.	Objek Wisata Bumi Pakarohok Pasigama Suku	100000 m ²	5000
8.	Objek Wisata Gunung Tenang	200000 m ²	10000
9.	Objek Wisata Air Terjun Airu	50000 m ²	2500

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Keberadaan
9.	Danau Oge	Desa Suring, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
10.	Danau Muga	Desa Suring, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
11.	Danau Trising	Desa Trising, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
12.	Air Tegal Jantar Gogot	Desa Jantar, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
13.	Air Tegal Inan	Desa Suring, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
14.	Air Tegal Sigitan	Desa Sigitan, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
15.	Air Tegal Jantar Jantung	Desa Jantar, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
16.	Air Tegal Hengkang Dawa	Desa Hengkang, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
17.	Air Tegal Beningbang	Desa Beningbang, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
18.	Air Tegal Bantur	Desa Bantur, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
19.	Air Tegal Tegal	Desa Tegal, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
20.	Air Tegal Yambak	Desa Yambak, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
21.	Waduk P4	Desa P4, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
22.	Waduk P5	Desa P5, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
23.	Waduk P6	Desa P6, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
24.	Waduk P7	Desa P7, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
25.	Waduk P8	Desa P8, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
26.	Waduk P9	Desa P9, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
27.	Waduk P10	Desa P10, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
28.	Waduk P11	Desa P11, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
29.	Waduk P12	Desa P12, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
30.	Waduk P13	Desa P13, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
31.	Waduk P14	Desa P14, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada
32.	Waduk P15	Desa P15, Kecamatan Tegal, Kabupaten	Ada

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Kategori
33	Bumi Perkenangan PanglimaBatur	Desa Terapan, Kecamatan Tambora Selatan	Objek Wisata Pusat PanglimaBatur
34	Badran Rabeas Ramaja	Watas Tambora, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
35	Kerangka Kapal Belanda Ornuat	Tungkuwu, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
36	Tugu Pancasila	Muga-watu, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
37	Situs Batu Boreas	Perampat, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
38	Parkang Salinga	Desa Salinga, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
39	Situs Perkuhan	Desa Perkuhan, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
40	Makam Mangkum	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
41	Makam Singa Baru	Desa Singa Baru, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
42	Makam Perkuhan	Desa Perkuhan, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
43	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
44	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
45	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
46	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
47	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
48	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
49	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
50	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
51	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
52	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
53	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
54	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
55	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata
56	Makam Mangkum Baru	Desa Mangkum, Kecamatan Tambora Tengah	Objek Wisata

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Kelembaban
37.	Rumah Betang Station	Jl. Pemuda, Kuala Temer	Cepat Hujan

Rencananya target pada 42.45 untuk tahun 2021 karena masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Target untuk tahun 2022 adalah 400 untuk persentase kunjungan wisata sebesar 75.3%, merupakan peningkatan yang ditetapkan.

Tesis 20

Perbandingan capaian kinerja indikator persentase kunjungan wisata terhadap target tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Target 2022	Kondisi Aktual 2022		
			Target	Realisasi	Deviasi (%)
Persentase kunjungan wisata	75	75,3%	75,3%	75,3%	0,0%

Terdapat 5 indikator kinerja yang akan diukur untuk mengetahui target pada 2022 antara lain:

- 1) Meningkatkan capaian dari hasil kegiatan dan kerja lapangan di bidang wisata
- 2) Meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang masuk ke destinasi wisata wisata yang dikelola dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke destinasi wisata yang dikelola
- 3) Meningkatkan hasil wisata yang akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
- 4) Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata

4.2.2.2.2. Strategi Pemeliharaan Sumber

Kejelasan pemeliharaan sumber daya manusia pada tahun 2022 yang akan dilakukan dengan cara:

Tabel 31
 Bobot Program Pendidikan Sesuai SK

Sasaran Strategis Meningkatkan Daya Cipta Pendidik			
Indikator Kinerja Utama	Program Peningkatan Daerah asal PDLK	Program pada CPA Pendidik	Bobot
Peningkatan Kualitas Kinerja	Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Program Peningkatan Daya Cipta	100
		Program Peningkatan Pengetahuan	100
		Program Peningkatan Keterampilan	100
		Program Peningkatan Daya Cipta	100
		Program Peningkatan Pengetahuan	100
		Program Peningkatan Keterampilan	100
		Program Peningkatan Daya Cipta	100
		Program Peningkatan Pengetahuan	100
		Program Peningkatan Keterampilan	100
		Program Peningkatan Daya Cipta	100

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 9. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 10. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- Pengawasan Pemeliharaan Spot Foto di Objek Wisata Pengaliran, Pembangunan Ragar Tebing Objek Wisata Air Terjun Jantar Doyan, Peningkatan Fasilitas Objek Wisata Air Terjun Jantar Doyan
- Pengawasan Peningkatan Fasilitas di Objek Wisata Air Terjun Simal Doyan
- Pembangunan Mushola Objek Wisata Air Terjun Jantar Doyan dan Fasilitas Mushola Objek Wisata Alam Tering
- Pengadaan Perengkapan Museum Saibak Sileca
- KUPP dan Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Bahan Baku
- Perencanaan Pembangunan Gedung 3 Lantai Objek Wisata Dora Terling

Hasil pengukuran kerja untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.14
Evaluasi Kinerja Sasaran ini Tahun 2023

Sasaran Minimalkan Keterlambatan Masyarakat				
Indikator	Sasaran	Tujuan	Kategori	Skor
Tingkat penyelesaian permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan)	%	100%	100%	100%

a. Analisis Indikator

Tahun 2023 ditargetkan tingkat penyelesaian permasalahan kerja K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan) sebesar 100%. Berdasarkan data yang didapat, kelulusan kerja ini dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan) sebesar 100% yang ditunjukkan dengan skor 100% yang menunjukkan bahwa seluruh permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan) telah selesai dan ditangani dengan baik.

Tabel 3.2.15
Analisis Indikator Kinerja Kerja Sasaran K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan)

Indikator	Tujuan	Kategori
Tingkat penyelesaian permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan)	100%	100%

Hasil kerja yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa seluruh permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan) telah selesai dan ditangani dengan baik, yang ditunjukkan dengan skor 100% yang menunjukkan bahwa seluruh permasalahan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Kedisiplinan) telah selesai dan ditangani dengan baik.

Table 34

Perbandingan capaian tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020

Tingkat pengendalian pelanggaran (K)	Saluran	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	5%	18290	17198	18198	17298	17198	18198
Realisasi	7%	17198	18198	17198	18198	17198	18198
Sasaran	7%	18198	17198	18198	17198	18198	17198

Perbandingan Target 2018-2020 dan Realisasi 2018-2020 di tahun 2023

Perbandingan target 2018-2020 dan realisasi 2018-2020 di tahun 2023. Menurut target 2018-2020, realisasi target 2018-2020 adalah 18198 dan 17198. Realisasi target 2018-2020 adalah 17198 dan 18198.

Table 35

Perbandingan capaian tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020

Tingkat pengendalian pelanggaran (K)	Saluran	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko		
			Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Target	5%	18198	17198	18198	17198

- 1) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 2) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 3) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 4) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 5) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 6) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 7) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020
- 8) Mengetahui tingkat risiko tingkat manajemen program di tahun 2018-2020

b. Analisis Program Pendukung Sasaran

Analisis program bertujuan untuk melihat secara jelas keterkaitan antara sasaran 14 tersebut pada action program sebagai berikut:

Tabel 08
Rekomendasi Program Pendukung Sasaran 14

Sasaran Strategic			
Meminimalisir Kematian Masyarakat			
Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Program yang Berpotensi Berhasil	Indikator Kinerja Utama
Tingkat Penurunan Angka Kematian Masyarakat (AKM)	Program peningkatan kemampuan dan pengetahuan keluarga	Program Peningkatan Kemampuan Keluarga dan Masyarakat dalam Cegah Tumbuh dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya	Tingkat Penurunan Angka Kematian Masyarakat

Untuk mendukung target tersebut, maka diperlukan dukungan dari lintas instansi dengan cara melakukan kerja sama, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antar instansi dan lembaga terkait. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan penyakit menular berbahaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi dan media massa. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular berbahaya.

Hasil pengukuran/nilai untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Evaluasi Kinerja Indikator no. 10 tahun 2023

Sasaran				
Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat				
Indikator	Sasaran	Tujuan	Kategori	Nilai
Persentase Penyerapan Konflik Sosial	85	90	100	100

a. Analisis Indikator

Konflik sosial adalah suatu proses yang terjadi antara dua atau lebih (dua kelompok) dimana salah satu pihak berusaha meniadakan pihak lain dengan menggunakan daya kekerasan yang dipandang tidak sah. Konflik adalah suatu keadaan dimana dua individu atau kelompok yang berbeda dan beradanya dalam suatu situasi dimana masing-masing pihak berusaha mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan pihak lainnya.

Selain itu, konflik sosial juga dapat terjadi dalam masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan nilai yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan yang ada di antara dua pihak yang bertentangan.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan nilai yang ada di antara dua pihak yang bertentangan. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan yang ada di antara dua pihak yang bertentangan.

Table 2.2

Perbandingan capaian kinerja terhadap Penetapan Penyelesaian Konflik Sosial tahun 2019-2021

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	%	30	30	30	30	30	30
Realisasi	%	30	30	30	30	30	30
Capaian	%	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Target penyelesaian setiap tahun adalah 30% dari jumlah kasus yang dilaporkan.
 Sumber: RPJMD 2019-2024

Pencapaian target pada RPJMD untuk tahun 2021 sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa adanya upaya yang sudah dilakukan yang dilakukan untuk elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banta yang telah sangat penting kondisi dan keadilan.

Table 2.3

Perbandingan capaian kinerja terhadap Penetapan Penyelesaian Konflik Sosial tahun 2019-2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi		
			2019	2020	2021
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	30	30	30	30

Adapun dalam hal ini, capaian kinerja yang telah tercapai adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pada Penyelesaian Konflik Sosial yang sudah dilakukan yang dilakukan untuk elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banta yang telah sangat penting kondisi dan keadilan.

- 2) Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidauli Utara antara lain: Forum Keagamaan dan Masyarakat (FKM), Forum Kerukunan / Umat Seagama (FKUS), Forum Komunikasi dan Tali Benda, Penanganan Konflik Sosial, Keperawatan Bumi Bumi di Sarung, sedang dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat masyarakat desa/ forum ini merupakan salah satunya sebagai sarana konsultasi dan berbagai unsur lintas dalam rangka mewujudkan terciptanya dan harmonisasi dalam kehidupan, dan mengoptimalkan pembangunan yang akan berkembang di wilayah Kabupaten Sidauli Utara.
- 3) Terjalinya hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidauli Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam rangka melakukan pengawasan, kontrol, dan sebagai bentuk pemantauan, koordinasi, komunikasi, dan lain-lain yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Terjalunya rencana dan terdapat komunikasi yang akan dilaksanakan di Kantor Uluwatu Sidauli.

D. Analisis Program Pendidikan Kesehatan

Menurut pendapat yang disampaikan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Program Pendidikan Kesehatan

Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran
Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran
Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran	Kategori Sasaran

Hasil pengukuran/tepa untuk sasaran ke-16 tahun anggaran 2021

Target
Evaluasi Kinerja 2021
Evaluasi Kinerja 2020

Sasaran Mendukung Penguatan Kelembagaan				
Indikator	Sasaran	Target	Kinerja 2020	Kinerja 2021
Pembinaan PMS yang Monev	5	20%	20%	100%

a. Analisis Indikator

Pembinaan Monev Kelembagaan SPM PMS yang Monev yang telah keluarga yang akan pada bimbingan teknis dan pelatihan. Monev akan melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan tidak lupa juga memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pembinaan Monev yang akan dilaksanakan. Monev akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Tujuan dari kegiatan pembinaan PMS yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Adapun hasil dari kegiatan pembinaan PMS yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

REKAPITULASI
PNPS Tahun 2022

NO.	Jenis	Volume (Unit)
1.	Abstrak Sistem Lantai Lantai Teratas - 400 cm	100
2.	Creag dengan kecepatan ramping vertikal dan metal decking	100
3.	Program Keuangan Laporan 2022	100
4.	PNPS Penyandang Disabilitas Teratas 100	100
5.	Sistem Instalasi Beranda 100	100
6.	Tanah	100
7.	Pelaksanaan (Sistem)	100
8.	PNPS	100
Jumlah PNPS yang dapat		100
Jumlah PNPS yang dapat		100
Jumlah PNPS yang dapat		100

Perencanaan biaya pada proyek tahun 2022 meliputi perencanaan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Perencanaan biaya pada proyek konstruksi yang dilakukan menggunakan data historis yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya.

REKAPITULASI
REKAPITULASI

Kategori	Unit	Volume					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Struktur	m ³	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Instalasi	m ²	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Saluran	m	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Rekapitulasi biaya pada proyek tahun 2022 meliputi perencanaan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Perencanaan biaya pada proyek konstruksi yang dilakukan menggunakan data historis yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya.

Tabel 34

Perbandingan kesadaran kerja indikator PIRK3 yang menjadi indikator kunci (Rencana 2015-2025)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana 2015 (R. 2015-2018)	Rencana 2019-2025 (R. 2019-2025)		
			Tinggi	Rendah	Target
Persentase PIRK3 yang mandiri	%	20%	20%	20%	75%

Persentase PIRK3 yang mandiri merupakan indikator yang akan memenuhi target kinerja pada tahun 2025. Adapun target pencapaian indikator kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2018 tentang standar kerja Pegawai Sosial pada SPKK Bidang Sosial.

2) Program kualitas hidup berupa program pemberdayaan, peningkatan pendapatan, dan akses ke layanan kesehatan yang mandiri dan PIRK3 yang mandiri diharapkan dengan cara mandiri yang berkesinambungan.

3) Adanya nilai yang ditularkan oleh orang tua kepada anak-anak, khususnya nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan mandiri, yaitu kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi dengan lingkungan yang beragam, nilai-nilai yang relevan dan mandiri dalam kehidupan.

4) Adanya kemampuan hidup mandiri keluarga, yang meliputi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam.

5) Adanya program pelayanan sosial.

Adanya program pelayanan sosial yang berkesinambungan serta terus-menerus untuk meningkatkan kualitas.

Tabel 96
 Bobot Program Pendukung Sasaran-18

Sasaran Strategis: Menurunnya Penyandang Masalah Sosial			
Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah oleh RPJMD	Program pada OPD Perangkat Daerah	Bobot
Penderita BAKS yang Mandiri (8)	Program pemberdayaan	Program Pemberdayaan Sosial	100% 100% 100% 100%
	Keterampilan sosial BAKS	Program Rehabilitasi Sosial	
	Kelas GMR	Program Peningkatan Keterampilan BAKS	
	Integrasi BAKS dan PMK	Program Rehabilitasi Sosial	

Kategori: 100% (100%); 75% (100%); 50% (100%); 25% (100%); 0% (100%)
 (Optimalisasi kegiatan dan upaya sosial masyarakat)

- a. Rehabilitasi sosial oleh Pemerintah Kabupaten Tegalapada 100% (100%)
 (Keterampilan sosial BAKS) untuk Peningkatan Keterampilan dan Integrasi
- b. Rehabilitasi sosial masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Tegalapada 100% (100%)
 (Kelas BAKS dan BAKS) untuk Peningkatan Keterampilan dan Integrasi
- c. Rehabilitasi sosial masyarakat
- d. Rehabilitasi sosial pada kelas BAKS dan BAKS
- e. Rehabilitasi sosial oleh Pemerintah Kabupaten Tegalapada

Hasil pengujian terhadap sasaran Rp. 17.000,00, sebagai berikut:

Tabel 20
 Capaian Kinerja Sasaran 15 - 2019/2020

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi				
Indikator	Sasaran	Tipe	Skala	Uraian
Indeks Kepuasan Birokrasi	85,00	Q	1000	1000

a. Analisis Indikator

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mencapai visi misi sebagai goal pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien dan transparan. Selain meningkatkan pelayanan yang berkualitas, Reformasi birokrasi adalah program dengan tiga (3) pilar utama yakni, Transparensi, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi adalah Indeks Kepuasan Birokrasi (IKB). IKB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi adalah Indeks Kepuasan Birokrasi (IKB). IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi adalah Indeks Kepuasan Birokrasi (IKB). IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi. IKB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan birokrasi.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Berdasarkan Tahun 2022

No	Pemikiran	2021	2022
A	RB Genera	100	100
B	RB Tertarik	100	100
C	Indeks RB	100	100
			100

Hasil evaluasi tahun 2022 juga menunjukkan angka yang sama sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1229/2021 tentang standar pelayanan kesehatan keluarga sebagai upaya pemertanian, kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa lainnya yang terdapat.

Sehingga selanjutnya pada Indeks tersebut diuraikan bahwa terdapat rekomendasi untuk indeks yang terdapat dengan nilai 100 hasil dari pencapaian dan nilai selanjutnya dengan pencapaian terdapat pada tahun 2022 terdapat pencapaian dengan nilai 100 dengan pencapaian 100%.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Berdasarkan Tahun 2022-2023

Indeks RB	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RB Genera	100	100	100	100	100	100	100
RB Tertarik	100	100	100	100	100	100	100
Indeks RB	100	100	100	100	100	100	100

Hasil evaluasi tahun 2023 juga menunjukkan angka yang sama dengan tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1229/2021 tentang standar pelayanan kesehatan keluarga sebagai upaya pemertanian, kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa lainnya yang terdapat.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Kondisi Awal 2023 (Tahun 2023)		
			Tercapai	Belum Tercapai	Belum
Indikator 93	Proses (Misi)	1	0	1	100%

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, Badan Penyelenggara Kabupaten Bando Utara telah melakukan dan akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan dengan Peraturan Bupati Bando Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bando Utara Tahun 2023/2024. Maksud dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Kabupaten Bando Utara yang bersangkutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 300

Sasaran dan Kegiatan Utama SS Bersel

Sasaran (immediate outcome)		Kegiatan Utama
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lebih transparan dan akuntabel		
SS.1.1	Terimplementasinya Kemitraan Persepsi/Persepsi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.2	Terimplementasinya Kemitraan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas dan daya dukung ASN dengan dan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.3	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.4	Terimplementasinya Sistem Pengukuran, Pengukuran dan Pengukuran yang Terintegrasi, Sistem Pengukuran, Sistem Pengukuran, dan Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.5	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.6	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.7	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.8	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.9	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder
SS.1.10	Terimplementasinya Kemitraan Kemitraan Kemitraan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> Menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder

Sasaran (Immediate Outcome)		Indikator Kinerja
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKSI, AK dengan ASN yang profesional		
SS.2.1	Terwujudnya percepatan transformasi pejabat fungsional	Perubahan Status Fungsional
SS.2.2	Tersejahterannya masyarakat talenta ASN yang profesional	Pengadaan Anggaran Tunjangan
SS.2.3	Terwujudnya sistem keadilaneraan ASN yang adil layak dan berkeadilan	Pengadaan Kerja Pensiun ASN
SS.2.4	Meningkatnya ketahanan terhadap siber dari ancaman disintegrasi bangsa	Pengadaan Siber Day Kelembagaan Siber (KIB) Peningkatan Kapasitas ASN Pusat

1. Sasaran 1: Terwujudnya percepatan transformasi pejabat fungsional. Sasaran ini diukur dengan indikator perubahan status fungsional. Sasaran ini diukur dengan indikator perubahan status fungsional. Sasaran ini diukur dengan indikator perubahan status fungsional.

Revisi
Struktur Organisasi dan Mutu yang Diharapkan

No	Fungsi	Struktur Organisasi	Mutu yang Diharapkan
1	Kendali Kualitas Pelayanan	Struktur Organisasi	Kualitas Pelayanan
2	Pengelolaan Anggaran	Struktur Organisasi	Pengelolaan Anggaran
3	Pengelolaan Mutu	Struktur Organisasi	Pengelolaan Mutu
4	Pengelolaan Risiko	Struktur Organisasi	Pengelolaan Risiko

1. Sasaran 1: Terwujudnya percepatan transformasi pejabat fungsional. Sasaran ini diukur dengan indikator perubahan status fungsional. Sasaran ini diukur dengan indikator perubahan status fungsional.

- 2) Meringkatnya peran Agen Perubahan dalam implementasi SPBE
- 3) Penerapan tata kelola SPBE mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya.
- 4) Aranya perbaikan dalam kualitas pengajaran pengajaran SPBE dan SPB
- 5) Terjadi peningkatan keseluruhan kinerja standar pelayanan
- 6) Perbaikan dalam pengajaran tetap dan peningkatan tetap tetap
- 7) Terjadi perubahan dalam informasi tahun
- 8) Terjadinya sebagai bentuk reformasi dan SPBE dan SPB

Ilmu yang berfokus untuk menganalisis perubahan organisasi sebagai proses dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berfokus pada perubahan organisasi.

- 1) Menganalisis rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan perubahan SPBE pada evaluasi nasional SPBE
- 2) Menyusun rencana aksi RE Operasi dan RE Terpadu Tahun 2024 dan tahun berikutnya dalam pelaksanaan SPBE sebagai bentuk reformasi dan SPBE dan SPB
- 3) Menganalisis implementasi SPBE sebagai bentuk reformasi dan SPBE dan SPB

10. Analisis Program Pendidikan

Menganalisis dan memahami secara menyeluruh tentang program pendidikan yang ada di lingkungan.

Tabel 10
Analisis Program Pendidikan

ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN			
NO	URUTAN	PROGRAM	INDIKATOR
NO	URUTAN	PROGRAM	INDIKATOR
1	1	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
2	2	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
3	3	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
4	4	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
5	5	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
6	6	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
7	7	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
8	8	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
9	9	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf
10	10	Program Pendidikan	1. Jumlah Siswa 2. Jumlah Guru 3. Jumlah Dosen 4. Jumlah Staf

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

Indikator Kinerja Utama	Program/Proses Pembangunan Daerah	Program yang terdampak	Materi Pokok Bahasan
		Program Pembangunan Persejahteraan Program Pelayanan Publik Program Pelayanan Masyarakat Program Pengembangan SDM	Pelayanan Publik Pelayanan Masyarakat Pengembangan SDM

Untuk mencapai target tersebut, akan dilaksanakan secara menyeluruh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. **Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** mengenai Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Publik
- b. **Penyusunan dan Koordinasi**
- c. **Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** dan Pelayanan Publik
- d. **Regulasi, Partisipasi dan Inisiasi** masyarakat 2015 dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat, pelayanan publik dan pengembangan SDM
- e. **Regulasi dan Pengabdian Masyarakat** dan Pelayanan Publik
- f. **Regulasi dan Pengabdian Masyarakat** dan Pelayanan Publik

Hasil pengujian terhadap sasaran Rp 15.000.000.000,00

Tahun 2023

(Capaian Kinerja sesuai ke-31 tahun 2023)

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Manajemen Kinerja				
Indikator	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP	80,00	80,00	80,00	80,00

a. Analisis Indikator

Pengukuran ketercapaian kinerja berdasarkan nilai yang tertera yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan yang berada dibawah dan/atau membawahi instansi tersebut, dengan cara melakukan dan mengukurnya dengan cara yang tertera dalam tabel. Pengukuran ketercapaian ini dilakukan secara berkala, sesuai dengan siklus kinerja tahun anggaran. Dengan demikian, secara berkala dilakukan pengujian terhadap capaian kinerja.

Untuk mengukur kinerja yang tertera tersebut menggunakan formula sebagai berikut yang akan menghasilkan angka yang dapat diukur secara berkala dan dapat dibandingkan dengan nilai yang tertera dalam tabel yang akan menghasilkan nilai yang tertera dalam tabel. Untuk itu, pengujian ketercapaian dilakukan secara berkala dan dapat dibandingkan dengan nilai yang tertera dalam tabel.

Untuk mengukur kinerja yang tertera tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap capaian kinerja yang tertera dalam tabel yang akan menghasilkan nilai yang tertera dalam tabel. Untuk itu, pengujian ketercapaian dilakukan secara berkala dan dapat dibandingkan dengan nilai yang tertera dalam tabel.

Tabel 124
Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub-Kategori			Bobot
		Ketersediaan	Keefektifan	Pemertayaan	
1	Perencanaan Kinerja	10	10	10	30
2	Pangukuran Kinerja	10	10	10	
3	pelaporan Kinerja	10	10	10	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	10	10	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	20	20	60

Sumber: Permendagri No 29 Tahun 2017

Implementasi SAKIP tahun 2023 telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan. Hasilnya pada 2023 nilai Penilaian SAKIP pada tahun tersebut di dengan skor sebesar 82,71. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan SAKIP telah dilaksanakan dan dapat baik pada Pemerintah Daerah dan seluruh perangkat daerah. Namun demikian, adanya kelemahan dalam pelaksanaan terutama pada keterbatasan sumber daya yang dapat menimbulkan tingkat nilai hasil implementasi yang cenderung dalam kondisi yang belum optimal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan

Tabel 125
RINCIAN HASIL NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

No	Sub-Kategori	Bobot	2023			Bobot	2022	2021
			Ketersediaan	Keefektifan	Pemertayaan			
1	Perencanaan Kinerja	10	100%	100%	100%	10	100%	100%
2	Pangukuran Kinerja	10	100%	100%	100%	10	100%	100%
3	pelaporan Kinerja	10	100%	100%	100%	10	100%	100%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	100%	100%	100%	10	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	40	100%	100%	100%	40	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Diketahui bahwa nilai akuntabilitas kinerja internal pada tahun 2023 telah mencapai 100% untuk seluruh sub-kategori. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan SAKIP dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan

Pencapaian indikator Kinerja Perilaku Sistem Manajemen Energi (SME) Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yaitu 87,9 dengan target 90, nilai yang dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 85,4 dengan pencapaian 87,9 dapat diartikan kinerja untuk tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan karena adanya pengurangan target dan nilai di tahun 2023.

Tabel 16
Perbandingan capaian kinerja indikator NKE (SAKIP) Tahun 2021-2023

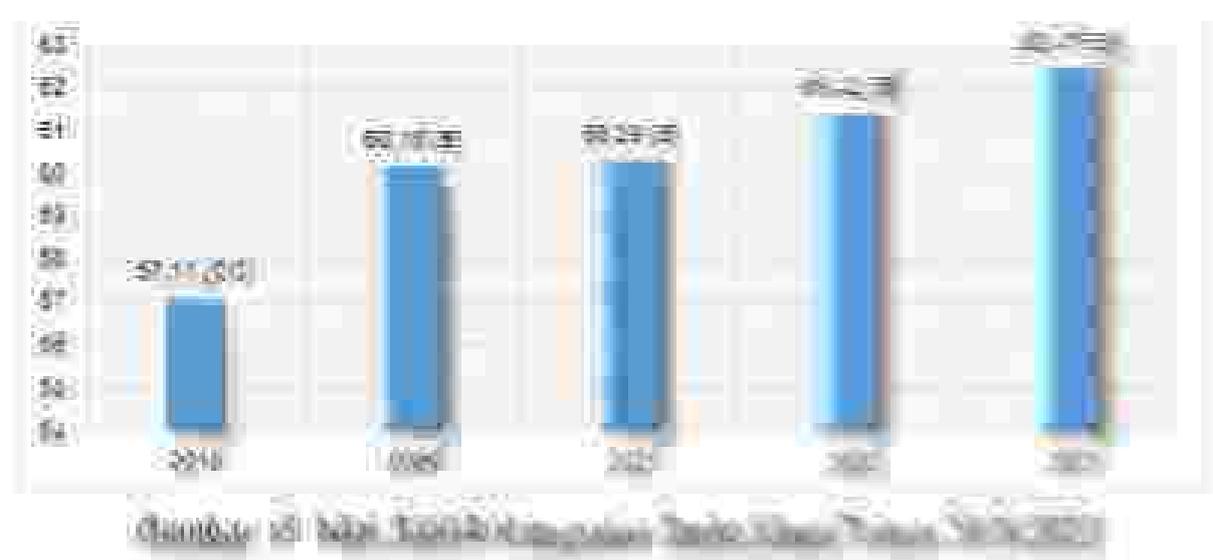
No SAOR	Sasaran	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat	%	85	87,9	85,4	87,9	87,9	87,9
Realisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hal tersebut dikarenakan dengan target tahun 2023 yaitu 87,9 dengan pencapaian 87,9, maka tahun 2023 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang menunjukkan pencapaian yang baik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 85,4 dengan pencapaian 87,9. Hal tersebut dikarenakan dengan target tahun 2023 yaitu 87,9 dengan pencapaian 87,9, maka tahun 2023 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang menunjukkan pencapaian yang baik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 85,4 dengan pencapaian 87,9.

Tabel 17
Rincian capaian kinerja indikator NKE (SAKIP) tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Nilai	Pencapaian (Target)	Tahun	
			2021	2022
SAKIP	90	87,9	87,9	87,9

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 sampai dengan 2021 memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu dari 42,30 pada tahun 2014 sampai dengan 82,30 pada tahun 2021.



Jika ditinjau dari nilai SAKIP Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014-2021, maka dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 masih berada di bawah 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantaeng belum dapat dikatakan telah melaksanakan SDG secara optimal. Oleh karena itu, Kabupaten Bantaeng harus terus meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Bantaeng dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Bantaeng, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya. Tujuan khusus sasaran strategis akan dimasukkan dalam anggaran belanja RPJMD yang baru.

- 2) Menetapkan kembali prioritas indikator kinerja yang akan diukur di tingkat daerah agar relevan dan selaras dengan tanggung jawab daerah yang ditetapkan.
- 3) Merumuskan ulang perencanaan kinerja untuk memperhatikan perubahan yang berdampak kinerja besar yang signifikan.
- 4) Merumuskan kembali indikator yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis dan mengintegrasikan dengan indikator kinerja yang ada di tingkat daerah.
- 5) Mengintegrasikan ulang SSKA ke dalam perencanaan sebagai alat ukur dan indikator pencapaian hasil secara menyeluruh.
- 6) Memastikan indikator kinerja yang relevan dari berbagai UU yang telah mengaitkan indikator kinerja dengan indikator yang akan diukur.
- 7) Melakukan uji coba indikator kinerja yang relevan ke tingkat daerah dan memastikan bahwa indikator yang relevan tersebut dapat diukur dan diukur.
- 8) Melakukan uji coba yang relevan ke tingkat daerah yang relevan dan memastikan bahwa indikator yang relevan tersebut dapat diukur dan diukur.
- 9) Melakukan peninjauan ulang proses evaluasi kinerja yang relevan dan memastikan bahwa indikator yang relevan tersebut dapat diukur dan diukur.
- 10) Melakukan peninjauan ulang proses evaluasi kinerja yang relevan dan memastikan bahwa indikator yang relevan tersebut dapat diukur dan diukur.
- 11) Melakukan peninjauan ulang proses evaluasi kinerja yang relevan dan memastikan bahwa indikator yang relevan tersebut dapat diukur dan diukur.

1) Masih rendahnya program kegiatan untuk penanganan kasus SAKIP yang menangani SAKIP di setiap Kecamatan/Desa

2) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap hasil-hasil pekerjaan kinerja:

Alternatif Solusi yang akan dicari untuk mengatasi masalah di atas melaikatang dari isi program adalah:

1) Mengupayakan penganggaran yang cukup untuk anggaran kegiatan SAKIP yang menangani SAKIP Kecamatan/Desa untuk kegiatan tersebut

2) Mengoptimalkan pelaksanaan program-program pokok yang ada dan mengoptimalkan yang sudah ada

3.2.19 Sasaran Sembilan Belas Meningkatkan Kualitas Pemberian Layanan Publik

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Capaian kinerja sasaran ke-19 tahun 2023

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik				
Indikator	Sasaran	Tercapai	Rendahnya	Target (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00	77,50	78,50	78,00

a. Analisis Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan pada 01 Desember 2023. Pelaksanaan IKM ini dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada Kelembagaan Health Management System yang dimiliki oleh Badan Kesehatan Masyarakat Kota Padang. Tujuan pelaksanaan IKM ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Kesehatan Masyarakat Kota Padang.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Kesehatan Masyarakat Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada Kelembagaan Health Management System yang dimiliki oleh Badan Kesehatan Masyarakat Kota Padang.

Tabel 3.20

Hasil Analisis Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

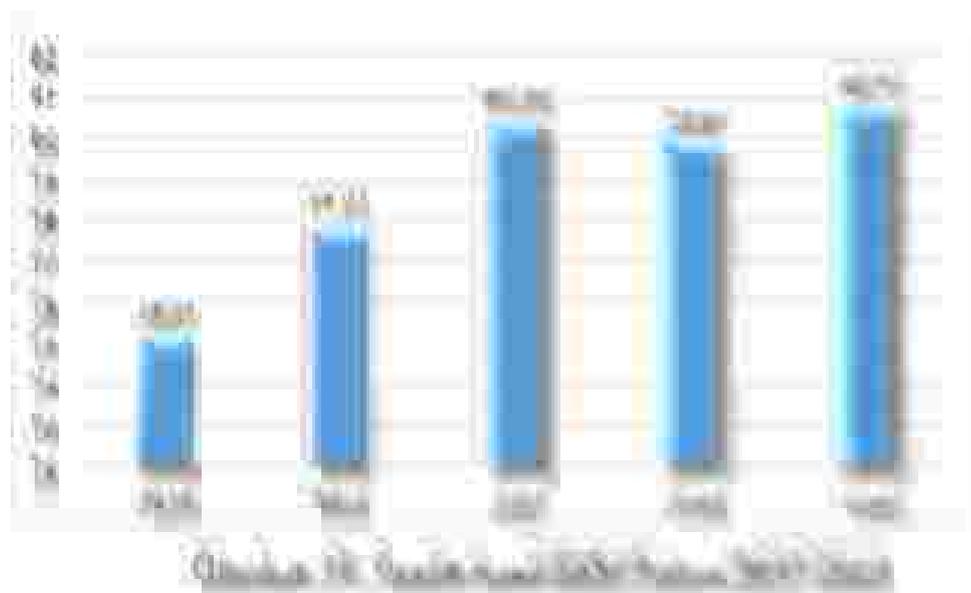
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rentan	Nilai Rentan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,00	77,50	78,50	78,00

Tabel 10

Perbandingan capaian kriteria indikator aspek Keselamatan Kesehatan Kerja Kabupaten Serang Tahun 2014 dan 2015

Indikator	Status	Kondisi Awal (2014)	Kondisi Akhir (2015) Tahun 2015		
			Tercapai	Belum Terpenuhi	Perubahan (%)
Indeks Keselamatan Masyarakat (IKM)	Berkas (100)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)	100%

Diikuti lima tahun terakhir yaitu 2012 Kabupaten Serang telah mengalami peningkatan nilai Indeks Keselamatan Masyarakat yang berarti tahun 2014, nilai Program Kesehatan Masyarakat Kabupaten Serang telah meraih grade A. Untuk Kabupaten Serang peringkat kedua di Kabupaten Kabupaten lainnya.



- 1) Untuk indikator keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang, menunjukkan peningkatan nilai keselamatan kerja.
- 2) Untuk indikator keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang, menunjukkan peningkatan nilai keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang.
- 3) Untuk indikator keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang, menunjukkan peningkatan nilai keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang.
- 4) Untuk indikator keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang, menunjukkan peningkatan nilai keselamatan kerja yang ada di Kabupaten Serang.

- 3) Adanya arahan dan peraturan untuk memelihara Standard Standard Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai alat untuk penyederhanaan prosedur pelayanan.
- 4) Adanya tindak lanjut terhadap hasil analisis keluhan-keluhan sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengharuskan pemerintah daerah (pada Banteng Utara) untuk memelihara pelayanan kepada masyarakat. Kepada unit administratif pelayanan publik yang ada agar melakukan pemeliharaan prosedur pelayanan masuk dalam zona nps.
- 5) Adanya reward full stop unit kerja yang telah melakukan upaya perbaikan kualitas dengan baik.

4. Analisis Program Perbaikan Kualitas

Program-program perbaikan kualitas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas.

Tabel 7.4

Uraian Program Perbaikan Kualitas

Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan
Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan
Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan
Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan
Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan
Kategori Masalah	Uraian Masalah	Uraian Program Perbaikan Kualitas	Uraian Tindakan Perbaikan

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2023 untuk peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan kegiatan terkait mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan:

- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Administrasi dan Regulasi, Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Kependudukan, Peningkatan Profil Kependudukan
- Pelayanan Perizinan dan Tata Kelola Usaha Negara, Sertifikasi Tanah, Perumahan, Misdak yang meliputi perencanaan, desain, pengadaan, dan informasi, Perumahan dan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Tempat Kerja
- Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan e-Procurement

Hasil pengujian terhadap sesaran Rp 20 milyar sebagai berikut

Tabel 19
Capaian Kinerja sesaran es 20 tahun 2020

Sesaran				
Meningkatnya Pengeluaran Keuangan dan aset Daerah				
Indikator	Sasaran	Target	Realisasi	Unit
Opini BPK	Realisasi (Penuhi)	100%	100%	100%

a. Analisis Indikator

Tujuan penelitian yang sudah terungkap adalah untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penelitian terhadap anggaran yang ada di Kabupaten Keuangan Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan dan pengujian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau.

BPK dapat melakukan penelitian ini untuk Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau.

Untuk mengetahui cara melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau.

Untuk mengetahui cara melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau.

Pengevaluasian (WTR/Unqualified Opinion) oleh auditor internal yang menunjukkan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan masalah yang sangat penting. undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. Tetapi demikian terdapat masalah tahun 2022 yaitu saat SPI yang menunjukkan tingkat capaian kinerja 100% atau dalam kategori baik. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Garut Utara mampu mendemonstrasikan SPI yang baik yang menunjukkan kinerja

Tabel 14
 Rincian Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan
 Kabupaten Garut Utara Tahun 2022

Kategori	Tahun									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

yang menunjukkan kinerja yang baik yang menunjukkan

Tabel 15
 Rincian Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan
 Kabupaten Garut Utara Tahun 2022

Kategori	Tahun	Tingkat						
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
Tingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

yang menunjukkan kinerja yang baik yang menunjukkan

Tabel 15

Perbandingan capaian kinerja indikator Core SPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banta Utara tahun anggaran 2019/2020

Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Kondisi Awal (2019/2020)	Kondisi Akhir (2019/2020)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
EBINDSPK	Realisasi (Rp. M)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	100%

Faktor pendukung ketercapaian indikator SPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banta Utara adalah:

- 1) RENCANA APBD Kabupaten Banta Utara yang baik
- 2) RENCANA TANTANGAN dan strategi untuk mencapai target indikator yang nyata dan sesuai kebutuhan
- 3) Laporan keuangan berbasis real cost yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan terintegrasi yang terdapat dalam rencana anggaran pemerintah Kabupaten Banta Utara

02) Analisis Program/kegiatan lainnya

Rekomendasi untuk mendukung ketercapaian indikator SPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banta Utara adalah:

Tabel 16
Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
EBINDSPK	Realisasi (Rp. M)	100% (1)	100% (1)

**Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Akauntabilitas**

Indikator Kinerja Utama	Program Pembangunan Daerah (PDB) RPJMD	Program pada DPA (Rencana Kerja Daerah)	Strategis dan Kebijakan Utama
		Program Pengadaan Peralatan Daerah	Kelembagaan dan Tata Kelola

Salah satu indikator yang tertera pada 2025 akan diarahkan pengelolaan keuangan dan aset. Berikut ini kebijakan yang akan menjadi Perangkat Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

- 1. Meningkatkan Kualitas Anggaran Daerah - Amalgamasi Dengan Akauntabilitas pada Rencana Daerah
- 2. Keseluruhan dan Peningkatan Kualitas Anggaran Daerah, Modernisasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pembelian Anggaran Daerah - Peningkatan Kualitas Anggaran Daerah, Inovasi dan Kualitas Sistem Kerja Anggaran Daerah, Peningkatan Kinerja Akauntabilitas
- 3. Mengembangkan Sistem Akuntansi
- 4. Peningkatan dan Peningkatan Kinerja

3.3 Analisis Program dari Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3.1 Program Pendukung Kinerja

Program penunjang sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kabupaten Jember sejak tahun 2010 merupakan Program Pembangunan Daerah yang terkandung dalam RPJMD dan RPJPD. 2012 program ini akan dipaparkan secara umum sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program Pendukung Sistem Strategi dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pendukung	Program yang akan dilaksanakan	Program yang akan dilaksanakan
1. Meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan dengan keadilan sosial	1.1. Jumlah penduduk miskin 1.2. Jumlah penduduk miskin yang terlayak 1.3. Jumlah penduduk miskin yang terlayak	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2.1. Jumlah penduduk miskin 2.2. Jumlah penduduk miskin yang terlayak 2.3. Jumlah penduduk miskin yang terlayak	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.1. Jumlah penduduk miskin 3.2. Jumlah penduduk miskin yang terlayak 3.3. Jumlah penduduk miskin yang terlayak	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan	Program Jember Cerdas Program Jember Sehat Program Jember Aman Program Jember Berkeadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Strategis (RS) 2010-2015	Rencana Kerja (RK) 2010-2015	Tahun Anggaran 2010-2015
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	a. Rasio daya tampung b. Aksesibilitas c. Kualitas	Program: 1000 Sekolah Dasar Baru, 1000 Sekolah Menengah Pertama Baru, 1000 Sekolah Menengah Atas Baru	1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan 3. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 4. Meningkatkan kualitas pendidikan 5. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 6. Meningkatkan kualitas pendidikan	2010-2015
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	AKSESIBILITAS	Program: 1000 Sekolah Dasar Baru, 1000 Sekolah Menengah Pertama Baru, 1000 Sekolah Menengah Atas Baru	1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan 3. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 4. Meningkatkan kualitas pendidikan 5. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 6. Meningkatkan kualitas pendidikan	2010-2015
3. Meningkatkan mutu pendidikan	KUALITAS	Program: 1000 Sekolah Dasar Baru, 1000 Sekolah Menengah Pertama Baru, 1000 Sekolah Menengah Atas Baru	1. Meningkatkan mutu pendidikan 2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 3. Meningkatkan mutu pendidikan 4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 5. Meningkatkan mutu pendidikan 6. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan	2010-2015
4. Meningkatkan mutu layanan pendidikan	KUALITAS	Program: 1000 Sekolah Dasar Baru, 1000 Sekolah Menengah Pertama Baru, 1000 Sekolah Menengah Atas Baru	1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan 2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 3. Meningkatkan mutu layanan pendidikan 4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan 5. Meningkatkan mutu layanan pendidikan 6. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan	2010-2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe Sasaran (KPI)	Rencana Sasaran (Target)	Tipe Sasaran (KPI)
1. Meningkatkan kinerja pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	Rencana Sasaran: Waktu Pelayanan	Tipe Sasaran: Waktu Pelayanan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	Rencana Sasaran: Waktu Pelayanan	Tipe Sasaran: Waktu Pelayanan
3. Meningkatkan kinerja pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	KPI: Waktu Pelayanan	Rencana Sasaran: Waktu Pelayanan	Tipe Sasaran: Waktu Pelayanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	Monev
<p>1.1. Meningkatkan nilai tambah sebagai lembaga</p>	<p>a. Angka pengabdian masyarakat b. Pengabdian masyarakat</p>	<p>Program/Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat</p>	<p>1.1.1. Pengabdian Masyarakat 1.1.2. Pengabdian Masyarakat 1.1.3. Pengabdian Masyarakat 1.1.4. Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Monev Monev</p>
<p>1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</p>	<p>1.2.1. Kualitas Pelayanan Masyarakat 1.2.2. Kualitas Pelayanan Masyarakat</p>	<p>Program/Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat</p>	<p>1.2.1. Pengabdian Masyarakat 1.2.2. Pengabdian Masyarakat 1.2.3. Pengabdian Masyarakat 1.2.4. Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Monev Monev</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Strategis (RS) 2010-2012	Rencana Kerja (RK) 2010-2012	Tahun Anggaran 2010-2012
1. Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelayanan prima	Sistem pelayanan prima	Sistem pelayanan prima	Peningkatan pelayanan prima
2. Meningkatkan kinerja pegawai	Peningkatan kinerja pegawai	Peningkatan kinerja pegawai	Peningkatan kinerja pegawai	Peningkatan kinerja pegawai
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana	Peningkatan kualitas sarana prasarana			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	Tahun Anggaran 2015
18. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM)	Kecukupan SDM	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	2015
28. Meningkatkan mutu pelayanan	Sifat SDM	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Program/ Sub-Kegiatan	2015

3.3.2 Alokasi Anggaran Program

Pembagian alokasi anggaran dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: sesuai dengan pembagian yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Santo Utara Tahun 2023-2026, dengan memperhatikan program yang terdapat dalam APBD Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 sesuai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran Program Pendukung Sektor Industri Kabupaten Santo Utara Tahun 2023

Sektor Strategis	Indikator Keberhasilan (IK)	Program Pendukung (PP)	Anggaran (Rp)
1. KEHIDUPAN BERKUALITAS YANG BERKELANGKAHAN DAN BERKeadilan	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
2. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
3. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
4. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
5. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
6. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000
7. KEHIDUPAN BERKUALITAS Kesejahteraan masyarakat yang merata	Percepatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Rp200.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
8. Meningkatkan sektor pertanian	ROR Sektor Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
9. Meningkatkan sektor perikanan	ROR Sektor Perikanan	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
10. Meningkatkan sektor kesehatan dan ke-ROKOR (KOR) Sektor Kesehatan	ROR Sektor Kesehatan	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
11. Meningkatkan daya saing kawasan	ROR Sektor Industri	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
12. Meningkatkan kualitas lingkungan	ROR Sektor Lingkungan	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
13. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	ROR Sektor Pendidikan	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	ROR Sektor Pelayanan Publik	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000
15. Meningkatkan kualitas tata kota	ROR Sektor Tata Kota	Program Peningkatan Produksi, Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perikanan	1.000.000.000

Sesaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Strategi/Inisiatif	Target/Nilai
16. Menurunkan angka kejadian masalah sosial	Prevalensi PKMS, angka kejadian	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Kulit dan Kelamin, HIV/AIDS, TB	40000000
17. Meningkatkan kualitas pelayanan Balneasi-Biotermal	Indeks Rata-rata Kepuasan	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	75000000
18. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen RSUD	Nilai SURF	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	75000000
19. Meningkatkan kualitas pelayanan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	75000000
20. Meningkatkan pemanfaatan anggaran dan aset daerah	Saldo BPK	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	75000000

3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di setiap tingkat organisasi akan berbeda-beda karena terdapat indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing eselon strategis yang berbeda-beda (finansial, sumber daya manusia, operasi, pemasaran, dan lain-lain). Tingkat efisiensi positif (+) menunjukkan ada efisiensi (keuntungan) sedangkan negatif (-) menunjukkan ada inefisiensi (kerugian).

Tabel 5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Target pada Tingkat Organisasi

Desain Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat			Rasio		Rasio	Rasio
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kinerja Keuangan (Gaji, Bonus, dan Tunjangan)	Penghasilan (Gaji, Bonus, dan Tunjangan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Kinerja Operasional (Produktivitas, Kualitas, dan Waktu)	Produktivitas (Output per Input)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Kinerja Pemasaran (Penjualan, Pangsa Pasar, dan Kepuasan Pelanggan)	Penjualan (Volume dan Nilai)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Kinerja Sumber Daya Manusia (Kemampuan, Motivasi, dan Retensi)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Karya			Kualitas		Efisiensi	Efektivitas
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan jumlah keanekaragaman masyarakat	Angka Partisipasi Dasar (APD)	71,32%	70,00%	98,17%	70,00-75,00%	69,00-70,00%	70,00%	70,00%
2. Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengaliran dana desa ke LKMD (Milyar Rupiah)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00-100,00%	100,00-100,00%	100,00%	100,00%
3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
8. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
9. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
10. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
11. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
12. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
13. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000
14. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	100,000	100,000	100,00%	100,000-100,000	100,000-100,000	100,000	100,000
15. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	FKM Desa (Milyar Rupiah)	500,000	500,000	100,00%	500,000-500,000	500,000-500,000	500,000	500,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Karya						
		Target	Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pertemuan	5200	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemangku Pendidikan (Guru/Guru Honorer) Penggunaan Hidroponik	72,5%	75,2%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%
13. Meningkatkan daya tarik destinasi	Pembinaan Kunjungan Media	7000	7100	7100	7100	7100	7100	7100
14. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Transparansi pelayanan Kepuasan Masyarakat Kelembagaan Kelembagaan	72,7%	74	74,2%	74,2%	74,2%	74,2%	74,2%
15. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Pembinaan Kepuasan Masyarakat	72	73%	73	73	73	73	73
16. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Pembinaan Kepuasan Masyarakat	75,4%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
17. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Pembinaan Kepuasan Masyarakat	75	76%	76%	76%	76%	76%	76%

3.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2019-2020

Tabel 3.4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkep
 Untuk Tahun 2019 dan 2020 Serta Perubahan 2019/2020 dan 2020/2021

No. Urut	Urutan	Revisi	2019	2020	2020/2021
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ARI SURUT DA				
4101	Pendapatan Asli Daerah				
4102	Pendapatan Asli Daerah				
4103	Pendapatan Asli Daerah				
4104	Pendapatan Asli Daerah				
42	PENDAPATAN BUKLAJER				
4201	Pendapatan BUKLAJER				
420101	Pendapatan BUKLAJER				
420102	Pendapatan BUKLAJER				
420103	Pendapatan BUKLAJER				
4202	Pendapatan BUKLAJER				
420201	Pendapatan BUKLAJER				
420202	Pendapatan BUKLAJER				
420203	Pendapatan BUKLAJER				
43	PENDAPATAN BUKLAJER				
4301	Pendapatan BUKLAJER				
4302	Pendapatan BUKLAJER				
4303	Pendapatan BUKLAJER				
4304	Pendapatan BUKLAJER				
4305	Pendapatan BUKLAJER				
4306	Pendapatan BUKLAJER				
4307	Pendapatan BUKLAJER				
4308	Pendapatan BUKLAJER				
4309	Pendapatan BUKLAJER				
4310	Pendapatan BUKLAJER				
4311	Pendapatan BUKLAJER				
4312	Pendapatan BUKLAJER				
4313	Pendapatan BUKLAJER				
4314	Pendapatan BUKLAJER				
4315	Pendapatan BUKLAJER				
4316	Pendapatan BUKLAJER				
4317	Pendapatan BUKLAJER				
4318	Pendapatan BUKLAJER				
4319	Pendapatan BUKLAJER				
4320	Pendapatan BUKLAJER				
4321	Pendapatan BUKLAJER				
4322	Pendapatan BUKLAJER				
4323	Pendapatan BUKLAJER				
4324	Pendapatan BUKLAJER				
4325	Pendapatan BUKLAJER				
4326	Pendapatan BUKLAJER				
4327	Pendapatan BUKLAJER				
4328	Pendapatan BUKLAJER				
4329	Pendapatan BUKLAJER				
4330	Pendapatan BUKLAJER				
4331	Pendapatan BUKLAJER				
4332	Pendapatan BUKLAJER				
4333	Pendapatan BUKLAJER				
4334	Pendapatan BUKLAJER				
4335	Pendapatan BUKLAJER				
4336	Pendapatan BUKLAJER				
4337	Pendapatan BUKLAJER				
4338	Pendapatan BUKLAJER				
4339	Pendapatan BUKLAJER				
4340	Pendapatan BUKLAJER				
4341	Pendapatan BUKLAJER				
4342	Pendapatan BUKLAJER				
4343	Pendapatan BUKLAJER				
4344	Pendapatan BUKLAJER				
4345	Pendapatan BUKLAJER				
4346	Pendapatan BUKLAJER				
4347	Pendapatan BUKLAJER				
4348	Pendapatan BUKLAJER				
4349	Pendapatan BUKLAJER				
4350	Pendapatan BUKLAJER				
4351	Pendapatan BUKLAJER				
4352	Pendapatan BUKLAJER				
4353	Pendapatan BUKLAJER				
4354	Pendapatan BUKLAJER				
4355	Pendapatan BUKLAJER				
4356	Pendapatan BUKLAJER				
4357	Pendapatan BUKLAJER				
4358	Pendapatan BUKLAJER				
4359	Pendapatan BUKLAJER				
4360	Pendapatan BUKLAJER				
4361	Pendapatan BUKLAJER				
4362	Pendapatan BUKLAJER				
4363	Pendapatan BUKLAJER				
4364	Pendapatan BUKLAJER				
4365	Pendapatan BUKLAJER				
4366	Pendapatan BUKLAJER				
4367	Pendapatan BUKLAJER				
4368	Pendapatan BUKLAJER				
4369	Pendapatan BUKLAJER				
4370	Pendapatan BUKLAJER				
4371	Pendapatan BUKLAJER				
4372	Pendapatan BUKLAJER				
4373	Pendapatan BUKLAJER				
4374	Pendapatan BUKLAJER				
4375	Pendapatan BUKLAJER				
4376	Pendapatan BUKLAJER				
4377	Pendapatan BUKLAJER				
4378	Pendapatan BUKLAJER				
4379	Pendapatan BUKLAJER				
4380	Pendapatan BUKLAJER				
4381	Pendapatan BUKLAJER				
4382	Pendapatan BUKLAJER				
4383	Pendapatan BUKLAJER				
4384	Pendapatan BUKLAJER				
4385	Pendapatan BUKLAJER				
4386	Pendapatan BUKLAJER				
4387	Pendapatan BUKLAJER				
4388	Pendapatan BUKLAJER				
4389	Pendapatan BUKLAJER				
4390	Pendapatan BUKLAJER				
4391	Pendapatan BUKLAJER				
4392	Pendapatan BUKLAJER				
4393	Pendapatan BUKLAJER				
4394	Pendapatan BUKLAJER				
4395	Pendapatan BUKLAJER				
4396	Pendapatan BUKLAJER				
4397	Pendapatan BUKLAJER				
4398	Pendapatan BUKLAJER				
4399	Pendapatan BUKLAJER				
4400	Pendapatan BUKLAJER				

4.1 Kesimpulan

Perbedaan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 15,3% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2021 telah mencapai 84,7%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Utara tahun 2023, yaitu 17 indikator atau 79,23% dengan target 2023, yaitu 25% kemudian pada tahun 2022 atau 41% kemudian tahun 2021.

Dari 24 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, terdapat 17 indikator kinerja utama yang telah mencapai target 100%, dan 7 indikator yang mencapai target di bawah 100%. Adapun 7 IKU yang mencapai target hasil belum mencapai target 100% atau hasil dibawahnya:

1. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
2. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
3. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
4. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
5. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
6. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
7. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
8. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
9. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
10. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
11. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
12. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
13. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
14. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
15. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
16. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul
17. Peningkatan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Bantul

18. Opini BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai pada 2023 adalah:

antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terdistribusi dengan akses jalan
2. Persentase desa/kelurahan yang terdistribusi dengan akses air
3. Angka Melekeh-Rural
4. PDRB sektor pertanian
5. Angka pengangguran terbuka
6. Nilai SAKSI

4.2 Rancangan Tindakan Lanjut

4.2.1. Tindakan Lanjut untuk Mewujudkan Sektor Pertanian yang

berdaya guna dan hasil guna yang optimal sebagai salah satu sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan target 100% tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Produk Pertanian

- a. Mengembangkan komoditas unggulan (PDRB) berdasarkan keunggulan dan mutu produk pertanian yang mempunyai nilai tambah menggunakan ETP
- b. Meningkatkan kualitas produk pertanian dengan menerapkan standar mutu produk pertanian
- c. Mengembangkan komoditas perikanan unggulan
- d. Meningkatkan hasil dan pendapatan petani ETP, serta meningkatkan mutu produk pertanian unggulan dengan menerapkan ETP. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada petani ETP dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara meningkatkan mutu produk pertanian yang dihasilkan (produksi) dengan menerapkan ETP dan meningkatkan mutu produk pertanian yang dihasilkan (produksi) dengan menerapkan ETP dan meningkatkan mutu produk pertanian yang dihasilkan (produksi) dengan menerapkan ETP

2. Persentase Desakorupsi yang संबंध dengan anggaran

- e. Meningkatkan dukungan dan aksesibilitas bagi para korban dalam penanganan permasalahan pelanggaran dengan cara melakukan masalah pemerintahan dan lain sebagainya dengan melakukan berbagai upaya warga beserta dengan dukungan dan lain sebagainya yang melibatkan seluruh stakeholder dan pengorganisasian masyarakat pembebasan liha.
- f. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah terutama dalam pembangunan dan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan diarahkan kepada dan dukungan yang berkaitan dengan pembebasan provinsi.
- g. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan anggaran melalui koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan anggaran.

3. ANGGARAN BUDGET

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.

4. KEBERHASILAN

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi dengan masyarakat melalui berbagai cara dan metode.



5. Angka pengangguran terbuka

- a. Meningkatkan Belanja investasi korporasi untuk penyebaran informasi strategis
- b. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas ekspor
- c. Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. peningkatan nilai ekspor dan realisasi investasi asing langsung seradan tenaga kerja di Bina Udaa melalui program, pendekatan, prosedur dan pemanfaatan teknologi terbaru
- e. Peningkatan program usaha penciptaan kesempatan kerja

6. Nilai K&I

- a. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan dasar (SDQ) agar siap menghadapi pasar kerja global melalui ke-4 strategi dan tujuan dan implementasi tahun 2014-2019 melalui hasil yang diharapkan untuk mencapai dan melampaui target pertumbuhan ekspor yang tinggi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan jumlah dan kualitas hasil ekspor nasional melalui jayanya
- b. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan dasar/ siap bekerja pada pasar kerja global melalui ke-4 strategi dan tujuan dan implementasi tahun 2014-2019 melalui hasil yang diharapkan untuk mencapai dan melampaui target pertumbuhan ekspor yang tinggi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan jumlah dan kualitas hasil ekspor nasional melalui jayanya
- c. Meningkatkan hasil penelitian/ karya tulis yang bermanfaat/ terdistribusi ke pasar/ beradanya pada industri/ lembaga
- d. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang memenuhi persyaratan ke-4 strategi yang dilaksanakan melalui jumlah yang lebih dari yang diharapkan
- e. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang memenuhi persyaratan ke-4 strategi yang dilaksanakan melalui jumlah yang lebih dari yang diharapkan
- f. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang memenuhi persyaratan ke-4 strategi yang dilaksanakan melalui jumlah yang lebih dari yang diharapkan
- g. Meningkatkan hasil penelitian/ karya tulis yang bermanfaat/ terdistribusi ke pasar/ beradanya pada industri/ lembaga
- h. Meningkatkan jumlah/ kualitas tenaga kerja yang memenuhi persyaratan ke-4 strategi yang dilaksanakan melalui jumlah yang lebih dari yang diharapkan

- h. Memastikan LPPD yang tersedia untuk menggunakan semua sumber tenaga analisis tercapai secara yang sudah ditetapkan.
- i. Memperbaiki penyediaan aparat kerja sebagai sumber daya dan mengungkapkan analisis pencapaian kerja yang tidak dapat tercapai, khususnya terhadap data-jumlah dan jenis yang akan diukur sebagai
- j. Meningkatkan kualitas laporan hasil analisis tercapai dengan cara dengan melakukan analisis penyediaan sumber daya tercapai untuk meningkatkan perubahan terhadap kualitas hasil kerja.
- k. Melakukan pelaksanaan proses analisis dan penyediaan sumber daya tercapai sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan tercapai secara

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Bekerja Sama Tahun 2021

No.	Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Tipe	Uraian	Target
1	Meningkatnya Desa-kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	1. Pemertasaan Desa-kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak administrasi	2. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak administrasi	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak infrastruktur	3. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak infrastruktur	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak lingkungan	4. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak lingkungan	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak pelayanan	5. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak pelayanan	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak ekonomi	6. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak ekonomi	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak kesehatan	7. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak kesehatan	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak pendidikan	8. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak pendidikan	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak budaya	9. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak budaya	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata kota	10. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata kota	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang	11. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata lindung	12. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata lindung	100%	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata air	13. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata air	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata energi	14. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata energi	100%	100%	100%	100%
15	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata lingkungan	15. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata lingkungan	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau	16. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka biru	17. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka biru	100%	100%	100%	100%
18	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka coklat	18. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka coklat	100%	100%	100%	100%
19	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hitam	19. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hitam	100%	100%	100%	100%
20	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka putih	20. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka putih	100%	100%	100%	100%
21	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka abu-abu	21. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka abu-abu	100%	100%	100%	100%
22	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka merah	22. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka merah	100%	100%	100%	100%
23	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka kuning	23. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka kuning	100%	100%	100%	100%
24	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua	24. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua	100%	100%	100%	100%
25	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda	25. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda	100%	100%	100%	100%
26	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau gelap	26. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau gelap	100%	100%	100%	100%
27	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau terang	27. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau terang	100%	100%	100%	100%
28	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	28. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
29	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	29. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
30	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	30. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%
31	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	31. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	100%	100%	100%	100%
32	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	32. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
33	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	33. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
34	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	34. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%
35	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	35. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	100%	100%	100%	100%
36	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	36. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
37	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	37. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
38	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	38. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%
39	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	39. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	100%	100%	100%	100%
40	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	40. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
41	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	41. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
42	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	42. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%
43	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	43. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	100%	100%	100%	100%
44	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	44. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
45	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	45. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
46	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	46. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%
47	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	47. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda muda	100%	100%	100%	100%
48	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	48. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua muda	100%	100%	100%	100%
49	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	49. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau muda tua	100%	100%	100%	100%
50	Meningkatnya Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	50. Pemertasaan Desa-kelurahan yang layak tata ruang terbuka hijau tua tua	100%	100%	100%	100%

No.	Elemen Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2019	2020	2021
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	100%	100%	100%
13	Meningkatnya daya tarik destinasi	20. Persentase kunjungan wisata	Indeks	100%	100%	100%
14	Meningkatnya kepelikan masyarakat	21. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan	Indeks	100%	100%	100%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%
16	Meningkatnya pendapatan daerah	23. Pendapatan Asli Daerah	Indeks	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	24. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	25. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	26. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	27. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%
21	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	28. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100%	100%	100%

Tabel Pengukuran Penjualan (KQ) Berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formula Pengukuran Penjualan Berdasarkan	Metode Pengukuran
1. Persentase penyelesaian yang terlambat dengan kualitas tinggi	%	$\frac{\text{Jumlah hari penyelesaian yang terlambat}}{\text{Jumlah hari penyelesaian}} \times 100\%$ $\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung
2. Persentase penyelesaian yang terlambat dengan kualitas tinggi	%	$\frac{\text{Jumlah hari penyelesaian yang terlambat}}{\text{Jumlah hari penyelesaian}} \times 100\%$ $\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung
3. Persentase penyelesaian yang terlambat	%	$\frac{\text{Jumlah hari penyelesaian yang terlambat}}{\text{Jumlah hari penyelesaian}} \times 100\%$ $\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung
A. KUALITAS PELAYANAN	YANG	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung
B. KUALITAS PELAYANAN	%	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung	Pengukuran langsung Pengukuran tidak langsung

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan, Perhitungan, Perolehan, dan Sasaran	Tahun 2023
6. Angka Harapan Hidup	tahun	Perhitungan: $\frac{\text{Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022}}{\text{Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 73,88 tahun	73,88 tahun
7. Penerimaan Sesi per tahun	juta rupiah	Perhitungan: $\frac{\text{Penerimaan Sesi pada tahun 2022}}{\text{Penerimaan Sesi pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 457,05 juta rupiah	457,05 juta rupiah
8. PDRB sektor pertanian	juta rupiah	Perhitungan: $\frac{\text{PDRB sektor pertanian pada tahun 2022}}{\text{PDRB sektor pertanian pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 1.120,00 juta rupiah	1.120,00 juta rupiah
9. PDRB sektor industri	juta rupiah	Perhitungan: $\frac{\text{PDRB sektor industri pada tahun 2022}}{\text{PDRB sektor industri pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 1.120,00 juta rupiah	1.120,00 juta rupiah
10. PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	Perhitungan: $\frac{\text{PDRB sektor perdagangan pada tahun 2022}}{\text{PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 1.120,00 juta rupiah	1.120,00 juta rupiah
11. PDRB sektor jasa	juta rupiah	Perhitungan: $\frac{\text{PDRB sektor jasa pada tahun 2022}}{\text{PDRB sektor jasa pada tahun 2021}} \times 100$ Data SP3 Tahun 2022 = 1.120,00 juta rupiah	1.120,00 juta rupiah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan, Perhitungan, Perolehan, dan Sasaran	Tahun 2023
12. PDRB sektor perdagangan	juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan dengan menggunakan metode harga dasar. Perhitungan PDRB sektor perdagangan adalah jumlah nilai tambah dari sektor perdagangan. PDRB sektor perdagangan tahun 2022 = Rp 1.200.000.000.000	Rp 1.200.000.000.000
13. GRBB sektor industri	juta rupiah	Perhitungan GRBB dilaksanakan dengan menggunakan metode harga dasar. Perhitungan GRBB sektor industri adalah jumlah nilai tambah dari sektor industri. GRBB sektor industri tahun 2022 = Rp 1.500.000.000.000	Rp 1.500.000.000.000
14. Angka Pengangguran Terbuka	%	Perhitungan Pengangguran Terbuka dilaksanakan dengan menggunakan rumus: Angka Pengangguran Terbuka = $\frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$	10,5%
15. RENDAHNYA PAKSIKOR PRODUKSI	juta rupiah	Perhitungan PAKSIKOR dilaksanakan dengan menggunakan rumus: PAKSIKOR = $\frac{Jumlah\ Paksi\ Kor}{Jumlah\ Produk}$	Rp 1.000.000.000.000
16. RENDAHNYA KURANG LOGIS/IRIS/IRAS	%	Perhitungan KURANG LOGIS/IRIS/IRAS dilaksanakan dengan menggunakan rumus: KURANG LOGIS/IRIS/IRAS = $\frac{Jumlah\ Kurang\ Logis}{Jumlah\ Total}$	15%
17. RENDAHNYA PENGUNCIAN	%	Perhitungan PENGUNCIAN dilaksanakan dengan menggunakan rumus: PENGUNCIAN = $\frac{Jumlah\ Pengunci}{Jumlah\ Total}$	10%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan, Perhitungan, Perolehan, dan Rata-rata	Perolehan Capaian
23. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase (%)	<p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menggunakan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat dan Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Angka SKM tahun 2023 adalah sebesar 80,00%.</p>	<p>80,00% 80,00% - 100% 80,00% 80,00% - 100% 80,00%</p>
24. CPM/SPK	Persentase (%)	<p>Pertemuan dengan masyarakat dan warga pemangku jabatan (BPM) sebagai mitra pelayanan publik.</p> <p>Hasil kegiatan BPM dengan bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MP3) tahun 2023.</p>	<p>100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100%</p>



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
KARNATAKA GOVT

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಲಾಖೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ : 1. ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Year	Country	Value	Unit	Source
2010	France	100	kg	FAO
2011	France	100	kg	FAO
2012	France	100	kg	FAO
2013	France	100	kg	FAO
2014	France	100	kg	FAO
2015	France	100	kg	FAO
2016	France	100	kg	FAO
2017	France	100	kg	FAO
2018	France	100	kg	FAO
2019	France	100	kg	FAO
2020	France	100	kg	FAO
2021	France	100	kg	FAO
2022	France	100	kg	FAO
2023	France	100	kg	FAO
2024	France	100	kg	FAO
2025	France	100	kg	FAO
2026	France	100	kg	FAO
2027	France	100	kg	FAO
2028	France	100	kg	FAO
2029	France	100	kg	FAO
2030	France	100	kg	FAO
2031	France	100	kg	FAO
2032	France	100	kg	FAO
2033	France	100	kg	FAO
2034	France	100	kg	FAO
2035	France	100	kg	FAO
2036	France	100	kg	FAO
2037	France	100	kg	FAO
2038	France	100	kg	FAO
2039	France	100	kg	FAO
2040	France	100	kg	FAO
2041	France	100	kg	FAO
2042	France	100	kg	FAO
2043	France	100	kg	FAO
2044	France	100	kg	FAO
2045	France	100	kg	FAO
2046	France	100	kg	FAO
2047	France	100	kg	FAO
2048	France	100	kg	FAO
2049	France	100	kg	FAO
2050	France	100	kg	FAO



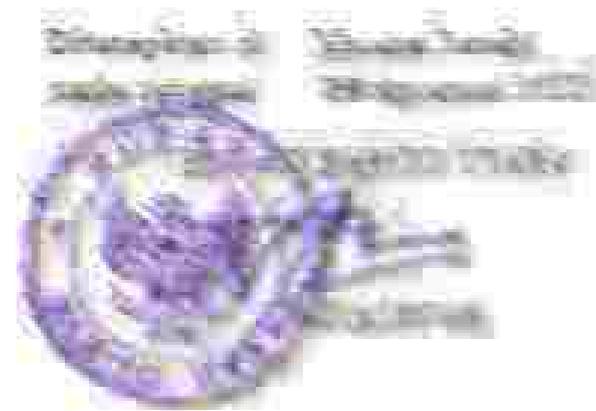


The data shows a steady increase in the production of wheat in France from 2010 to 2050. The production starts at 100 kg in 2010 and reaches 100 kg by 2050. This indicates a constant production level over the entire period.

Karya Ilmiah Kesehatan (KIK) yang membahas
analisis kesehatan masyarakat pada masyarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2023-2028.

KETIGA

- 1. Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Masyarakat



Penyusunan dan penyempurnaan karya tulis ini

1. Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelangkaan
2. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat

1. Mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif.
 2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan.
 3. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok.
 4. Melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar.
 5. Mengoptimalkan saluran distribusi dan pemasaran.
 6. Melakukan promosi dan iklan yang efektif.
 7. Menjaga reputasi merek dan citra perusahaan.
 8. Melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pemasaran secara berkala.

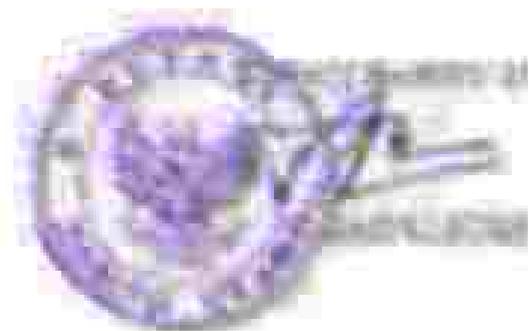
INDIKATOR KINERJA UTAMA (KINERJA) MANAJEMEN Pemasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Mengukur	Skala dan Satuan	Frekuensi Pengukuran
1	Meningkatkan pangsa pasar dan penjualan produk.	Pangsa Pasar	Perbandingan penjualan perusahaan terhadap total penjualan pasar.	Prosentase	Tahunan
2	Meningkatkan kepuasan pelanggan.	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP)	Skala pengukuran kepuasan pelanggan berdasarkan survei.	Skala 1-5	Triwulanan
3	Meningkatkan efisiensi biaya pemasaran.	Biaya Pemasaran per Unit (BPU)	Biaya pemasaran dibagi dengan jumlah unit yang terjual.	Rupiah	Tahunan
4	Meningkatkan loyalitas pelanggan.	Angka Retensi Pelanggan (ARP)	Persentase pelanggan yang kembali membeli produk.	Prosentase	Tahunan
5	Meningkatkan efektivitas iklan.	Return on Investment (ROI) Iklan	Keuntungan bersih dari iklan dibagi dengan biaya iklan.	Prosentase	Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target dan Strategi	Realisasi	Penyakit-penyakit
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita rata-rata	Target: Rp 10.000.000 Strategi: Meningkatkan pendapatan masyarakat	Rp 10.000.000	Daya Beli Masyarakat, Pengeluaran per kapita rata-rata
7	Meningkatnya nilai partisipasi	RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
8	Meningkatnya nilai partisipasi	RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
9	Meningkatnya nilai partisipasi	RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
10	Meningkatnya nilai kepuasan dan keterlibatan warga	Indikator Kepuasan Masyarakat	Target: 80% Strategi: Meningkatkan kepuasan masyarakat	80%	Kepuasan Masyarakat, Keterlibatan Warga
11	Meningkatnya daya beli masyarakat	RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
		RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
		RFPS rata-rata	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Partisipasi Masyarakat
12	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indikator Kepuasan Masyarakat	Target: 80% Strategi: Meningkatkan kepuasan masyarakat	80%	Kepuasan Masyarakat
		Indikator Keterlibatan Masyarakat	Target: 70% Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat	70%	Keterlibatan Masyarakat
13	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indikator Kepuasan Masyarakat	Target: 80% Strategi: Meningkatkan kepuasan masyarakat	80%	Kepuasan Masyarakat

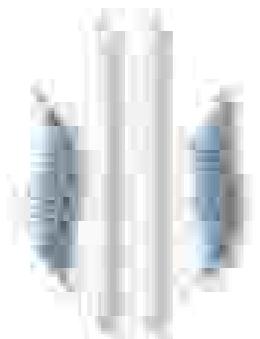
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (2014-2015)	Realisasi Kinerja	Penyakit-penyakit
13.	Meningkatnya data serta penelitian	Penelitian dan Pengembangan Wetland	1. Jumlah publikasi internasional 2. Jumlah publikasi nasional	1. 100% 2. 100%	1. Jumlah publikasi internasional 2. Jumlah publikasi nasional
14.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat	Tingkat partisipasi dalam kegiatan Kelembagaan Kelembagaan dan Pico (MPP)	1. Jumlah partisipasi dalam kegiatan 2. Jumlah partisipasi dalam kegiatan	1. 100% 2. 100%	1. Jumlah partisipasi dalam kegiatan 2. Jumlah partisipasi dalam kegiatan
15.	Meningkatnya keterlibatan di berbagai masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan	1. Jumlah partisipasi masyarakat 2. Jumlah partisipasi masyarakat	1. 100% 2. 100%	1. Jumlah partisipasi masyarakat 2. Jumlah partisipasi masyarakat
16.	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Partisipasi Masyarakat Masyarakat	1. Jumlah partisipasi masyarakat 2. Jumlah partisipasi masyarakat	1. 100% 2. 100%	1. Jumlah partisipasi masyarakat 2. Jumlah partisipasi masyarakat
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 2. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 3. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 4. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 5. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 6. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 7. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 8. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 9. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 10. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	1. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 2. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 3. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 4. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 5. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 6. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 7. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 8. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 9. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 10. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat
18.	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 2. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 3. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 4. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 5. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 6. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 7. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 8. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 9. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 10. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	1. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 2. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 3. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 4. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 5. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 6. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 7. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 8. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 9. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat 10. Jumlah kualitas pelayanan masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Target	Penyakit
19	Meningkatnya kualitas pelayanan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM 2019 sebesar 85,00. Target 2020 sebesar 86,00. Capaian 2020 sebesar 86,00.	85,00	86,00
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan aset daerah	Opin SIPK	Opin SIPK 2019 sebesar 85,00. Target 2020 sebesar 86,00. Capaian 2020 sebesar 86,00.	85,00	86,00





**PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**



**KABUPATEN TANAH
BUMBU**

**REKAMEN KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN KAROLINGGAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan post wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan post wilayah	100%	100%
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	100%	100%
3.	Menurunnya desa/kelurahan /linkspot	Persentase desa/kelurahan/linkspot	100%	100%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Kemampuan membaca Angka Melek Dasar	100% 100%	100% 100%
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100%	100%
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita rata-rata	100%	100%
7.	Meningkatnya sektor pertanian	PKSD sektor pertanian	100%	100%
8.	Meningkatnya sektor perikanan	PKSD sektor perikanan	100%	100%
9.	Meningkatnya sektor peternakan	PKSD sektor peternakan	100%	100%
10.	Meningkatnya sektor kepariwisataan dan UKM/pendaerahan serta industri	PKSD sektor kepariwisataan dan industri PKSD sektor kepariwisataan PKSD sektor industri	100% 100% 100%	100% 100% 100%
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka Pengeluaran Per Kapita Produktif	7% 100% 100%	7% 100% 100%
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100%	100%
13.	Meningkatnya daya hidup pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan	100%	100%
14.	Meningkatnya kontribusi masyarakat	Tingkat partisipasi pengorganisasian Masyarakat, Keorganisasian dan Keterlibatan	100%	100%
15.	Meningkatnya wawasan di kalangan masyarakat	Persentase Masyarakat yang melek dasar	100%	100%
16.	Menurunnya permasalahan sosial	Persentase PKK yang miskin	100%	100%
17.	Meningkatnya kualitas pemerintahan Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%

No.	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja	Nilai	Tipe
18.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja	Nilai NAKP	70,00	Manajemen
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70,00	Manajemen
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	70,00	Manajemen

No.	Program	Indikator Kinerja	Nilai
1.	Program Peningkatan Literasi	Nilai Literasi	70,00
2.	Program Peningkatan Literasi dan Budaya Literasi	Nilai Literasi	70,00
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Nilai Komunikasi	70,00
4.	Program Aplikasi Informatika	Nilai Aplikasi	70,00
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Pendidikan	70,00
6.	Program Pendidikan dan Tenaga Kejuruan	Nilai Pendidikan	70,00
7.	Program Pemeliharaan Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan	Nilai Kesehatan	70,00
8.	Program Peningkatan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Nilai Kesehatan	70,00
9.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Nilai Kesehatan	70,00
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesehatan	Nilai Kesehatan	70,00
11.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Perikanan	70,00
12.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Perikanan	70,00
13.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
14.	Program Pengelolaan dan Pemertanian Hasil Pertanian	Nilai Pertanian	70,00
15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sektor Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
16.	Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Nilai Kesehatan	70,00
17.	Program Pengendalian dan Pengawasan Sediaan Farmasi	Nilai Kesehatan	70,00
18.	Program Perikanan Usaha Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
19.	Program Penyuluhan Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
20.	Program Peningkatan Sektor Perikanan Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
21.	Program Stabilitas Harga Barang Pertanian Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
22.	Program Standarisasi dan Perbaikan Kualitas	Nilai Perikanan	70,00
23.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sektor Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
24.	Program Peningkatan Sektor Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
25.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sektor Perikanan	Nilai Perikanan	70,00
26.	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UKM)	Nilai Perikanan	70,00
27.	Program Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Perikanan	70,00

No.	Program	Jumlah	Kategori
54	Program Penunjang Proses Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10	Layanan
55	Program Pemerintahan dan Good Governance	10	Layanan
57	Program Perencanaan dan Pembangunan	10	Layanan
58	Program Kepegawaian Daerah	10	Layanan
59	Pelayanan Masyarakat	10	Layanan
60	Perencanaan Kebijakan, Pendampingan dan Konsultasi	10	Layanan
61	Program Pemecatan, Pengabdian dan Sosial	10	Layanan
62	Program Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Layanan
63	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Layanan
64	Program Pengabdian Masyarakat Daerah	10	Layanan
65	Program Pengelolaan Sampah Neka Daerah	10	Layanan

